

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA



LAPORAN DATA GENDER DAN ANAK

TAHUN 2022



Jl. Kenari No. 56 Kota Yogyakarta 55165
Telp. (0274) 551060
Email: dp3ap2kb@jogjakota.go.id
Website: dp3ap2kb.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas berkat dan rahmatNya kami dapat menyelesaikan Buku Laporan Data Gender dan Anak ini dengan baik dan lancar. Tentu dengan harapan semoga buku laporan ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam menyusun program-program pembangunan yang mengarusutamakan gender dan kepentingan terbaik bagi anak di masa yang akan datang.

Tujuan umum dari penyusunan Laporan Data Gender dan Anak ini adalah untuk mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak (PUHA), terutama dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di Kota Yogyakarta. Beberapa perbaikan kami lakukan dalam edisi ini sebagai tindak lanjut dari berbagai masukan dari para pengguna dan semua pihak yang selalu peduli dalam proses pengembangan data gender dan anak di Kota Yogyakarta. Kedua, kami memasukkan data-data yang bersumber dari dinas dukcapil kota untuk memberikan gambaran lebih lengkap mengenai jumlah dan perbandingan penduduk berdasarkan jenis kelamin maupun usia.

Tidak lupa kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam Menyusun Buku laporan Data Gender dan Anak ini. Semoga koordinasi penyelenggaraan data gender dan anak, yang telah dilaksanakan selama ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi, dan data yang telah diolah dapat kita manfaatkan bersama-sama.

Akhirnya kami menyadari Buku Laporan Data Gender dan Anak ini masih banyak kekurangan baik kelengkapan, akurasi data maupun penyajiannya, untuk itu saran perbaikan dimasa yang akan datang sangat kami harapkan.

Yogyakarta, Mei 2023

Ir. Edy Muhammad
NIP. 19630916 199203 1 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR DIAGRAM.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat.....	2
C. Dasar Hukum	3
BAB II DATA GENDER.....	5
A. Gender dalam Kependudukan	5
1. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta	5
2. Jumlah Lansia Kota Yogyakarta.....	6
3. Jumlah Lanjut Usia (Lansia) Miskin Kota Yogyakarta.....	8
4. Status Perkawinan Penduduk Kota Yogyakarta	9
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta	14
6. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Yogyakarta	15
7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Yogyakarta.....	15
B. Gender dalam Kesehatan.....	16
1. Angka Harapan Hidup Penduduk Kota Yogyakarta.....	16
2. Jumlah Kematian Ibu, Bayi Lahir Kota Yogyakarta.....	16
3. Ibu Hamil yang Berisiko Tinggi Kota Yogyakarta.....	17
4. Jumlah Kematian Neonatal Kota Yogyakarta	18
5. Jumlah Kematian Post Neonatal Kota Yogyakarta	19
6. Jumlah Kematian Anak Balita Kota Yogyakarta	20
7. Penderita HIV&AIDS Kota Yogyakarta	20
8. Persentase Perempuan Usia 10 Tahun Keatas Menurut Usia Perkawinan	21
9. Jumlah dan Persentase Wanita Usia Subur (WUS) Menurut Usia Perkawinan Kota Yogyakarta.....	22
10. Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta.....	23
11. Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Kota Yogyakarta.....	25
12. Jumlah <i>Surviving Infant</i> (bayi usia 0-11 bulan) dan Baduta yang telah Diimunisasi Dasar Lengkap Kota Yogyakarta	28
13. Jumlah Puskesmas Ramah Anak (PRA) Kota Yogyakarta	30
C. Gender Dalam Pendidikan.....	32
1. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kota Yogyakarta.....	32

2.	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Yogyakarta	33
3.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Yogyakarta	34
D.	Gender Dalam Ekonomi dan Ketenagakerjaan	34
1.	Jumlah Kepala Keluarga Kota Yogyakarta	34
2.	Jumlah Penduduk Penerima Manfaat Program Keluarga Sasaran Penerima Perlindungan Sosial (KSJPS).....	36
3.	Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kota Yogyakarta	38
4.	Pengangguran Kota Yogyakarta	40
E.	Gender Dalam Kebijakan Publik	42
F.	Gender dalam Politik	46
1.	Jumlah Calon Legislatif Kota Yogyakarta	46
2.	Jumlah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Aktif Tahun 2022.....	48
G.	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Yogyakarta.....	49
1.	Jumlah ASN Pemerintah Kota Yogyakarta.....	50
2.	Jumlah Pejabat ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	50
3.	Jumlah Mantri Pamong Praja Pemerintah Kota Yogyakarta	51
4.	Jumlah Lurah Pemerintah Kota Yogyakarta	52
BAB III	DATA ANAK.....	54
A.	Jumlah dan Persentase Penduduk Anak Kota Yogyakarta	54
B.	Perlindungan Anak Kota Yogyakarta	56
1.	Anak Penyandang Disabilitas.....	57
2.	Anak Jalanan	58
C.	Pemenuhan Hak Anak (Hak Sipil dan Kebebasan) Kota Yogyakarta.....	60
1.	Akta Kelahiran	61
2.	Kartu Identitas Anak (KIA).....	64
D.	Permasalahan Anak (Isu-Isu tentang Anak) Kota Yogyakarta	67
1.	Pernikahan Usia Dini	68
2.	Balita dalam Kondisi Stunting.....	71
3.	Dapur Balita	73
4.	Angka Putus Sekolah (APS)	73
5.	Angka Partisipasi Kasar (APK).....	75
6.	Angka Partisipasi Murni (APM)	76
7.	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	77
E.	Kelembagaan Kota layak Anak (KLA).....	78
1.	Kampung Ramah Anak (KRA)	78

2. Puskesmas Ramah Anak (PRA)	81
3. Sekolah Ramah Anak (SRA).....	81
4. Tempat Peribadatan Ramah Anak	82
5. Polsek Ramah Anak	83
6. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	84
7. Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekelana) dan Kecamatan Layak Anak (Kelana) ...	85
F. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).....	87
BAB IV KEKERASAN DI KOTA YOGYAKARTA	91
A. Jumlah Korban Kekerasan di Kota Yogyakarta.....	91
1. Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Umur	94
2. Korban Kekerasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	95
3. Korban Kekerasan Berdasarkan Hubungannya dengan Korban	97
4. Korban Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan	98
5. Korban Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian.....	100
6. Pelayanan yang Diberikan Kepada Para Korban Kekerasan	102
7. Korban Kekerasan Berdasarkan Kategori KDRT, Jenis Kelamin dan Usia.....	103
B. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak di Kota Yogyakarta.....	104
1. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kelompok Umur	107
2. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	109
3. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Hubungan dengan Korban	111
4. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Bentuk Kekerasan.....	112
5. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Tempat Kejadian.....	115
6. Pelayanan yang Diberikan Kepada Para Korban Kekerasan terhadap Anak.....	117
BAB V PENUTUP	1
A. KESIMPULAN	1
B. SARAN.....	2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2022.....	5
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Lansia Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2022	7
Tabel 2.3. Jumlah Lanjut Usia Miskin Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2022	8
Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Status Perkawinan, Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2022.....	10
Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Status Perceraian, Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	13
Tabel 2.6. IPM Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022.....	14
Tabel 2.7. IPG Kota Yogyakarta Periode Tahun 2018-2020.....	15
Tabel 2.8. IDG Kota Yogyakarta Tahun 2019-2021	15
Tabel 2.9. Angka Harapan Hidup di Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin Periode 2019-2022.....	16
Tabel 2.10. Jumlah kematian Ibu, Bayi Lahir Kota Yogyakarta Periode 2020-2022.....	17
Tabel 2.11. Jumlah Ibu Hamil Risiko Tinggi Per Puskesmas Kota Yogyakarta, Periode 2020-2022.....	18
Tabel 2.12. Jumlah Kematian Neonatal Kota Yogyakarta, Periode 2020-2022.....	18
Tabel 2.13. Jumlah Kematian Post Neonatal Kota Yogyakarta Menurut jenis Kelamin, Periode 2020-2022	19
Tabel 2.14. Jumlah Kematian Anak Balita Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin, Periode 2020-2022	20
Tabel 2.15. Jumlah Penderita HIV&AIDS Kota Yogyakarta Menurut jenis Kelamin, Periode 2020-2022	20
Tabel 2.16. Persentase Perempuan Usia 10 Tahun Keatas Menurut Usia Perkawinan, Periode 2019-2022	22
Tabel 2.17. Jumlah dan Persentase Wanita Usia Subur (WUS) Menurut Usia Perkawinan Kota Yogyakarta Per Kemantren Tahun 2022	22
Tabel 2.18. Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	24
Tabel 2.19. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelainan Fisik dan Mental Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	25
Tabel 2.20. Jumlah Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Kota Yogyakarta Menurut Kemantren, Kelurahan dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	27

Tabel 2.21. Jumlah <i>Surviving Infant</i> dan Baduta yang telah Diimunisasi Dasar Lengkap di Kota Yogyakarta Menurut Kemantren, Kelurahan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	30
Tabel 2.22. Puskesmas Ramah Anak di Kota Yogyakarta Menurut Kemantren Tahun 2022.....	31
Tabel 2.23. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	32
Tabel 2.24. Harapan Lama Sekolah Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin, Periode 2019-2022.....	33
Tabel 2.25. Rata-Rata Lama Sekolah Kota Yogyakarta 2019-2022	34
Tabel 2.26. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta Tahun 2022	35
Tabel 2.27. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Penerima Manfaat Program KSJPS Pemutakhiran Tahun 2022 Menurut Kemantren, Kelurahan dan Jenis kelamin	38
Tabel 2.28. Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kota Yogyakarta Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	39
Tabel 2.29. Penduduk Kota Yogyakarta yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	40
Tabel 2.30. Jumlah Pengangguran di Kota Yogyakarta Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022	42
Tabel 2.31. OPD di Kota Yogyakarta yang Sudah Membuat GAP dan GBS	46
Tabel 2.32. Jumlah Calon Legislatif Kota Yogyakarta Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Periode 2019-2024.....	47
Tabel 2.33. Jumlah Anggota DPRD Kota Yogyakarta Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin Periode 2019-2024.....	48
Tabel 2.34. Jumlah Ketua LPMK Kota Yogyakarta Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022	49
Tabel 2.35. Jumlah ASN Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019- 2022.....	50
Tabel 2.36. Jumlah Pejabat ASN Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019- 2022.....	51
Tabel 2.37. Jumlah Mantri Pamong Praja Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019- 2022.....	52
Tabel 2.38. Jumlah Mantri Pamong Praja Kota Yogyakarta Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022	53
Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Anak Kota Yogyakarta Tahun 2022 Berdasarkan Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	54
Tabel 3.2. Jumlah Anak di Kota Yogyakarta Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022	55

Tabel 3.3. Jumlah Anak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	57
Tabel 3.4. Jumlah Anak Jalanan Kota Yogyakarta Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022	59
Tabel 3.5. Jumlah Anak Yang Berumur 0-18 Tahun Kota Yogyakarta Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	61
Tabel 3.6. Jumlah dan Persentase Anak Yang Berumur 0 - 18 Tahun Kota Yogyakarta Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kemantren Tahun 2022.....	62
Tabel 3.7. Jumlah Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	65
Tabel 3.8. Jumlah Anak Kota Yogyakarta yang Berumur Dibawah 17 Tahun Berdasarkan Kepemilikan KIA, Kemantren dan Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2022.....	65
Tabel 3.9. Jumlah Anak Kota Yogyakarta yang Berumur Dibawah 17 Tahun Berdasarkan Kepemilikan KIA dan Kemantren Tahun 2022.....	67
Tabel 3.10. Jumlah Calon Pasangan Pengantin Usia Dini Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemantren Tahun 2022	68
Tabel 3.11. Jumlah Dispensasi Pernikahan yang diputus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2022 (Jiwa) Berdasarkan Kemantren dan Jenis Kelamin.....	70
Tabel 3.12. Jumlah Baduta Stunting di Setiap Puskesmas Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	72
Tabel 3.13. Jumlah Dapur Balita di Kota Yogyakarta	73
Tabel 3.14. Jumlah Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022	74
Tabel 3.15. Jumlah Angka Partisipasi Kasar di Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	76
Tabel 3.16. Jumlah Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	76
Tabel 3.17. Jumlah Angka Partisipasi Sekolah di Kota Yogyakarta Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	77
Tabel 3.18. Jumlah Kampung Ramah Anak yang Terbentuk di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2022.....	78
Tabel 3.19. Jumlah Kampung Ramah Anak di Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemantren Tahun 2022	80
Tabel 3.20. Jumlah Puskesmas Ramah Anak di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022	81

Tabel 3.21. Jumlah dan Tahun Terbentuknya Sekolah Ramah Anak di Kota Yogyakarta .	81
Tabel 3.22. Jumlah PATBM Berdasarkan Tahun Terbentuknya di Kota Yogyakarta	84
Tabel 3.23. Jumlah Dekelana di Kota Yogyakarta Berdasarkan Tahun Terbentuknya	85
Tabel 3.24. Kecamatan Layak Anak se Kota Yogyakarta	86
Tabel 3.25. Jumlah Klien Puspaga Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	87
Tabel 3.26. Jumlah Klien Puspaga Berdasarkan Kasus yang diLaporkan Tahun 2022	89
Tabel 3.27. Jumlah Klien Puspaga Berdasarkan Jenis Pelayanan Tahun 2022	89
Tabel 3.28. Jumlah Klien Puspaga Berdasarkan Jenis LayananTahun 2022	90
Tabel 4.1. Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Kemantren dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	92
Tabel 4.2. Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Kemantren dan Kelompok Umur Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	94
Tabel 4.3. Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Kemantren dan Jenjang Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	96
Tabel 4.4. Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Kemantren dan Hubungan dengan Korban Kota Yogyakarta Tahun 2022	97
Tabel 4.5. Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Kemantren dan Bentuk Kekerasan Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	99
Tabel 4.6. Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Kemantren dan Tempat Kejadian Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	101
Tabel 4.7. Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Kemantren dan Pelayanan yang Diberikan Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	102
Tabel 4.8. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	105
Tabel 4.9. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kemantren dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	107
Tabel 4.10. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kemantren dan Kelompok Umur Kota Yogyakarta Tahun 2022	107
Tabel 4.11. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kemantren dan Jenjang Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2022	110
Tabel 4.12. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kemantren dan Hubungan dengan Korban Kota Yogyakarta Tahun 2022	112
Tabel 4.13. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kemantren dan Bentuk Kekerasan Kota Yogyakarta Tahun 2022	114
Tabel 4.14. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kemantren dan Tempat Kejadian Korban Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	116
Tabel 4.15. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kemantren dan Pelayanan yang Diberikan Korban Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	118

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	6
Diagram 2.2. Jumlah Penduduk Lansia Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022.....	7
Diagram 2.3. Jumlah Lanjut Usia Miskin Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022.....	9
Diagram 2.4. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Status Perkawinan, Jenis Kelamin Tahun 2022	11
Diagram 2.5. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Status Perceraian, Jenis Kelamin Tahun 2022	13
Diagram 2.6. Penduduk Kota Yogyakarta yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022.....	40
Diagram 2.7. Jumlah Pengangguran di Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin, Periode 2020-2022	41
Diagram 3.1. Persentase Penduduk Anak Kota Yogyakarta Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	55
Diagram 3.2. Jumlah Anak di Kota Yogyakarta Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022.....	56
Diagram 3.3. Persentase Anak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	58
Diagram 3.4. Persentase Anak Jalanan Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	60
Diagram 3.5. Jumlah Anak Yang Berumur 0 - 18 Tahun Kota Yogyakarta Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	62
Diagram 3.6. Persentase Anak Yang Berumur 0 - 18 Tahun Kota Yogyakarta Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kemantren Tahun 2022	63
Diagram 3.7. Persentase Anak Kota Yogyakarta yang Berumur di Bawah 17 Tahun Menurut Kepemilikan KIA dan Jenis Kelamin Tahun 2022	66
Diagram 3.8. Persentase Anak Kota Yogyakarta yang Berumur Dibawah 17 Tahun Berdasarkan Kepemilikan KIA dan Kemantren Tahun 2022.....	67
Diagram 3.9. Jumlah Calon Pasangan Pengantin Usia Dini Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemantren Tahun 2022	69
Diagram 3.10. Jumlah Calon Pasangan Pengantin Usia Dini Kota Yogyakarta	

Berdasarkan Kemantren Tahun 2022	69
Diagram 3.11. Jumlah Baduta Stunting di Setiap Puskesmas Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	72
Diagram 3.12. Persentase Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Jenis Kelamin Tahun 2022.....	75
Diagram 3.13. Rekapitulasi Jumlah Kampung Ramah Anak di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2022.....	79
Diagram 3.14. Persentase Kampung Ramah Anak di Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	79
Diagram 3.15. Jumlah Sekolah Ramah Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	82
Diagram 3.16. Persentase Masjid Ramah Anak di Kota Yogyakarta Tahun 2022	83
Diagram 3.17. Persentase Polsek Ramah Anak di Kota Yogyakarta Tahun 2022	83
Diagram 3.18. Rekapitulasi Jumlah PATBM di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.....	84
Diagram 3.19. Rekapitulasi Jumlah Dekelana Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.....	85
Diagram 3.20. Rekapitulasi Jumlah Kelana di Kota Yogyakarta Tahun 2016-2022	87
Diagram 3.21. Persentase Klien Puspaga Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	88
Diagram 3.22. Persentase Jumlah Klien Puspaga Berdasarkan Jenis Layanan Tahun 2022.....	89
Diagram 3.23. Jumlah Klien Puspaga Berdasarkan Jenis Layanan yang Diakses Tahun 2022.....	90
Diagram 4.1. Persentase Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	93
Diagram 4.2. Jumlah Korban Kekerasan Per Bulan Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	93
Diagram 4.3. Persentase Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Umur Kota Yogyakarta tahun 2022	95
Diagram 4.4. Persentase Korban Kekerasan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2022.....	97
Diagram 4.5. Persentase Korban Kekerasan Berdasarkan Hubungan dengan Korban Kota Yogyakarta tahun 2022.....	98
Diagram 4.6. Persentase Korban Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan Kota Yogyakarta tahun 2022.....	100
Diagram 4.7. Persentase Korban Kekerasan Berdasarkan Pelayanan yang Diberikan Kota Yogyakarta tahun 2022.....	103
Diagram 4.8. Persentase Korban Kekerasan Berdasarkan Kategori KDRT dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta tahun 2022	104

Diagram 4.9. Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	105
Diagram 4.10. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Per Bulan Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	106
Diagram 4.11. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2022	108
Diagram 4.12. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2022	109
Diagram 4.13. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Hubungan dengan Korban dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	111
Diagram 4.14. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Bentuk Kekerasan dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2022	112
Diagram 4.15. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Tempat Kejadian dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2022	115
Diagram 4.16. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Pelayanan yang Diberikan dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak dari berbagai bidang pembangunan. Isu gender dan anak selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses kebijakan pembangunan. Masalah utama yang selalu mengemuka adalah ketersediaan data terpilah kurang memadai, hal ini disebabkan kurang tersedianya kelembagaan (peraturan, lembaga, dan mekanisme) dalam penyelenggaraannya. Sebagai akibatnya kebijakan, program, kegiatan pembangunan tidak responsif terhadap kebutuhan, kesulitan sebagai perempuan dan/atau sebagai laki-laki dan tidak memihak bagi kepentingan terbaik bagi anak, dan disebut **buta gender**. Alhasil ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan masih terus berlanjut, meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional.

Untuk mengatasi permasalahan di atas diperlukan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur sebagai pembuka wawasan adanya kesenjangan/ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, anak laki laki dan anak perempuan. Berbagai upaya untuk penyediaan data terpilah di kementerian/lembaga dan daerah telah banyak dilakukan antara lain melalui nota kesepahaman (MoU) tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan pimpinan kementerian/lembaga, dan seluruh kepala daerah provinsi. Hal yang sama juga dilakukan nota kesepahaman bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang penyediaan data dan informasi gender dan anak.

Di Indonesia mengenai data terpilah ini tercantum dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Dalam upaya meningkatkan kedudukan, peran, kualitas perempuan, dan kesetaraan gender, serta penjaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seluruh sektor pembangunan baik pusat maupun daerah, diperlukan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur. Selanjutnya data terpilah itu harus dianalisa dengan variabel-variabel yang relevan dan spesifik sesuai dengan kebutuhan.

Data menurut jenis kelamin dan umur merupakan data dasar untuk melakukan analisis gender dan anak. Dalam melakukan analisis gender dan analisis anak data terpilah harus dikombinasi dengan variabel-variabel lainnya (sesuai dengan

keperluannya) seperti umur, pendidikan, status sosial ekonomi, status kesehatan, status tumbuh kembang dan status perlindungan anak, latar belakang budaya, kecacatan, dll. Kombinasi data terpilih dengan unsur-unsur tersebut, dapat menggambarkan heterogenitas di antara kehidupan kelompok perempuan dan di antara kehidupan kelompok laki-laki serta kelompok anak.

Metode pengumpulan data terpilih dapat dilakukan melalui berbagai cara pengumpulan data. Namun dalam keseluruhan proses pengumpulan data harus selalu dengan lensa gender, misalnya dalam perumusan masalah (ada mengandung isu gender, rencana penelitian (informan dan sampel terdiri dari laki-laki dan perempuan), data dipilih menurut jenis kelamin dan umur dan harus selalu memandangnya dari perspektif gender, artinya sejak semula pemilahan data menurut jenis kelamin dan umur adalah keharusan.

Penyajian data dalam bentuk narasi atau uraian ringkas dalam buku data terpilih dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang cara membaca tabel, arti data yang mungkin dapat menggambarkan isu gender dan anak, dan sepanjang memungkinkan mencari faktor-faktor yang terkait isu tersebut.

B. Tujuan dan Manfaat

Data gender dan anak dapat digunakan pengambil kebijakan untuk :

1. Mengidentifikasi perbedaan (kondisi dan perkembangan) keadaan perempuan dan laki-laki, termasuk anak, dalam dimensi tempat dan waktu yang berbeda;
2. Mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki; dan mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan, laki-laki dan anak-anak yang responsive terhadap masalah, kebutuhan, dan pengalaman mereka.
3. Sebagai data base untuk mengungkapkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki;
4. Sebagai informasi yang dibutuhkan bagi semua pihak untuk mewujudkan kesetaraan Gender;
5. Sebagai pertimbangan dalam menentukan alokasi sumber daya;
6. Sebagai input untuk melakukan Gender analisis;
7. Mengidentifikasi masalah, membangun opsi, dan memilih yang paling efektif untuk mendapatkan manfaat secara optimal bagi perempuan maupun laki-laki;
8. Memahami kontribusi ekonomi, keadaan, dan realitas sesungguhnya kehidupan perempuan maupun laki-laki; dan

9. Melihat dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki dengan cara melaksanakan evaluasi, monitoring, mengukur kemajuan dan mengukur outcome.

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Data Gender dan Anak didasarkan pada beberapa peraturan perundang undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019: Pengarusutamaan Gender dalam Prioritas Nasional
4. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
6. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
9. Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Daerah
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II DATA GENDER

A. Gender dalam Kependudukan

1. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah seluas 32,5 km² dan dengan tingkat kepadatan penduduk 12.781 jiwa/km² pada tahun 2020.¹ Hasil pendataan hingga bulan Desember 2022, jumlah penduduk di Kota Yogyakarta ada sejumlah 414.487 jiwa, yang dibagi dalam 14 kemantren yang ada, seperti dalam tabel dibawah ini.

Kemantren	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tegalrejo	18155	19184	37339
Jetis	13025	14050	26853
Gondokusuman	20638	22314	42952
Danurejan	10340	10874	21214
Gedongtengen	9417	9878	19295
Ngampilan	8855	9291	18146
Wirobrajan	13627	14379	28006
Mantrijeron	17101	18293	35394
Kraton	10448	11138	21586
Gondomanan	7155	7616	14771
Pakualaman	5045	5534	10579
Mergangsan	15260	16489	31749
Umbulharjo	34621	36575	71196
Kotagede	17201	17984	35185
Jumlah	200888	213599	414487

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2022

Sumber: Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil Kota Yogyakarta

¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/08/jumlah-penduduk-kota-yogyakarta-374-ribu-jiwa-pada-2020#:~:text=Kota%20Yogyakarta%20memiliki%20luas%20wilayah,penduduk%2012.781%20jiwa%20>
F

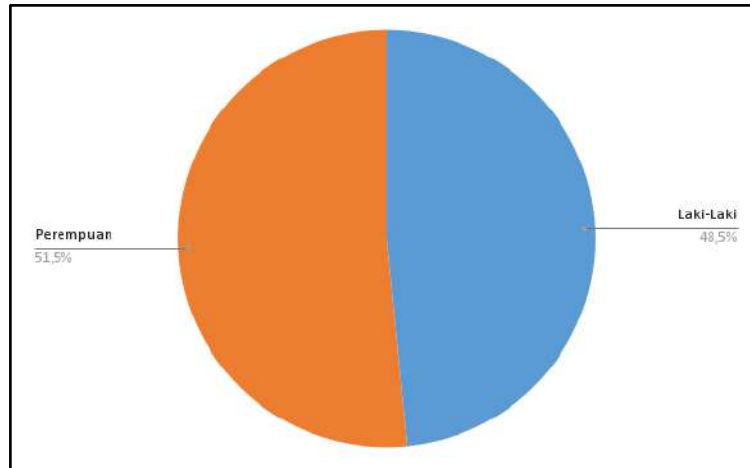


Diagram 2.1. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022
 Sumber: Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil Kota Yogyakarta

Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk berjenis kelamin laki-laki, dengan selisih sebesar 3% yang jika dijabarkan dalam angka, ada sebesar 12.711 jiwa. Penduduk terbanyak berada di Kemantren Umbulharjo sebesar 71.196 jiwa, berbanding lurus dengan luas wilayahnya yang merupakan kemantren paling besar di Kota Yogyakarta.

2. Jumlah Lansia Kota Yogyakarta

Menurut *World Health Organization* (WHO), lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahap akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut *aging process* atau proses penuaan.

Klasifikasi lansia menurut Kementerian Kesehatan RI (PMK No. 25 Tahun 2016), antara lain :

- a. Pra-lanjut usia, yang berada pada rentang usia 45-59 tahun.
- b. Lanjut usia, yang berada pada rentang usia 60-69 tahun.
- c. Lanjut usia dengan resiko tinggi, yang berada pada usia >70 tahun atau >=60 tahun dengan masalah kesehatan.

Jumlah lansia yang ada di Kota Yogyakarta per Desember 2022 ada sebanyak 59.775 jiwa atau 14% dari total penduduk Kota Yogyakarta, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Kemantren	60-69 Tahun		70-79 Tahun		80 Tahun Keatas		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Tegalrejo	1543	1841	609	741	178	328	2330	2910
Jetis	1167	1502	436	630	97	254	1700	2386
Gondokusuman	1799	2190	615	923	193	430	2607	3543
Danurejan	896	1111	322	417	80	207	1298	1735
Gedongtengen	890	1052	320	464	92	187	1302	1703
Ngampilan	799	961	273	405	65	150	1137	1516
Wirobrajan	1170	1353	438	582	136	249	1744	2184
Mantrijeron	1590	1862	572	774	162	322	2324	2958
Kraton	1022	1188	358	549	122	249	1502	1986
Gondomanan	691	880	276	362	57	138	1024	1380
Pakualaman	497	612	139	276	44	127	680	1015
Mergangsan	1434	1763	492	701	166	292	2092	2756
Umbulharjo	2864	3376	1055	1265	314	524	4233	5165
Kotagede	1478	1640	466	593	152	236	2096	2469
Jumlah	17840	21331	6371	8682	1858	3693	26069	33706

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Lansia Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2022

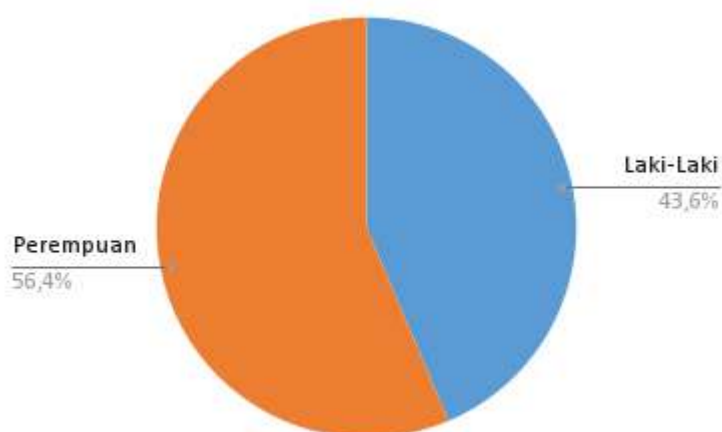


Diagram 2.2. Jumlah Penduduk Lansia Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022
Sumber: Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Tabel dan Diagram diatas menunjukkan sebaran dari 33.706 jiwa lansia berjenis kelamin perempuan dan 26.069 jiwa lansia berjenis kelamin laki-laki di Kota Yogyakarta. Jumlah lansia terbesar ada pada kelompok usia 60-70 tahun, sebesar 39.171 jiwa atau 65.5% dari keseluruhan dari lansia yang ada di Kota Yogyakarta.

3. Jumlah Lanjut Usia (Lansia) Miskin Kota Yogyakarta

Seseorang di masa tuanya pastilah berkeinginan menjadi sosok lansia tangguh yang sehat, mandiri, aktif dan produktif. Menjadi lansia tangguh dibutuhkan kondisi yang mendukung baik, diantaranya berkecukupan secara sosial dan ekonomi. Namun tidak sedikit yang mengalami sebaliknya. Para peneliti dan pakar mendapati bahwa tidak sedikit lansia yang mengalami *impecunity* (kemiskinan) di masa tuanya. Pada Tahun 2022 lansia miskin di Kota Yogyakarta total terdapat 1.254 jiwa atau 2% dari total lansia yang ada di Kota Yogyakarta, dengan sebarannya sebagai berikut.

KEMANTREN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	L	P	
TEGALREJO	14	61	75
JETIS	15	52	67
GONDOKUSUMAN	17	67	84
DANUREJAN	17	17	34
GEDONGTENGEN	7	26	33
NGAMPILAN	54	74	128
WIROBRAJAN	74	111	185
MANTRIJERON	13	58	71
KRATON	7	21	28
GANDOMANAN	9	35	44
PAKUALAMAN	20	53	73
MERGANGSAN	8	35	43
UMBULHARJO	52	159	211
KOTAGEDE	41	137	178
JUMLAH	348	906	1254

Tabel 2.3. Jumlah Lanjut Usia Miskin Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2022

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

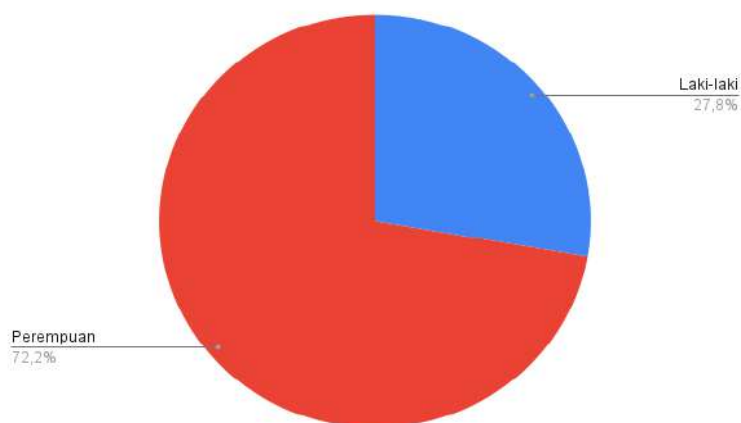


Diagram 2.3. Jumlah Lanjut Usia Miskin Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022
 Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Tabel dan Diagram diatas menunjukkan bahwa lansia miskin di Kota Yogyakarta pada Tahun 2022 mayoritas adalah perempuan dengan persentase 72.2% dan 3.5% dari total lansia perempuan di Kota Yogyakarta. Banyaknya selisih perempuan dan laki-laki yang menjadi lansia miskin menunjukkan bahwa masih banyak perempuan di usia lanjutnya dependen (tergantung) pada suami/keluarga secara sosial maupun ekonomi. Hal ini berbanding lurus dengan lebih banyaknya jumlah perempuan yang bercerai dan memilih untuk tidak menikah (berkeluarga) lagi.

4. Status Perkawinan Penduduk Kota Yogyakarta

a. Kawin dan Belum Kawin

Penduduk di Kota Yogyakarta yang belum kawin ada sebanyak 191.228 jiwa dan yang kawin sebanyak 191.444 jiwa, yang kemudian persebarannya per kemantren dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

KEMANTREN	JENIS KELAMIN	BELUM KAWIN	KAWIN
TEGALREJO	Laki-laki	8942	8470
	Perempuan	7992	8962
JETIS	Laki-laki	6565	5877
	Perempuan	6000	6255
GONDOKUSUMAN	Laki-laki	10488	9456
	Perempuan	9758	10231
DANUREJAN	Laki-laki	5306	4602
	Perempuan	4668	4889

GEDONGTENGEN	Laki-laki	4838	4160
	Perempuan	4152	4454
NGAMPILAN	Laki-laki	4506	4033
	Perempuan	3949	4298
WIROBRAJAN	Laki-laki	6890	6193
	Perempuan	6221	6498
MANTRIJERON	Laki-laki	8586	7892
	Perempuan	7686	8536
KRATON	Laki-laki	5250	4788
	Perempuan	4609	5129
GONDOMANAN	Laki-laki	3561	3277
	Perempuan	3226	3459
PAKUALAMAN	Laki-laki	2564	2286
	Perempuan	2351	2458
MERGANGSAN	Laki-laki	7547	7126
	Perempuan	6919	7590
UMBULHARJO	Laki-laki	17108	16349
	Perempuan	15515	17352
KOTAGEDE	Laki-laki	8515	8144
	Perempuan	7516	8680
TOTAL	Laki-laki	100666	92653
	Perempuan	90562	98791
	Jumlah	191228	191444

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Status Perkawinan, Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2022

Sumber: Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta



Diagram 2.4. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Status Perkawinan, Jenis Kelamin Tahun 2022

Sumber: Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Tabel dan Diagram diatas menunjukkan bahwa selisih penduduk Kota Yogyakarta yang belum kawin dengan yang kawin adalah sejumlah 216 jiwa, dengan penduduk yang belum kawin lebih banyak. Sedangkan untuk penduduk perempuan lebih banyak yang kawin dengan selisih 8.229 jiwa dan penduduk laki-laki lebih banyak yang belum kawin dengan selisih 8.013 jiwa.

Dengan jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak kawin selaras dengan usia perempuan menikah yang lebih muda dibandingkan dengan laki-laki. Perlu menjadi perhatian bersama bahwa pada Tahun 2022 sebanyak 71 pasangan mengajukan assessment calon pengantin di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kenari Kota Yogyakarta dengan 61 jiwa diantaranya merupakan perempuan usia dini (<19). Sedangkan sebanyak 56 pasangan yang mengajukan dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada Tahun 2022, 54 diantaranya telah disetujui dengan 46 jiwa diantaranya merupakan perempuan usia dini. Angka ini naik dari tahun sebelumnya, yang pada Tahun 2021 sejumlah 46 pasangan yang melakukan pernikahan usia dini.

b. Cerai Hidup dan Cerai Mati

Berdasarkan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan menjadi putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Kemudian status cerai dibedakan menjadi cerai hidup dan cerai mati. Penduduk Kota Yogyakarta dengan status pernikahan cerai hidup ada sejumlah 9.072 jiwa dan cerai mati ada sejumlah 22.743 jiwa, yang kemudian persebarannya dalam 14 kemantren dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

KEMANTREN	JENIS KELAMIN	CERAI HIDUP	CERAI MATI
TEGALREJO	Laki-laki	360	383
	Perempuan	529	1701
JETIS	Laki-laki	272	311
	Perempuan	441	1354
GONDOKUSUMAN	Laki-laki	363	331
	Perempuan	506	1819
DANUREJAN	Laki-laki	209	223
	Perempuan	296	1021
GEDONGTENGEN	Laki-laki	206	213
	Perempuan	306	966
NGAMPILAN	Laki-laki	145	171
	Perempuan	182	862
WIROBRAJAN	Laki-laki	246	298
	Perempuan	367	1293
MANTRIJERON	Laki-laki	265	358
	Perempuan	448	1623
KRATON	Laki-laki	205	205
	Perempuan	310	1090
GONDOMANAN	Laki-laki	149	168
	Perempuan	193	738
PAKUALAMAN	Laki-laki	96	99
	Perempuan	155	570
MERGANGSAN	Laki-laki	278	309
	Perempuan	417	1563
UMBULHARJO	Laki-laki	533	631
	Perempuan	941	2767

KOTAGEDE	Laki-laki	242	300
	Perempuan	412	1376
TOTAL	Laki-laki	3569	4000
	Perempuan	5503	18743
	Jumlah	9072	22743

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Status Perceraian, Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022

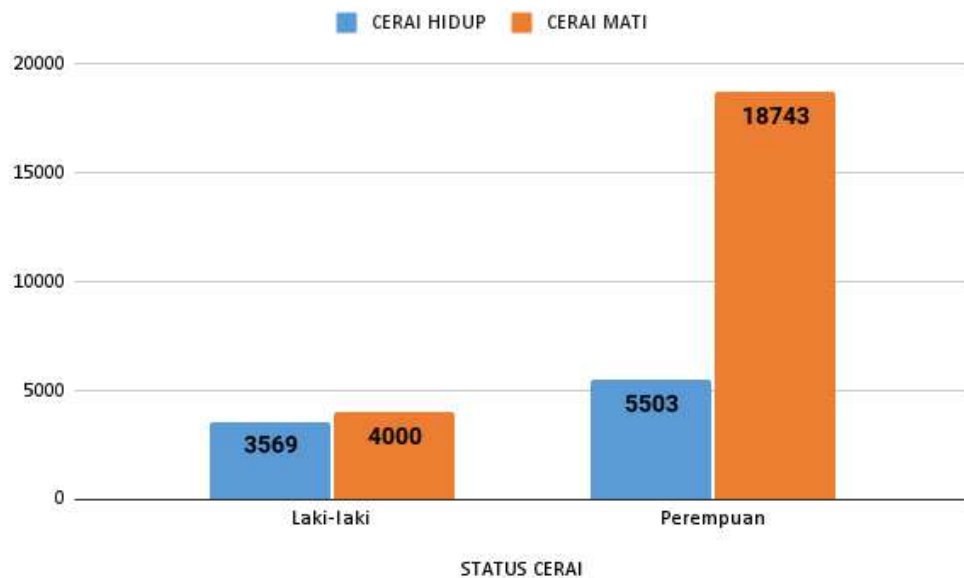


Diagram 2.5. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Status Perceraian, Jenis Kelamin Tahun 2022

Sumber: Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Dari tabel dan Diagram diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang cerai hidup maupun cerai mati lebih banyak perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa lebih banyak penduduk perempuan Kota Yogyakarta yang bercerai dan kemudian memilih untuk tidak menikah lagi, selaras dengan jumlah kepala keluarga perempuan yang juga menunjukkan peningkatan.

Jumlah cerai hidup juga tampak menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu, berbanding terbalik dengan cerai mati yang mengalami penurunan angka. Meningkatnya jumlah perceraian hidup tidak dapat dilepaskan dari jumlah kekerasan di Kota Yogyakarta yang didominasi oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan pelaku adalah pasangannya sendiri (mayoritas suami).

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah metode untuk mengukur bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP (United Nation Development Programme) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala. IPM dibentuk dengan 3 dimensi dasar, antara lain:

- a. Usia yang panjang dan hidup sehat;
- b. Pengetahuan;
- c. Standar hidup layak.

Manfaat IPM ada beberapa, yaitu menjadi sebuah tolok ukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia, menentukan level pembangunan dari sebuah negara, dan sebuah tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah serta alokator penentuan DAU (Dana Alokasi Umum). Berikut adalah IPM Kota Yogyakarta dari tahun 2020 hingga 2022 berdasarkan jenis kelamin.

[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia			
Jenis Kelamin	2020	2021	2022
Laki-laki	87.29	87.72	88.14
Perempuan	85.68	86.25	86.80
L+P	86.61	87.18	87.69

Tabel 2.6. IPM Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022

Sumber: Data Dasar Siga DIY

Tabel IPM diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan terjadi peningkatan yang konstan di Kota Yogyakarta dari kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kota Yogyakarta pada kurun 2020 sampai dengan 2022 telah mempengaruhi peningkatan kualitas hidup dari penduduknya. Begitu pula dengan IPM penduduk perempuan Kota Yogyakarta yang meskipun lebih kecil dari dari segi angka, namun pertambahan setiap tahunnya lebih banyak dari IPM penduduk laki-laki Kota Yogyakarta. Selaras dengan bertumbuhnya pula Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Yogyakarta, yang berarti menunjukkan bahwa program pembangunan untuk penduduk perempuan di Kota Yogyakarta sudah menunjukkan peningkatan.

6. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Yogyakarta

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang menggambarkan rasio capaian antara Indeks Pembangunan Manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Bila angka yang dicapai mulai mendekati angka 100, maka hal ini menunjukkan bahwa semakin setaranya pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Namun bila angka tersebut semakin jauh dari angka 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Angka 100 merupakan indikator paling sempurna yang menunjukkan seimbangny capaian pembangunan laki-laki dan perempuan.

[IPG] Indeks Pembangunan Gender (%)			
2019	2020	2021	2022
98.09	98.16	98.32	98.48

Tabel 2.7. IPG Kota Yogyakarta Periode Tahun 2018-2020

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, Tanggal Akses 6 Februari 2023

Tabel Indeks Pembangunan Gender Kota Yogyakarta diatas yang menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang baik. Dimana Kota Yogyakarta sudah semakin mendekati angka 100, menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Kota Yogyakarta nyaris sempurna. Capaian ini perlu didorong dengan pemberian kesempatan seluasnya baik kepada laki-laki maupun perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Yogyakarta

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi jumlah laki-laki dan perempuan dalam keterwakilan di parlemen, partisipasi ekonomi, dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 indikator, yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manajer serta persentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

[IDG] Indeks Pemberdayaan Gender		
2019	2020	2021
71.06	71.05	73.18

Tabel 2.8. IDG Kota Yogyakarta Tahun 2019-2021

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, Tanggal Akses 6 Februari 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya, dimana justru terjadi penurunan indeks di tahun 2020. Peningkatan angka IPG ini menunjukkan bahwa jumlah partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan maupun manajerial semakin setara di Kota Yogyakarta ini. Hal ini tentunya membutuhkan dorongan lebih lanjut lagi dari seluruh masyarakat untuk kesetaraan partisipasi politik dan pengambilan keputusan antara laki-laki dan perempuan.

B. Gender dalam Kesehatan

1. Angka Harapan Hidup Penduduk Kota Yogyakarta

Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir, AHH ini mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup pada umumnya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya.

Jenis Kelamin	[AHH] Angka Harapan Hidup			
	2019	2020	2021	2022
Laki-laki	72.67	72.78	72.92	72.95
Perempuan	76.35	76.37	76.40	76.42
L + P	74.56	74.65	74.76	74.83

Tabel 2.9. Angka Harapan Hidup di Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin Periode 2019-2022

Sumber : Data Dasar, Sistem Informasi Gender dan Anak, DP3AP2 DIY

Tabel diatas menunjukkan Angka Harapan Hidup di Kota Yogyakarta pada kurun 2019 – 2021. Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Angka Harapan Hidup, peningkatan ini dipengaruhi oleh hidup yang lebih baik, pencegahan serta perawatan ibu hamil dengan risiko tinggi, meningkatnya pendidikan, dan pendapatan per kapita. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun 2022 Angka Harapan Hidup Kota Yogyakarta secara keseluruhan adalah 74.83 atau meningkat 0.07. Peningkatan yang secara konsisten terjadi merupakan indikasi hasil pembangunan multi sektor yang positif.

2. Jumlah Kematian Ibu, Bayi Lahir Kota Yogyakarta

Kematian ibu menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan, atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait

dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penangannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera. Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator keberhasilan upaya kesehatan ibu dan derajat kesehatan masyarakat. Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan resiko yang dihadapi ibu hamil selama kehamilan dan melahirkan. AKI dipengaruhi oleh status gizi, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan menjelang kehamilan, kejadian komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, ketersediaan dan akses fasilitas pelayanan kesehatan.

Jumlah Kematian Ibu, Bayi Lahir		
2020	2021	2022
2	16	4

Tabel 2.10. Jumlah kematian Ibu, Bayi Lahir Kota Yogyakarta Periode 2020-2022

Sumber: Denominator Data Riil, kesgadiy.wed.id

Tabel diatas menunjukkan angka kematian ibu pada Tahun 2022 menurun 75% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan terutama dalam kondisi kesehatan ibu, baik dari segi pencegahan maupun penanganannya.

3. Ibu Hamil yang Berisiko Tinggi Kota Yogyakarta

Ibu Hamil Risiko Tinggi (Bumil Risti) atau *High Risk Pregnant Women* menurut Kementerian Kesehatan RI adalah Ibu hamil yang saat melahirkan menghadapi kemungkinan membahayakan, misalnya usia terlalu muda/tua, ibu dengan riwayat kelainan kehamilan dan persalinan. Risiko yang dihadapi tidak hanya sebatas hal yang bisa terjadi pada sang ibu hamil, melainkan juga pada janin yang masih ada di dalam kandungannya, bahkan keduanya sekaligus. Berikut sebaran Bumil Risti di puskesmas se Kota Yogyakarta.

Puskesmas	2020	2021	2022
Danurejan I	17	13	13
Danurejan II	11	14	9
Gondokusuman I	46	54	50
Gondokusuman II	17	10	12
Gondomanan	29	20	21
Gedongtengen	18	23	21
Jetis	55	42	43
Kotagede I	47	39	33
Kotagede II	28	34	29
Kraton	24	21	21
Mergangsan	50	40	42
Mantrijeron	57	53	50

Ngampilan	31	27	21
Pakualaman	16	13	14
Tegalrejo	60	64	61
Umbulharjo I	98	96	89
Umbulharjo II	27	25	33
Wirobrajan	46	42	41
Total	677	630	603

Tabel 2.11. Jumlah Ibu Hamil Risiko Tinggi Per Puskesmas Kota Yogyakarta, Periode 2020-2022

Sumber: Denominator Data Riil, kesgadiy.wed.id

Dilihat dari tabel diatas, dari Tahun 2020 ke 2022 berturut turut mengalami penurunan. Akan tetapi hal ini tetap harus menjadi pekerjaan bersama untuk terus menekan angka Bumil Risti diatas, sekaligus dampak yang dapat ditimbulkannya.

Dampak dari kehamilan risiko tinggi dapat dicegah melalui pemeriksaan kehamilan (*antenatal care*) secara teratur yang bertujuan untuk menjaga ibu agar sehat selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas serta mengusahakan bayi yang dilahirkan sehat, memantau kemungkinan adanya risiko kehamilan, dan merencanakan penatalaksanaan yang optimal terhadap kehamilan risiko tinggi serta menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. Pelayanan antenatal dapat mendeteksi dan menangani kasus risiko tinggi secara memadai, pertolongan persalinan yang bersih dan aman, serta pelayanan rujukan kebidanan/perinatal yang terjangkau. Pentingnya *Antenatal Care* terpadu dalam pemeriksaan ibu hamil resiko tinggi diharapkan dapat dilakukan sesuai standar minimal asuhan antenatal yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan menyeluruh sehingga mampu mendeteksi dan menangani risiko tinggi pada ibu hamil.

4. Jumlah Kematian Neonatal Kota Yogyakarta

Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/Neonatal Death Rate) merupakan kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari. Masa neonatal sendiri dapat dibedakan lagi menjadi neonatal dini (0-6 hari) dan neonatal lanjut (7-28 hari). Berikut adalah jumlah kematian neonatal dalam kurun tahun 2020-2022 di Kota Yogyakarta.

Tahun	2020		2021		2022	
	L	P	L	P	L	P
0-6 Hari	8	5	5	6	6	5
7-28 Hari	5	6	4	5	3	5

Tabel 2.12. Jumlah Kematian Neonatal Kota Yogyakarta, Periode 2020-2022

Sumber: Denominator Data Riil, kesgadiy.wed.id

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari tahun 2020 sampai 2022 jumlah kematian neonatal cenderung menurun meski belum stabil dan signifikan. Bahkan Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan kematian neonatal tertinggi di dunia (Unicef, 2014). Kematian neonatal di Indonesia merupakan 59% dari seluruh kejadian kematian bayi di bawah 1 tahun. Tidak jauh berbeda, berdasar data dari Dinas Kesehatan DIY, menunjukkan bahwa jumlah kematian neonatal tahun 2017 adalah sebesar 68% dari seluruh kematian balita. Dan bahkan dari seluruh kasus kematian pada masa neonatal tersebut, 76% diantaranya terjadi pada usia satu minggu pertama kelahiran.

Masa neonatal, terutama saat lahir dan neonatal dini, adalah masa yang rentan dan mudah terjadi komplikasi. Penyebab umum kematian bayi dan neonatal di DIY adalah asfiksia pada saat lahir karena lama di jalan kelahiran, letak melintang, serta panggul sempit. Selain itu, penyebab lain kematian bayi yang sering dijumpai di DIY dikarenakan oleh kelainan bawaan (Dinkes DIY). Oleh karena itu perlu adanya intervensi, bahkan sejak pra kehamilan ditambah dengan pemeriksaan *Antenatal Care (ANC)* yang intensif pada masa kehamilan. Selain menanggulangi permasalahan kematian neonatal, monitoring kesehatan sejak dini juga dapat mencegah stunting, risiko penyakit tidak menular dan gangguan metabolik lainnya.

5. Jumlah Kematian Post Neonatal Kota Yogyakarta

Kematian Post Neonatal merupakan kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun (29 Hari-11 Bulan). Berikut adalah jumlah kematian post neonatal dalam kurun waktu Tahun 2020-2022 di Kota Yogyakarta.

Jenis Kelamin	2020	2021	2022
Laki-laki	5	5	5
Perempuan	6	5	3

Tabel 2.13. Jumlah Kematian Post Neonatal Kota Yogyakarta Menurut jenis Kelamin, Periode 2020-2022

Sumber: Denominator Data Riil, kesgadiy.wed.id

Terlihat dari tabel diatas bahwa jumlah kematian post neonatal dari tahun 2020-2022 konsisten menurun meskipun tidak dalam jumlah yang signifikan. Jika kematian neonatal lebih banyak disebabkan oleh kondisi sewaktu masih di dalam kandungan, maka kematian post neonatal lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Upaya pencegahan kematian post neonatal ini perlu dilakukan, terutama dengan menjaga kebersihan dan kondusifitas lingkungan sekitar anak.

6. Jumlah Kematian Anak Balita Kota Yogyakarta

Kematian Balita adalah Jumlah kematian anak yang berumur berusia 0-<5 tahun (0-59 bulan) selama satu tahun tertentu. Berikut adalah jumlah kematian anak balita usia 12-59 Bulan dalam kurun waktu Tahun 2020-2022 di Kota Yogyakarta.

Jenis Kelamin	2020	2021	2022
Laki-laki	3	2	1
Perempuan	3	1	2

Tabel 2.14. Jumlah Kematian Anak Balita Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin, Periode 2020-2022

Sumber: *Denominator Data Riil, kesgadiy.wed.id*

Dari tabel diatas, tidak ada perubahan (penurunan) signifikan dari tahun 2020 hingga 2022. Kendati demikian Kota Yogyakarta menjadi yang terendah kasus kematian Balita se-DIY. Hal tersebut didukung oleh adanya fasilitas kesehatan yang memadai dan terjangkau.

7. Penderita HIV&AIDS Kota Yogyakarta

Infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* AIDS juga masih menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) terpantau fluktuatif dari tahun ke tahun, sebagaimana terlihat dari tabel dibawah ini.

		2020	2021	2022
AIDS	Laki-laki	198	318	204
	Perempuan	91	121	95
	Tdk Diketahui	2	1	2
	Jumlah	291	440	301
HIV	Laki-laki	968	1.078	1.053
	Perempuan	407	383	435
	Tdk Diketahui	17	25	17
	Jumlah	1.392	1.486	1.505

Tabel 2.15. Jumlah Penderita HIV&AIDS Kota Yogyakarta Menurut jenis Kelamin, Periode 2020-2022

Sumber: *Dinkes DIY, Data Dasar siga.jogjaprovo.go.id*

Jumlah kasus HIV AIDS di Kota Yogyakarta kumulatif di Tahun 2022 sebanyak 1.806 kasus. Sebanyak 301 diantaranya kasus AIDS. Untuk kasus HIV dari tahun ke

tahun terus bertambah. Penemuan kasus baru di tahun 2022 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kasus HIV dan AIDS lebih banyak terjadi pada laki – laki. Kasus HIV tertinggi ditemukan pada kelompok usia produktif yaitu usia 20 – 29 tahun. Persebaran Kasus HIV menurut faktor resiko lebih banyak pada heteroseksual (Profil Dinas Kesehatan DIY 2021).

Kebijakan Pencegahan dan pengendalian HIV AIDS diatur dalam perundang – undangan yaitu :

- a. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di DIY
- b. Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS
- c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 206 Tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS
- d. Strategi Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV AIDS Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2020

Dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS tentu terdapat kendala yang dihadapi. Beberapa diantaranya dikarenakan oleh adanya stigma bagi penderita HIV AIDS, masih lebih percaya pada pengobatan alternatif, kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat terkait dengan HIV AIDS. Oleh karenanya intervensi program pencegahan dan pengendalian HIV AIDS yang dilakukan sebaiknya dilakukan secara luas dan komprehensif untuk mengatasi stigma dan kurangnya edukasi bagi masyarakat.

8. Persentase Perempuan Usia 10 Tahun Keatas Menurut Usia Perkawinan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia legal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Pemberian batas usia ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan terlaksananya tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

KELOMPOK USIA (TAHUN)	TAHUN			
	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
<16	4.94	4.28	4.94	4.26
17-18	8.88	10.50	7.57	9.06
19-24	51.99	47.98	20.26	46.88

≥25	34.19	37.24	67.23	39.80
-----	-------	-------	-------	-------

Tabel 2.16. Persentase Perempuan Usia 10 Tahun Keatas Menurut Usia Perkawinan, Periode 2019-2022

Sumber: BPS, Data Dasar siga.jogjapro.go.id

Dari tabel diatas terlihat terdapat penurunan persentase pada kelompok usia <16 tahun dari tahun 2021 sebesar 0.68%. Begitu pula pada kelompok usia ≥25 yang mengalami penurunan signifikan yaitu sebesar 27.43%. Akan tetapi terjadi kenaikan pada pada kelompok usia 17-18 tahun dan 19-24 tahun.

9. Jumlah dan Persentase Wanita Usia Subur (WUS) Menurut Usia Perkawinan Kota Yogyakarta

Menurut BKKBN Wanita Usia Subur (WUS) Adalah wanita yang berumur 15-49 tahun baik yang berstatus kawin maupun yang belum kawin atau janda. Berikut adalah sebaran WUS berstatus kawin/pernah kawin di setiap kemantren.

Kemantren	Jumlah WUS Berstatus Kawin/Pernah kawin	<20 Tahun		≥20 Tahun	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Tegalrejo	4.182	601	14.37	3.581	85.63
Jetis	2.450	395	16.12	2.055	83.88
Gondokusuman	3.569	439	12.30	3.130	87.70
Danurejan	1.854	269	12.51	1.585	85.49
Gedongtengen	1.588	279	17.57	1.309	82.43
Ngampilan	1.677	230	13.71	1.447	86.29
Wirobrajan	2.783	384	13.80	2.399	86.20
Mantrijeron	3.796	487	12.83	3.309	87.17
Kraton	1.734	180	10.38	1.554	89.62
Gondomanan	1.400	203	14.50	1.197	85.50
Pakualaman	961	120	12.49	841	87.51
Mergangsan	3.241	456	14.07	2.785	85.93
Umbulharjo	8.125	964	11.86	7.161	88.14
Kotagede	4.418	543	12.29	3.875	87.71
Jumlah	41.778	5,550	13.28	36.228	86.72

Tabel 2.17. Jumlah dan Persentase Wanita Usia Subur (WUS) Menurut Usia Perkawinan Kota Yogyakarta Per Kemantren Tahun 2022

Sumber: portal.pk21.bkkbn.go.id

Di tabel diatas terlihat bahwa 13.28% WUS menikah di usia <20 tahun, dimana persentase paling banyak berada di Kemantren Gedongtengen. Usia WUS yang baik

untuk kehamilan berkisar 20-35 tahun. Pada usia tersebut alat reproduksi wanita telah berkembang dan berfungsi secara maksimal, begitu juga faktor kejiwaannya sehingga mengurangi berbagai risiko ketika hamil. Wanita Usia Subur (WUS) yang umurnya berkisar antara 20-35 tahun organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik dan sempurna. Puncak kesuburan ada pada rentang usia 20-29 tahun. Wanita dalam rentang usia ini memiliki kesempatan 95% untuk hamil, namun persentasenya menurun menjadi 90% pada usia 30- an tahun. Sedangkan saat memasuki usia 40 tahun, kesempatan hamil berkurang hingga menjadi 40%. Setelah usia 40 tahun, wanita mengalami penurunan sistem reproduksi secara fungsional menjadi 10% (WHO, 2009).

Risiko yang dapat ditimbulkan dari kehamilan WUS usia <20 tahun dan >40 tahun telah disikapi oleh pemerintah melalui kebijakan pendewasaan usia pernikahan, bimbingan calon pengantin dan program KB (Keluarga Berkualitas). Akan tetapi, dengan masih banyaknya angka pernikahan usia dini dan *unmetneed* di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan belum efektif dan masih perlu ditingkatkan lagi.

10. Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

a. Jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelamin

Berikut adalah sebaran penyandang disabilitas per kemandren berdasarkan jenis kelamin yang telah didata oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2022.

Kemandren	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tegalrejo	153	111	264
Jetis	132	109	241
Gondokusuman	133	110	243
Danurejan	76	57	133
Gedongtengen	97	75	172
Ngampilan	98	57	155
Wirobrajan	160	145	305
Mantrijeron	117	87	204

Kraton	99	84	183
Gondomanan	73	71	144
Pakualaman	64	57	121
Mergangsan	108	91	199
Umbulharjo	292	244	536
Kotagede	114	89	203
Jumlah	1716	1387	3103

Tabel 2.18. Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Sumber : Dinsos hasil Pendataan

- b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelainan Fisik dan Mental, Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2022

Berikut adalah sebaran penyandang disabilitas per kemantren berdasarkan jenis disabilitas dan jenis kelamin Tahun 2022 yang dihimpun dari data pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta.

Kemantren	Cacat Fisik		Cacat Netra/Buta		Cacat Rungu/Wicara		Cacat Mental/Jiwa		Cacat Fisik dan Mental		Cacat Lainnya		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Tegalrejo	438	465	8	5	6	8	17	14	5	6	9	8	483	506
Jetis	316	355	5	8	12	10	7	3	0	0	12	16	352	392
Gondokusuman	615	664	6	6	13	7	13	13	8	3	19	22	674	715
Danurejan	250	232	2	0	7	11	7	2	1	0	12	9	279	254
Gedongtengen	198	216	4	5	10	8	6	7	3	0	10	5	231	241
Ngampilan	193	175	3	2	7	2	9	6	0	1	12	4	224	190
Wirobrajan	377	400	10	4	10	15	10	13	3	0	15	9	425	441
Mantrijeron	398	421	8	9	5	16	8	12	3	3	13	7	435	468
Kraton	209	238	2	2	11	6	6	5	2	1	5	10	235	262
Gondomanan	172	206	2	2	8	10	7	6	1	3	12	13	202	240
Pakualaman	118	125	2	2	2	3	3	0	2	2	3	4	130	136
Mergangsan	335	349	5	2	17	9	11	7	2	2	17	17	387	386
Umbulharjo	875	931	14	11	20	16	23	18	10	4	16	16	958	996
Kotagede	459	516	12	5	13	10	15	6	4	2	15	16	518	555

Jumlah	495														
	3	5293	83	63	141	131	142	112	44	27	170	156	5533	5782	

Tabel 2.19. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelainan Fisik dan Mental Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Sumber : Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ditegaskan bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas berhak memperoleh:

- a. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- b. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.
- c. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya
- d. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya.
- e. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- f. Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dari aturan yang ada, dengan tegas telah diatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Sehingga menjadi PR bersama, terutama Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkannya dan membuktikan bahwa Kota Yogyakarta adalah kota yang inklusif dan tidak diskriminatif kepada setiap warganya.

11. Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Kota Yogyakarta

Menurut WHO status gizi adalah salah satu tolok ukur perkembangan anak yang digunakan untuk menentukan asupan gizi yang diperlukan. Setiap anak memiliki status gizi yang berbeda, tergantung jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, dan lingkaran kepala dengan mengecek langsung melalui posyandu ataupun dokter anak. WHO – NCHS (*National Center for Health Statistics*) membagi status gizi dibagi menjadi empat : Pertama, Gizi Lebih untuk *over weight*. Kedua, Gizi Baik untuk *well nourished*. Ketiga, Gizi Kurang untuk *underweight*. Keempat, Gizi Buruk.

Masalah gizi di Indonesia yang terbanyak adalah gizi kurang. Anak balita (0-5 tahun) merupakan kelompok umur yang paling sering menderita akibat kekurangan gizi atau termasuk salah satu kelompok masyarakat yang rentan gizi. Anak usia 12-23 bulan merupakan anak yang masuk dalam kategori usia 6–24 bulan dimana kelompok umur tersebut merupakan saat periode pertumbuhan kritis dan kegagalan tumbuh (*growth failure*) mulai terlihat. Gangguan ini bisa disebabkan karena bayi kekurangan energi dan zat-zat gizi yang dibutuhkan sesuai usianya. Berikut adalah sebaran jumlah

balita gizi buruk dan gizi kurang per kemantren dan kelurahan di Kota Yogyakarta tahun 2022.

Kemantren	Kelurahan	Jumlah Balita		Jumlah Balita yang Ditimbang dan Diukur		Gizi Buruk		Gizi Kurang	
		L	P	L	P	L	P	L	P
Tegalrejo	Kricak	339	276	264	203	4	2	36	14
	Karangwaru	227	174	178	126	1	2	6	8
	Tegalrejo	191	174	137	136	1	1	15	7
	Bener	164	144	100	86	2	1	16	4
Jetis	Bumijo	202	182	188	165	5	1	19	15
	Gowongan	127	95	117	83	2	2	14	7
	Cokrodingratan	127	164	89	118	0	0	5	14
Gondokusuman I	Baciro	216	187	139	120	4	2	22	10
	Demangan	124	111	88	62	0	1	9	5
	Klitren	142	142	89	88	2	1	8	11
Gondokusuman II	Kotabaru	49	40	42	37	0	0	5	3
	Terban	120	137	103	117	4	2	14	10
Danurejan I	Tegalpanggung	192	147	172	127	2	0	16	12
Danurejan II	Suryatmajan	71	76	48	52	0	1	5	3
	Bausasran	110	80	96	68	1	2	5	7
Gedongtengen	Pringgokusuman	228	209	173	182	3	3	16	18
	Sosromenduran	111	91	98	79	4	3	5	4
Ngampilan	Notoprajan	171	144	139	118	1	3	16	20
	Ngampilan	184	153	130	91	6	1	5	6
Wirobrajan	Patangpuluhan	137	129	105	96	1	1	7	6
	Wirobrajan	153	140	115	111	2	1	5	8
	Pakuncen	206	178	146	150	2	4	17	13
Mantrijeron	Gedongkiwo	252	197	151	113	7	2	15	14
	Suryodiningratan	249	220	166	123	2	1	18	5
	Mantrijeron	192	172	135	130	1	3	17	8
Kraton	Patehan	100	78	86	69	1	0	7	7

	Panembahan	118	98	97	76	2	1	3	4
	Kadipaten	125	97	99	84	2	1	4	8
Gondomanan	Prawirodirjan	208	180	174	155	1	0	19	13
	Ngupasan	87	80	62	63	0	0	4	7
Pakualaman	Purwokinanti	121	98	93	72	0	0	6	5
	Gunungketur	89	64	74	55	0	0	7	1
Mergangsan	Brontokusuman	205	158	167	118	2	1	18	7
	Keparakan	157	130	127	115	3	3	11	6
	Wirogunan	256	223	190	179	4	3	13	11
Umbulharjo I	Giwangan	225	203	145	122	2	8	24	6
	Sorosutan	363	320	183	173	6	6	24	14
	Pandeyan	249	263	158	179	7	1	20	22
	Warungboto	160	153	124	108	3	0	6	9
Umbulharjo II	Tahunan	195	181	161	146	6	1	24	13
	Muja Muju	184	172	139	144	2	1	13	15
	Semaki	100	91	82	77	2	0	3	4
Kotagede I	Prenggan	285	244	186	188	2	2	26	18
	Purbayan	259	245	222	210	3	1	24	17
Kotagede II	Rejowinangun	328	283	195	194	1	2	11	11
Jumlah		8098	7123	5972	5308	106	71	583	430

Tabel 2.20. Jumlah Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Kota Yogyakarta Menurut Kemantren, Kelurahan dan Jenis Kelamin Tahun 2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Terdapat banyak faktor yang berpengaruh pada masalah gizi balita, langsung maupun tidak langsung. Masalah gizi bukanlah masalah yang hanya disebabkan oleh kemiskinan. Melainkan juga karena aspek sosial-budaya (kepercayaan, pendidikan, dan pekerjaan) yang ada di masyarakat kita, sehingga menyebabkan tindakan yang tidak menunjang tercapainya gizi yang memadai untuk balita. Keadaan sosial ekonomi suatu keluarga sangat mempengaruhi tercukupi atau tidaknya kebutuhan primer, sekunder, serta perhatian dan kasih sayang yang akan diperoleh anak. Hal tersebut tentu berkaitan erat dengan pendapatan keluarga, jumlah saudara dan pendidikan orang tua.

Pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari rumah tangga, karena rumah tangga yang sehat merupakan aset pembangunan di masa depan yang perlu dijaga, ditingkatkan dan dilindungi. Lingkungan yang tidak sehat dapat menjadikan balita

rawan terkena penyakit infeksi, dan Infeksi dapat menyebabkan kurang gizi atau sebaliknya.

12. Jumlah *Surviving Infant* (bayi usia 0-11 bulan) dan Baduta yang telah Diimunisasi Dasar Lengkap Kota Yogyakarta

Menurut pemaparan data dari Kementerian Kesehatan RI, selama pandemi COVID-19, cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi turun drastis sehingga terjadi kesenjangan imunitas. Jika kesenjangan imunitas ini tidak segera dikejar maka akan terjadi peningkatan kasus dan kejadian luar biasa (KLB) yang akan menjadi beban ganda di tengah pandemi. Seperti halnya dengan polio, yang pada tahun 2022 ditetapkan sebagai KLB di Indonesia.

Imunisasi menjadi upaya paling penting dalam menciptakan kekebalan anak. Sebab, jika anak tidak diberikan imunisasi wajib dapat berisiko menyebabkan mudah tertular penyakit berbahaya karena tidak adanya kekebalan terhadap penyakit tersebut. Berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), imunisasi mampu mencegah 2-3 juta kematian anak setiap tahun. Pemberian imunisasi pada anak sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Berikut adalah sebaran *surviving infant* dan baduta yang telah diimunisasi dasar lengkap per kemantren di Kota Yogyakarta.

Kemantren	Kelurahan	Surviving Infant		Imunisasi Dasar Lengkap		Baduta		Baduta Lengkap	
		L	P	L	P	L	P	L	P
Tegalrejo	Kricak	63	58	62	55	57	41	51	37
	Karangwaru	34	42	32	41	33	25	30	20
	Tegalrejo	22	29	21	28	30	39	27	35
	Bener	28	25	27	24	27	23	24	20
Jetis	Bumijo	37	39	35	39	50	36	47	35
	Gowongan	28	21	27	20	26	33	22	31
	Cokrodiningratan	34	25	32	25	20	16	14	13
Gondokusuman I	Baciro	44	31	42	31	28	27	25	24
	Demangan	16	22	16	21	23	26	21	20
	Klitren	27	25	27	24	21	30	20	24
Gondokusuman II	Kotabaru	6	2	6	2	10	11	7	6

	Terban	16	22	16	22	30	37	23	26
Danurejan I	Tegalpanggung	26	26	26	24	34	21	28	17
Danurejan II	Suryatmajan	12	17	9	17	15	13	15	11
	Bausasaran	17	13	15	14	14	21	13	21
Gedongtengen	Pringgokusuman	25	21	23	20	37	34	32	31
	Sosromenduran	12	15	12	15	26	8	23	8
Ngampilan	Notoprajan	19	33	17	33	34	50	32	45
	Ngampilan	23	32	22	31	26	37	25	32
Wirobrajan	Patangpuluhan	38	27	26	37	41	35	34	30
	Wirobrajan	47	28	28	44	39	40	30	36
	Pakuncen	30	25	25	28	38	44	31	40
Mantrijeron	Gedongkiwo	82	65	79	63	71	58	63	54
	Suryodiningratan	60	39	59	37	63	39	51	38
	Mantrijeron	57	41	55	39	59	51	50	44
Kraton	Patehan	8	22	8	22	28	14	26	14
	Panembahan	20	24	18	24	19	17	14	16
	Kadipaten	13	16	12	16	12	8	12	8
Gondomanan	Prawirodirjan	32	35	32	32	42	43	32	36
	Ngupasan	19	13	18	13	14	19	10	16
Pakualaman	Purwokinanti	17	18	17	17	17	26	17	24
	Gunungketur	12	11	12	11	21	8	20	8
Mergangsan	Brontokusuman	41	35	38	33	22	27	18	17
	Keparakan	28	27	26	28	54	33	29	17
	Wirogunan	35	35	33	33	34	33	22	20
Umbulharjo I	Warungboto	31	22	30	21	27	29	21	22
	Pandeyan	56	53	54	50	47	57	37	48
	Sorosutan	78	58	74	55	55	62	44	55
	Giwangan	33	31	33	31	29	25	27	24
Umbulharjo II	Semaki	15	13	15	12	15	12	13	12
	Muja Muju	29	15	28	15	32	23	31	22
	Tahunan	19	21	17	20	24	23	21	20
Kotagede I	Prenggan	49	45	49	44	60	40	56	38

	Purbayan	54	47	51	46	48	36	41	33
Kotagede II	Rejowinangun	65	71	63	70	55	65	50	56
Jumlah		1457	1335	1367	1327	1507	1395	1279	1204

Tabel 2.21. Jumlah *Surviving Infant* dan Baduta yang telah Diimunisasi Dasar Lengkap di Kota Yogyakarta Menurut Kemantren, Kelurahan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

13. Jumlah Puskesmas Ramah Anak (PRA) Kota Yogyakarta

Diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak harus dilindungi sehingga mereka mampu tumbuh sehat, cerdas, dan bermental baik. Selain aturan perundangan tersebut, juga terdapat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan tersebut secara umum menjelaskan bahwa anak-anak memiliki hak terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah Kota/Kabupaten.

Pelayanan yang diberikan diarahkan juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak (KHA). Upaya-upaya tersebut yang kemudian digagas dalam suatu program kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Pada bidang kesehatan pemerintah Kota Yogyakarta juga intensif untuk melaksanakan program kesehatan ramah anak, terutama pada taraf fasilitas tingkat 1 (Puskesmas). Puskesmas yang memberikan pelayanan yang ramah anak akan menjadi salah satu daya ungkit untuk mewujudkan KLA. Dimana beberapa indikatornya adalah terdapat dokter dan psikolog anak, pegawai Puskesmas yang memahami Konvensi Hak Anak (KHA), ruang tunggu yang ramah anak, dan fasilitas gedung yang ramah terhadap anak. Hal tersebut sudah membuahkan hasil dimana sejak tahun 2017 hingga saat ini seluruh Puskesmas (18 Puskesmas) yang ada di Kota Yogyakarta berhasil menyandang predikat ramah anak, dengan sebarannya sebagai berikut.

NAMA PUSKESMAS	KEMANTREN
PUSKESMAS TEGALREJO	TEGALREJO
PUSKESMAS JETIS	JETIS
PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I	GONDOKUSUMAN
PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II	GONDOKUSUMAN
PUSKESMAS DANUREJAN I	DANUREJAN
PUSKESMAS DANUREJAN II	DANUREJAN
PUSKESMAS GEDONGTENGAN	GEDONGTENGAN
PUSKESMAS NGAMPILAN	NGAMPILAN

PUSKESMAS WIROBRAJAN	WIROBRAJAN
PUSKESMAS MANTRIJERON	MANTRIJERON
PUSKESMAS KRATON	KRATON
PUSKESMAS GONDOMANAN	GONDOMANAN
PUSKESMAS PAKUALAMAN	PAKUALAMAN
PUSKESMAS MERGANGSAN	MERGANGSAN
PUSKESMAS UMBULHARJO I	UMBULHARJO
PUSKESMAS UMBULHARJO II	UMBULHARJO
PUSKESMAS KOTAGEDE I	KOTAGEDE
PUSKESMAS KOTAGEDE II	KOTAGEDE

Tabel 2.22. Puskesmas Ramah Anak di Kota Yogyakarta Menurut Kemantren Tahun 2022
Sumber: Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Yogyakarta

C. Gender Dalam Pendidikan

1. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kota Yogyakarta

Dalam upaya menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dimana Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 pasal 12 ayat 3 Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengupayakan agar setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar 9 tahun. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai Kota Pendidikan tidak lepas dari banyaknya institusi pendidikan di Kota Yogyakarta. Selain itu angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah penduduk Kota Yogyakarta yang melebihi rata-rata nasional. dan tertinggi di Provinsi DIY. Dibawah ini adalah jenjang pendidikan penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2022.

Kemantren	Tdk/Blm Sekolah		Blm Tamat SD		SD/ Sederajat		SLTP/ Sederajat		SLTA/ Sederajat		Diploma I-III		Diploma IV/Strata-I		Strata-II		Strata-III		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Tegalrejo	3016	3101	2094	2515	1564	1863	2447	2485	5467	5305	742	1115	2441	2528	326	255	58	17	18155	19184
Jetis	2238	2287	1317	1292	1278	1702	1631	1779	4215	4384	512	761	1638	1688	174	146	22	11	13025	14050
Gondokusuman	3612	3592	2028	2193	1477	1893	2243	2516	5796	6106	1194	1694	3635	3794	561	475	92	51	20638	22314
Danurejan	1669	1616	1084	1112	822	1038	1318	1448	3405	3447	423	612	1438	1449	155	144	26	8	10340	10874
Gedongtengen	1451	1461	1034	1005	1044	1230	1404	1475	3028	3110	381	485	971	1003	92	101	12	8	9417	9878
Ngampilan	1424	1448	926	900	726	937	1144	1239	2846	2761	370	522	1272	1344	130	132	17	8	8855	9291
Wirobrajan	2409	2385	1612	1716	1074	1208	1710	1818	3864	3977	599	858	2075	2188	254	208	30	21	13627	14379
Mantrijeron	3062	3080	1612	1649	1461	1733	2007	2213	5134	5243	771	1164	2714	2878	311	307	29	26	17101	18293
Kraton	1648	1625	916	906	731	981	1211	1279	3289	3417	601	859	1833	1858	197	195	22	18	10448	11138
Gondomanan	1157	1209	633	704	692	825	1006	1065	2312	2302	254	409	980	1013	108	77	13	12	7155	7616
Pakualaman	707	679	560	533	342	492	602	695	1669	1802	279	392	774	859	103	76	9	6	5045	5534
Mergangsan	2723	2723	1526	1505	1176	1552	1809	1975	4474	4711	737	1059	2486	2710	286	236	43	18	15260	16489
Umbulharjo	6694	6762	3410	3487	3083	3696	3765	3978	9174	9277	1630	2228	5849	6321	892	758	124	68	34621	36575
Kotagede	3319	3336	1733	1786	1877	2190	2032	1938	4696	4767	720	951	2448	2736	320	257	56	23	17201	17984
Jumlah	35129	35304	20485	21303	17347	21340	24329	25903	59369	60609	9213	13109	30554	32369	3909	3367	553	295	200888	213599

Tabel 2.23. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Sumber: Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Dari tabel diatas terlihat sejumlah 263.579 atau sekitar 64% penduduk Kota Yogyakarta di tahun 2022 telah mendapatkan program wajib belajar 9 tahun, prosentase ini tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Pada jenjang pendidikan tinggi angka partisipasi penduduk perempuan juga sudah mencapai 52%. Angka ini memperlihatkan bahwa akses pendidikan di Kota Yogyakarta sudah merata antara penduduk laki-laki maupun perempuan.

Terlihat pula di tahun 2022 masih terdapat 70.433 atau sekitar 17% penduduk Kota Yogyakarta yang tidak atau belum sekolah. Sedangkan jumlah penduduk usia 0-6 Tahun (pra sekolah dasar) di Kota Yogyakarta tahun 2022 adalah sejumlah 34.654 atau hampir setengah dari penduduk yang belum atau tidak sekolah. Penduduk yang tidak sekolah tentunya berdampak pada tingkat literasi dan penghidupannya. Oleh sebab itu pelaksanaan program kejar paket yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta harapannya dapat ditingkatkan dan menjangkau lebih banyak lagi penduduk yang belum mendapat kesempatan untuk mengenyam bangku sekolah.

2. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Yogyakarta

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS mewakili dimensi pendidikan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu wilayah. Berikut HLS penduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2019 hingga 2022.

Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022
Laki-laki	17.21	17.22	17.46	17.47
Perempuan	17.29	17.46	17.63	14.64
L + P	17.28	17.43	17.60	17.61

Tabel 2.24. Harapan Lama Sekolah Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin, Periode 2019-2022

Sumber: Data Dasar SIGA DIY

Angka HLS Kota Yogyakarta dari tahun 2019 hingga tahun 2022 selalu mengalami kenaikan, akan tetapi kenaikan di tahun 2022 tidak sebanyak dari kenaikan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 0.01. HLS baiknya selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, karena hal tersebut menandakan bahwa

adanya penurunan kemiskinan dan meningkatnya kondisi ekonomi serta hidup layak penduduk. HLS juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Kenaikan angka HLS menandakan bahwa sistem pendidikan di Kota Yogyakarta senantiasa mengalami pembangunan dan perbaikan.

3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Yogyakarta

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Berikut adalah RLS penduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2019 hingga 2022.

Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022
Laki-laki	11.87	11.88	11.91	12.02
Perempuan	10.95	11.03	11.34	11.59
L + P	11.45	11.46	11.72	11.89

Tabel 2.25. Rata-Rata Lama Sekolah Kota Yogyakarta 2019-2022

Sumber: Data Dasar SIGA DIY

RLS penduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2019 hingga 2022 selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Yang menarik adalah penduduk perempuan selalu mengalami kenaikan RLS lebih banyak dari penduduk laki-laki. Dari yang awalnya pada tahun 2019 gap RLS antara laki-laki dan perempuan hampir 1 tahun, namun pada tahun 2022 angka RLS perempuan berhasil mengejar dan sudah hampir sama dengan RLS laki-laki.

D. Gender Dalam Ekonomi dan Ketenagakerjaan

1. Jumlah Kepala Keluarga Kota Yogyakarta

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepala keluarga identik dengan laki-laki yang mencari nafkah dan memenuhi semua kebutuhan hidup anggota keluarganya. Sedangkan dari data yang ada diketahui bahwa peran kepala keluarga tidak hanya dijalankan oleh laki-laki, melainkan juga oleh perempuan. Sebagaimana di Kota Yogyakarta dapat kita lihat sebaran kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut.

Kemantren	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tegalrejo	9350	3228	12578
Jetis	6569	2672	9241
Gondokusuman	10500	4026	14526
Danurejan	5197	2030	7227
Gedongtengen	4685	1968	6653
Ngampilan	4349	1614	5963
Wirobrajan	6922	2428	9350
Mantrijeron	8749	3350	12099
Kraton	5304	2151	7455
Gondomanan	3638	1429	5067
Pakualaman	2560	1167	3727
Mergangsan	7881	2898	10779
Umbulharjo	17904	5508	23412
Kotagede	8826	2576	11402
Jumlah	102434	37045	139479

Tabel 2.26. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sumber : Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Tabel diatas memperlihatkan sebesar 36% kepala keluarga di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 adalah perempuan, angka ini konsisten dari tahun sebelumnya. Lain halnya jika di negara maju, rata-rata perempuan kepala keluarga merupakan perempuan yang mandiri dari segi ekonomi dan karir yang notabene berpendidikan tinggi. Di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Yogyakarta ketika kepala keluarga adalah perempuan maka konteksnya adalah perempuan tersebut memikul tanggung jawab tunggal untuk menghidupi keluarganya, sehingga dia adalah pencari nafkah utama dan juga harus memenuhi semua kebutuhan hidup anggota keluarganya. Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan oleh PEKKA² (Perempuan Kepala Keluarga), secara riil perempuan-perempuan yang menjadi kepala keluarga ini, antara lain: janda yang suaminya meninggal dunia, janda cerai, perempuan yang ditinggal suaminya dalam jangka waktu lama dan tidak diberi nafkah, perempuan lajang dari keluarga yang tidak mampu dan perempuan yang suaminya sedang sakit atau cacat. Para perempuan kepala keluarga ini rata-rata berasal dari keluarga miskin dan berpendidikan rendah.

² <https://pekka.or.id/latar-belakang/>

Berangkat dari hal tersebut, maka perlu adanya kesadaran bahwa perempuan dalam segala kondisi seharusnya tidak memiliki ketergantungan (dependen) terhadap orang lain termasuk keluarganya, terutama dari segi ekonomi dan pendidikan. Intervensi dalam rangka pemberdayaan perempuan juga tidak luput dari hal yang sangat diperlukan. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan, pelatihan wirausaha dan kesempatan bekerja yang terbuka seluas-luasnya bagi perempuan adalah hal-hal yang perlu dijamin oleh pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Jumlah Penduduk Penerima Manfaat Program Keluarga Sasaran Penerima Perlindungan Sosial (KSJPS)

KSJPS merupakan program perlindungan sosial dari Pemkot Yogyakarta untuk membantu keluarga fakir miskin, miskin dan rentan miskin. Berikut adalah sebaran penerima manfaat KSJPS pemutakhiran tahun 2021.

Kemantren	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tegalrejo	Kricak	852	867	1719
	Karangwaru	420	449	869
	Tegalrejo	615	654	1269
	Bener	236	298	534
Jetis	Bumijo	622	711	1333
	Cokrodiningratan	443	509	952
	Gowongan	593	637	1230
Gondokusuman	Demangan	499	523	1022
	Kotabaru	122	129	251
	Klitren	545	602	1147
	Baciro	728	816	1544
Danurejan	Terban	468	493	961
	Suryatmajan	411	413	824
	Tegalpanggung	815	852	1667
Gedongtengen	Bausasran	386	395	781
	Sosromenduran	300	329	629
	Pringgokusuman	702	717	1419

Ngampilan	Ngampilan	371	373	744
	Notoprajan	420	430	850
Wirobrajan	Pakuncen	1404	1456	2860
	Wirobrajan	1056	1083	2139
	Patangpuluhan	778	751	1529
Mantrijeron	Gedongkiwo	1158	1252	2410
	Suryodiningratan	528	574	1102
	Mantrijeron	571	681	1252
Kraton	Patehan	356	399	755
	Panembahan	797	876	1673
	Kadipaten	396	470	866
Gondomanan	Ngupasan	129	154	283
	Prawirodirjan	680	756	1436
Pakualaman	Purwokinanti	220	221	441
	Gunungketur	155	166	321
Mergangsan	Keparakan	1119	1179	2298
	Wirogunan	811	854	1665
	Brontokusuman	696	768	1464
Umbulharjo	Semaki	358	379	737
	Muja Muju	397	449	846
	Tahunan	354	325	679
	Warungboto	353	379	732
	Pandeyan	278	281	559
	Sorosutan	512	540	1052
	Giwangan	244	280	524
Kotagede	Rejowinangun	379	397	776
	Prenggan	151	167	318
	Purbayan	290	369	659

Jumlah	23718	25403	49121
---------------	-------	-------	-------

Tabel 2.27. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Penerima Manfaat Program KSJPS Pemutakhiran Tahun 2022 Menurut Kemantren, Kelurahan dan Jenis kelamin

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Tabel jumlah penerima manfaat KSJPS diatas mengalami kenaikan jumlah dari pendataan sebelumnya sebanyak 342 jiwa. Badan Pusat Statistik merilis Profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2022 yang mencatat bahwa jumlah penduduk miskin masih didominasi oleh mereka yang tinggal di perkotaan. Wilayah Kota Yogyakarta yang seluruhnya merupakan daerah perkotaan dengan kemudahan akses dan perputaran ekonomi yang cepat ternyata tidak menjamin rendahnya tingkat kemiskinan. Terlebih Kota Yogyakarta mengalami dampak yang tidak sedikit selama pandemi Covid-19, terutama pada sektor pariwisata.

Adapun upaya pemerintah pusat dan Kota Yogyakarta dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem membuat kebijakan dan strategi berupa:

- a. Menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin, diantaranya berupa jaminan sosial dan subsidi serta jaminan sosial (jamsos)
- b. Meningkatkan kapasitas dan pendapatan masyarakat miskin, diantaranya berupa pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi lokal serta akses pekerjaan
- c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan UMKM, melalui kegiatan pelatihan, pembinaan, bimbingan, sosialisasi, forum pengembangan serta gelar produk UMKM
- d. Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, berupa dukungan kelembagaan, dukungan fasilitasi koordinasi, dukungan pengelolaan data dan informasi serta dukungan kemitraan

3. Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kota Yogyakarta

Pengertian dari Badan Pusat Statistik (BPS)³ Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan

³ <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>

penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Sebaran penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kota Yogyakarta tahun 2022 dapat kita lihat sebagai berikut.

Kemantren	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Tegalrejo	10050	6077	16127	8105	13107	21212
Jetis	7462	4393	11855	5563	9657	15220
Gondokusuman	11030	7514	18544	9608	14800	24408
Danurejan	5821	3845	9666	4519	7029	11548
Gedongtengen	5440	3170	8610	3977	6708	10685
Ngampilan	5011	3239	8250	3844	6052	9896
Wirobrajan	7498	4984	12482	6129	9395	15524
Mantrijeron	9279	6652	15931	7822	11641	19463
Kraton	5833	4097	9930	4615	7041	11656
Gondomanan	4371	2797	7168	2784	4819	7603
Pakualaman	2864	2008	4872	2181	3526	5707
Mergangsan	8354	5682	14036	6906	10807	17713
Umbulharjo	18542	12676	31218	16079	23899	39978
Kotagede	9178	6657	15835	8023	11327	19350
Jumlah	110733	73791	184524	90155	139808	229963

Tabel 2.28. Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kota Yogyakarta Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022
 Sumber : Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah angkatan kerja laki-laki lebih banyak daripada perempuan, meskipun dari segi jumlah penduduk perempuan di Kota Yogyakarta lebih banyak dari laki-laki. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya perempuan yang mengurus rumah tangga (Ibu Rumah Tangga) dan masuk kedalam kategori bukan angkatan kerja. Bahkan pekerjaan mengurus rumah tangga di Kota Yogyakarta seluruhnya tercatat dilakukan oleh perempuan sebagaimana tabel di bawah ini.

Kemantren	L	P	Jumlah
Tegalrejo	0	5607	5607
Jetis	0	4305	4305
Gondokusuman	0	5825	5825
Danurejan	0	2934	2934

Gedongtengen	0	3105	3105
Ngampilan	0	2442	2442
Wirobrajan	0	3637	3637
Mantrijeron	0	4429	4429
Kraton	0	2817	2817
Gondomanan	0	2192	2192
Pakualaman	0	1473	1473
Mergangsan	0	4374	4374
Umbulharjo	0	9005	9005
Kotagede	0	4049	4049
Jumlah	0	56194	56194

Tabel 2.29. Penduduk Kota Yogyakarta yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga
100% Perempuan

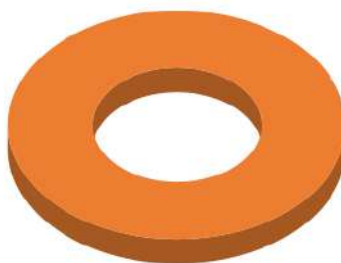


Diagram 2.6. Penduduk Kota Yogyakarta yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

Sumber: Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

4. Pengangguran Kota Yogyakarta

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (BPS Indonesia, 2014). Umumnya penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan lapangan kerja yang tersedia dengan laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2021 BPS DIY mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi se Provinsi DIY ada di Kota Yogyakarta. Adapun jumlah pengangguran yang tercatat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dari tahun 2020 hingga 2022 adalah sebagai berikut.



Diagram 2.7. Jumlah Pengangguran di Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin, Periode 2020-2022

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Diagram diatas menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan jumlah pengangguran di Kota Yogyakarta pada tahun 2021. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pandemi Covid-19. BPS DIY merilis data bahwa terdapat 102,74 ribu orang (3,19 persen) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (3,34 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (7,54 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,88 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (89,98 ribu orang). Lalu pada tahun 2022 jumlah pengangguran di DIY ini menurun cukup signifikan dibandingkan Agustus 2021, turun sebanyak 355,31 ribu orang atau 77,57 persen.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan membuat jaring pengaman Covid-19 terlihat pada penurunan jumlah pengangguran di Tahun 2022 sejumlah 1.913 orang atau 33%. Bahkan tidak seperti tahun tahun sebelumnya, jumlah pengangguran perempuan juga terlihat lebih sedikit dari pengangguran laki-laki. Strategi dan kebijakan berupa pemberdayaan UMKM telah berhasil menyerap banyak tenaga kerja, terutama dari kalangan pengangguran perempuan di Kota Yogyakarta. Adapun sebaran jumlah pengangguran di Kota Yogyakarta di tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Kemantren	L	P	Jumlah
Tegalrejo	101	47	148

Jetis	220	147	367
Gondokusuman	136	144	280
Danurejan	77	69	146
Gedongtengen	164	137	301
Ngampilan	140	66	206
Wirobrajan	177	137	314
Mantrijeron	123	152	275
Kraton	157	124	281
Gondomanan	211	225	436
Pakualaman	51	27	78
Mergangsan	168	172	340
Umbulharjo	223	293	516
Kotagede	74	77	151
Jumlah	2022	1817	3839

Tabel 2.30. Jumlah Pengangguran di Kota Yogyakarta Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Di tahun 2022, pengangguran terbanyak ada di Kemantren Umbulharjo yaitu sebesar 13%, dan paling sedikit ada di Kemantren Pakualaman yaitu sebesar 2%.

E. Gender Dalam Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah menyelesaikan masalah-masalah publik dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Kementerian PPPA RI Kebijakan/Program Responsif Gender merupakan kebijakan/program yang berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses, partisipasi, kontrol dan menerima manfaat pembangunan serta mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.

Penyusunan kebijakan responsif gender dilakukan dengan memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (termasuk lansia, anak2, penyandang disabilitas, kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah). Tujuannya adalah untuk menjawab isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) menjadi dasar bagi pemerintah dalam membuat dasar perencanaan dan penganggaran kebijakan yang responsif gender. Dan berikut ini adalah daftar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kota

Yogyakarta yang telah dan belum menyusun GAP dan GBS dari Tahun 2021 hingga 2023.

No	OPD	2021	2022	2023
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	ada	ada	ada
2	Dinas Kesehatan	ada	ada	ada
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	ada	ada	ada
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	ada	ada	ada
5	Satuan Polisi Pamong Praja	ada	ada	ada
6	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	ada	ada	ada
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	ada	ada	ada
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	ada	ada	ada
9	Dinas Perdagangan	ada	belum ada	belum ada
10	Dinas Pertanian dan Pangan	belum ada	ada	ada
11	Dinas Lingkungan Hidup	ada	ada	ada
12	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	ada	ada	ada
13	Dinas Perhubungan	ada	ada	ada
14	Dinas Kebudayaan	Belum ada	ada	ada
15	Dinas Pariwisata	ada	ada	ada
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	ada	ada	ada
17	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	ada	ada	ada
18	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	ada	ada	ada
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	ada	ada	ada
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	ada	ada	ada
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	ada	ada	ada
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	ada	ada	ada

23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ada	ada	ada
24	Sekretariat DPRD	ada	ada	tidak ada
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	ada	ada	ada
26	Inspektorat	ada	ada	ada
27	RSUD Kota Yogyakarta	Belum ada	Belum ada	Belum ada
28	Kemantren Tegalrejo	ada	ada	ada
29	Kelurahan Karangwaru	ada	Belum ada	Belum ada
30	Kelurahan Kricak	ada	ada	ada
31	Kelurahan Bener	ada	ada	Belum ada
32	Kelurahan Tegalrejo	ada	ada	ada
33	Kemantren Jetis	ada	ada	ada
34	Kelurahan Bumijo	ada	ada	ada
35	Kelurahan Cokrodiningratan	ada	ada	belum ada
36	Kelurahan Gowongan	ada	ada	belum ada
37	Kemantren Gedongtengen	ada	ada	ada
38	Kelurahan Pringgokusuman	ada	ada	ada
39	Kelurahan Sosromenduran	ada	ada	ada
40	Kemantren Gondokusuman	ada	ada	ada
41	Kelurahan Terban	ada	ada	ada
42	Kelurahan Baciro	ada	ada	ada
43	Kelurahan Demangan	ada	ada	ada
44	Kelurahan Klitren	ada	ada	ada
45	Kelurahan Kotabaru	ada	ada	ada
46	Kemantren Danurejan	belum ada	ada	ada
47	Kelurahan Bausasran	ada	ada	belum ada
48	Kelurahan Suryatmajan	belum ada	belum ada	belum ada
49	Kelurahan Tegalpanggung	belum ada	belum ada	belum ada
50	Kemantren Wirobrajan	ada	ada	ada
51	Kelurahan Wirobrajan	ada	ada	ada
52	Kelurahan Patangpuluhan	ada	ada	belum ada

53	Kelurahan Pakuncen	ada	ada	belum ada
54	Kemantren Mantrijeron	ada	ada	ada
55	Kelurahan Mantrijeron	ada	ada	belum ada
56	Kelurahan Suryodiningratan	ada	ada	ada
57	Kelurahan Gedongkiwo	ada	ada	belum ada
58	Kemantren Kraton	ada	ada	ada
59	Kelurahan Panembahan	ada	ada	ada
60	Kelurahan Patehan	ada	ada	belum ada
61	Kelurahan Kadipaten	ada	ada	ada
62	Kemantren Ngampilan	ada	ada	ada
63	Kelurahan Ngampilan	ada	ada	ada
64	Kelurahan Notoprajan	ada	ada	ada
65	Kemantren Gondomanan	ada	ada	ada
66	Kelurahan Ngupasan	ada	ada	ada
67	Kelurahan Prawirodirjan	ada	ada	belum ada
68	Kemantren Pakualaman	belum ada	ada	belum ada
69	Kelurahan Gunungketur	ada	belum ada	belum ada
70	Kelurahan Purwokinanti	belum ada	belum ada	ada
71	Kemantren Mergangsan	belum ada	belum ada	belum ada
72	Kelurahan Keparakan	ada	ada	ada
73	Kelurahan Wirogunan	ada	ada	ada
74	Kelurahan Brontokusuman	ada	ada	ada
75	Kemantren Umbulharjo	ada	ada	ada
76	Kelurahan Semaki	ada	ada	belum ada
77	Kelurahan Muja Muju	belum ada	ada	ada
78	Kelurahan Warungboto	ada	ada	ada
79	Kelurahan Tahunan	ada	ada	ada
80	Kelurahan Pandeyan	ada	ada	ada
81	Kelurahan Sorosutan	ada	belum ada	ada
82	Kelurahan Giwangan	ada	ada	belum ada

83	Kemantren Kotagede	ada	ada	ada
84	Kelurahan Prenggan	ada	ada	ada
85	Kelurahan Rejowinangun	ada	ada	ada
86	Kelurahan Purbayan	ada	ada	ada
87	Sekretariat Daerah	ada	ada	ada
	Bagian Tata Pemerintahan	ada	ada	ada
	Bagian Hukum	ada	ada	ada
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	ada	ada	ada
	Bagian Administrasi Pembangunan	ada	ada	ada
	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	belum ada	ada	ada
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	belum ada	ada	ada
	Bagian Umum dan Protokol	ada	ada	ada
	Bagian Organisasi	ada	ada	ada
	Bagian Administrasi dan Keuangan	belum ada	belum ada	ada
88	Sekretariat DPRD	ada	ada	belum ada
89	Inspektorat	ada	ada	ada
90	Pokja PUG	ada	ada	ada
91	Tim Teknis PUG	ada	ada	ada

Tabel 2.31. OPD di Kota Yogyakarta yang Sudah Membuat GAP dan GBS
 Sumber: Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Yogyakarta

F. Gender dalam Politik

1. Jumlah Calon Legislatif Kota Yogyakarta

Kebijakan afirmatif dengan memberikan kuota 30% bagi kaum perempuan diatur dalam Undang-Undang Pemilu Legislatif (UU 12/2003, UU 10/2008) dan Undang-Undang Partai Politik (UU 31/2002, UU 2/2008, UU 2/2011), maupun ratifikasi berbagai konvensi mengenai HAM. Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan diskriminasi positif dalam rangka meningkatkan jumlah keterwakilan dan peran politik perempuan di DPR. Adapun tingkat partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif Kota Yogyakarta periode 2019-2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Partai Politik	Caleg Laki-Laki		Caleg Perempuan		Jumlah Total	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	20	62.5%	12	37.5%	32	8.31%
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	24	61.5%	15	38.5%	39	10.13%
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	24	63%	14	37%	38	9.87%
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	22	55%	18	45%	40	10.39%
Partai Nasional Demokrasi (NASDEM)	25	62.5%	15	37.5%	40	10.39%
Partai Berkarya	10	59%	7	41%	17	4.42%
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	26	65%	14	35%	40	10.39%
Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	13	48%	14	52%	27	7.01%
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	57%	3	43%	7	1.82%
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3	50%	3	50%	6	1.56%
Partai Amanat Nasional (PAN)	26	65%	14	35%	40	10.36%
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1	33%	2	67%	3	0.78%
Partai Demokrat	21	60%	14	40%	35	9.09%
Partai Bulan Bintang (PBB)	12	63%	7	37%	19	4.94%
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	50%	1	50%	2	0.52%
Jumlah	232	60.3%	153	39.7%	385	100%

Tabel 2.32. Jumlah Calon Legislatif Kota Yogyakarta Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Periode 2019-2024

Sumber: KPU Kota Yogyakarta

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan pada pemilu legislatif Kota Yogyakarta periode 2019-2024 sudah melebihi batas minimum keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yaitu sebesar 39.7%. Akan tetapi

angka keterpilihan perempuan tidak mencapai 30 %, sebagaimana pada tabel dibawah ini.

ASAL PARTAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
PDI Perjuangan	11	2
Partai Demokrat	1	1
Partai Amanat Nasional (PAN)	6	0
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	0
Partai Nasional Demokrasi (NASDEM)	4	0
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	3	1
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	0
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	3	2
Jumlah	34	6

Tabel 2.33. Jumlah Anggota DPRD Kota Yogyakarta Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin Periode 2019-2024

Sumber: BPS Kota Yogyakarta

Keterpilihan perempuan pada lembaga legislatif Kota Yogyakarta Periode 2019-2024 hanya 6 dari 40 kursi yang ada, atau hanya sebesar 15 %. Angka tersebut masih separuh dari kuota yang seharusnya dipenuhi oleh anggota legislatif perempuan. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif diharapkan dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan perempuan dalam kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Yogyakarta. Peran sesama perempuan di setiap sektor pemerintahan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan empati dan intuisi serta pengalaman-pengalaman sesama perempuan yang notabene lebih erat (*Women Support Women*).

2. Jumlah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Aktif Tahun 2022

LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah mufakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan

masyarakat di bidang pembangunan. Adapun sebaran ketua LPMK di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut.

Kemantren	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tegalrejo	4	0	4
Jetis	3	0	3
Gondokusuman	5	0	5
Danurejan	3	0	3
Gedongtengen	2	0	2
Ngampilan	2	0	2
Wirobrajan	3	0	3
Mantrijeron	3	0	3
Kraton	2	1	3
Gondomanan	2	0	2
Pakualaman	2	0	2
Mergangsan	3	0	3
Umbulharjo	6	1	7
Kotagede	3	0	3
Jumlah	43	2	45

Tabel 2.34. Jumlah Ketua LPMK Kota Yogyakarta Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Sumber: Bagian Kesra Kota Yogyakarta

Pedoman Pelaksanaan Ketugasan LPMK di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 40 Tahun 2008. Didalamnya memuat ketugasan dari masing-masing pengurus LPMK, dimana Ketua I mempunyai tugas membantu ketugasan Ketua Umum dalam hal merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan. Pelaksanaan ketugasan tersebut khususnya pada urusan:

- a. keagamaan;
- b. keamanan, ketentraman dan ketertiban;
- c. pendidikan dan penerangan;
- d. kependudukan; dan
- e. pemuda, olahraga dan peranan wanita.

G. Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Yogyakarta

Kedudukan dan peran ASN diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Merujuk pada Pasal 12 UU Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan

pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik, PNS juga berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

1. Jumlah ASN Pemerintah Kota Yogyakarta

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa jumlah ASN di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini tergantung pada jumlah ASN yang pensiun dan jumlah penerimaan ASN di tahun tertentu. Sepanjang tahun 2019 hingga 2022 ASN perempuan jumlahnya lebih banyak daripada ASN laki-laki, dengan perbandingan pada tahun 2022 kurang lebih 3:5 atau 62% dari jumlah keseluruhan ASN di Kota Yogyakarta.

Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022	Jumlah
Laki-laki	2177	1615	1989	2016	7797
Perempuan	3046	3125	3021	3253	12445
Jumlah	5223	4740	5010	5269	20242

Tabel 2.35. Jumlah ASN Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019- 2022

Sumber: Website BKPSDM Kota Yogyakarta

2. Jumlah Pejabat ASN Pemerintah Kota Yogyakarta

Dalam praktek penyelenggaraan pelayanan dalam pemerintahan dibentuklah struktur hierarki, dari pimpinan hingga kepada level staff. Pada umumnya posisi pimpinan ini merupakan posisi yang banyak dipegang oleh laki-laki, namun banyak juga perempuan yang menduduki posisi-posisi strategis yang memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang berdampak pada sistem masyarakat. Berikut adalah sebaran ASN di Pemkot Yogyakarta berdasarkan jabatan dan jenis kelamin tahun 2019 hingga 2022.

Jenis Jabatan	Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022
Jabatan Struktural	Laki-laki	422	403	438	343

	Perempuan	408	396	433	335
JFT- Pendidikan	Laki-laki	453	395	345	341
	Perempuan	1399	1273	1181	1125
JFT- Kesehatan	Laki-laki	147	148	135	177
	Perempuan	669	654	629	891
JFT- Teknis	Laki-laki	103	164	156	323
	Perempuan	102	111	107	307
Jabatan Fungsional	Laki-laki	1052	900	915	832
	Perempuan	469	427	671	595

Tabel 2.36. Jumlah Pejabat ASN Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019- 2022

Sumber: Website BKPSDM Kota Yogyakarta

Tabel 2.34 diatas menunjukkan bahwa Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan JFT-Teknis lebih banyak diduduki oleh laki-laki, konsisten dari tahun 2019 hingga 2022. Jabatan struktural dan fungsional yang merupakan jabatan strategis dalam pengambilan keputusan di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Dengan Asesmen yang lebih banyak melibatkan pegawai perempuan harapannya jumlah antara laki-laki dan perempuan yang menduduki posisi strategis dapat lebih seimbang. Terutama pada jabatan fungsional yang proporsi perempuannya tidak sampai setengah dari keseluruhannya, yaitu 42% pada tahun 2022.

Sedangkan untuk JFT-Pendidikan dan Kesehatan lebih banyak diisi oleh perempuan. Dengan persentase perempuan di JFT-Pendidikan sebesar 77% dan 83% di JFT-Kesehatan pada tahun 2022. Kesenjangan jumlah laki-laki dan perempuan pada jabatan tersebut tidak terlepas dari peran mendidik dan kesehatan yang lebih banyak diberikan kepada perempuan. Peran dan tanggung jawab tersebut baiknya sama-sama dijalankan oleh laki-laki maupun perempuan baik dalam lingkup keluarga maupun publik.

3. Jumlah Mantri Pamong Praja Pemerintah Kota Yogyakarta

Mantri Pamong Praja (MPP) adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kemantren yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berikut adalah jumlah MPP dari tahun 2019 hingga 2022.

Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022
Laki-laki	13	13	12	12
Perempuan	1	1	2	2

Tabel 2.37. Jumlah Mantri Pamong Praja Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019- 2022

Sumber: Data Dasar SIGA DIY

Pada tabel diatas berturut-turut dari tahun 2019 hingga 2022 jumlah MPP laki-laki lebih banyak dari perempuan. Akan tetapi secara perlahan jumlah MPP perempuan mulai bertambah. Hal ini menandakan bahwa perempuan sudah dianggap mampu untuk menempati jabatan tertinggi di tingkat kemantren ini.

4. Jumlah Lurah Pemerintah Kota Yogyakarta

Lurah adalah Kepala Kelurahan yang merupakan bagian wilayah dari Kemantren sebagai perangkat kemantren sebagaimana Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan. Kelurahan mempunyai tugas membantu Kemantren dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi dan pengaduan, perekonomian, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat pada tingkat Kelurahan. Berikut jumlah lurah berdasarkan kemantren dan jenis kelamin di tahun 2022.

Kemantren	Laki-Laki	Perempuan	Pensiun	Jumlah
Tegalrejo	1	2	1	4
Jetis	1	1	1	3
Gondokusuman	4	0	1	5
Danurejan	3	0	0	3
Gedongtengen	1	1	0	2
Ngampilan	0	2	0	2
Wirobrajan	2	1	0	3

Mantrijeron	1	1	1	3
Kraton	2	1	0	3
Gondomanan	2	0	0	2
Pakualaman	1	1	0	2
Mergangsan	1	1	1	3
Umbulharjo	5	2	0	7
Kotagede	2	1	0	3
Jumlah	26	14	5	45

Tabel 2.38. Jumlah Mantri Pamong Praja Kota Yogyakarta Menurut Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Sumber: Website BKPSDM Kota Yogyakarta

Di tahun 2022 terdapat 5 lurah yang pensiun, sedangkan untuk jumlah lurah yang masih aktif lebih banyak diduduki oleh laki-laki dengan persentase sebesar 65%.

BAB III
DATA ANAK

A. Jumlah dan Persentase Penduduk Anak Kota Yogyakarta

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri, serta sifat khusus yang wajib dilindungi demi kepentingan bangsa di masa depan. Data Anak, data mengenai kondisi tentang anak perempuan dan anak laki-laki di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0 -1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-17 tahun. Data terpilih adalah data terpilih menurut jenis kelamin, status, kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan. Berikut adalah jumlah dan persentase penduduk anak di Kota Yogyakarta dan sebarannya di setiap kemantren tahun 2022.

NO	KEMANTREN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TEGALREJO	4701	4695	9396
2	JETIS	3377	3341	6718
3	GONDOKUSUMAN	5257	5239	10496
4	DANUREJAN	2661	2504	5165
5	GEDONGTENGEN	2255	2185	4440
6	NGAMPILAN	2263	2193	4456
7	WIROBRAJAN	3578	3523	7101
8	MANTRIJERON	4387	4268	8655
9	KRATON	2488	2395	4883
10	GANDOMANAN	1713	1712	3425
11	PAKUALAMAN	1276	1213	2489
12	MERGANGSAN	3876	3749	7625
13	UMBULHARJO	9395	9170	18565
14	KOTAGEDE	4718	4589	9307
	JUMLAH	51945	50776	102721

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Anak Kota Yogyakarta Tahun 2022 Berdasarkan Kemantren dan Jenis Kelamin

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dukcapil Kota Yogyakarta

Pada tahun 2022 jumlah penduduk di Kota Yogyakarta mencapai angka 414.487 jiwa

yang terdiri atas Laki-laki : 200.888 jiwa dan Perempuan 213.599 jiwa. Dari angka tersebut jumlah anak di Kota Yogyakarta mencapai 102.721 jiwa dengan jumlah anak laki-lakinya sebanyak 51.945 jiwa dan jumlah anak perempuan 50.776 jiwa. Dengan demikian persentase jumlah anak-anak di kota Yogyakarta adalah 24.78%. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 prosentase jumlah anak sebesar 26,49 % .



Diagram 3.1. Persentase Penduduk Anak Kota Yogyakarta Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dukcapil Kota Yogyakarta

Dari diagram di atas dapat diketahui Persentase penduduk anak di Indonesia menurut jenis kelamin cukup berimbang, tidak terlalu besar.

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
0-1 th	3673	4501	8174
2-3th	5303	4979	10282
4-6th	8356	7833	16189
7-12th	18105	17551	35656
13-15th	9942	9666	19608
16-17th	6566	6246	12812
JUMLAH	51945	50776	102721

Tabel 3.2. Jumlah Anak di Kota Yogyakarta Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dukcapil Kota Yogyakarta

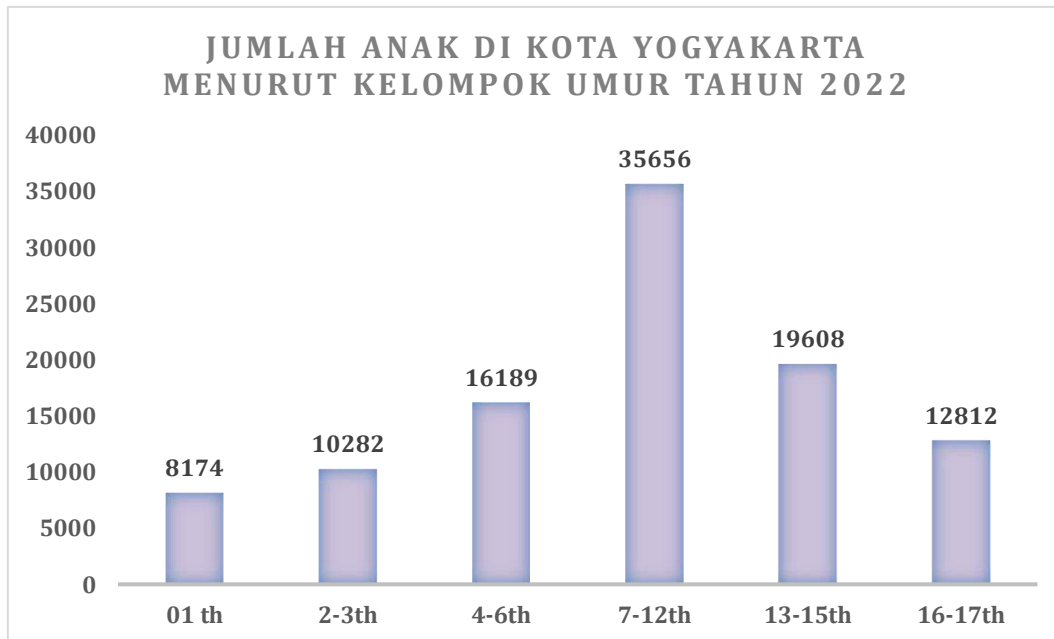


Diagram 3.2. Jumlah Anak di Kota Yogyakarta Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dukcapil Kota Yogyakarta

Sama seperti tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 berdasarkan kelompok umur, anak-anak di Kota Yogyakarta paling banyak berada di kelompok umur 7 sampai 12 Tahun. Pada tahun 2022 jumlah anak pada kelompok umur 7 sampai dengan 12 tahun juga mencapai angka tertinggi yaitu 34.71% (35.656 jiwa), Dimana kelompok usia tersebut adalah kelompok usia anak dengan jenjang pendidikan sekolah dasar. Sedangkan anak-anak pada kelompok umur 0 sampai 1 tahun memiliki jumlah paling sedikit yaitu 7.96% (8.174 jiwa) artinya jumlah kelahiran di Kota Yogyakarta untuk tahun ini cukup sedikit.

B. Perlindungan Anak Kota Yogyakarta

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah tanggung jawab seluruh pihak, baik bagi orang tua, keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan negara (UNICEF, 2020).

Di Indonesia, perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan atas tiga pemahaman. Pertama, anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara. Kedua, anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan yang didalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Ketiga, anak merupakan

generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. PUHA sebagai strategi pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

1. Anak Penyandang Disabilitas

Adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik, mental, intelektual atau sensorik yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak. Anak dengan disabilitas memiliki hak-hak yang perlu dipenuhi oleh semua pihak. Salah satu hak anak penyandang disabilitas yaitu mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.

NO	KEMANTREN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1	TEGALREJO	17	9	26
2	JETIS	13	5	18
3	GONDOKUSUMAN	15	7	22
4	DANUREJAN	8	4	12
5	GEDONGTENGAN	5	3	8
6	NGAMPILAN	13	5	18
7	WIROBRAJAN	20	14	34
8	MANTRIJERON	12	6	18
9	KRATON	7	5	12
10	GONDOMANAN	6	7	13
11	PAKUALAMAN	6	2	8
12	MERGANGSAN	12	9	21
13	UMBULHARJO	26	19	45
14	KOTAGEDE	15	7	22
	JUMLAH	175	102	277

Tabel 3.3. Jumlah Anak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

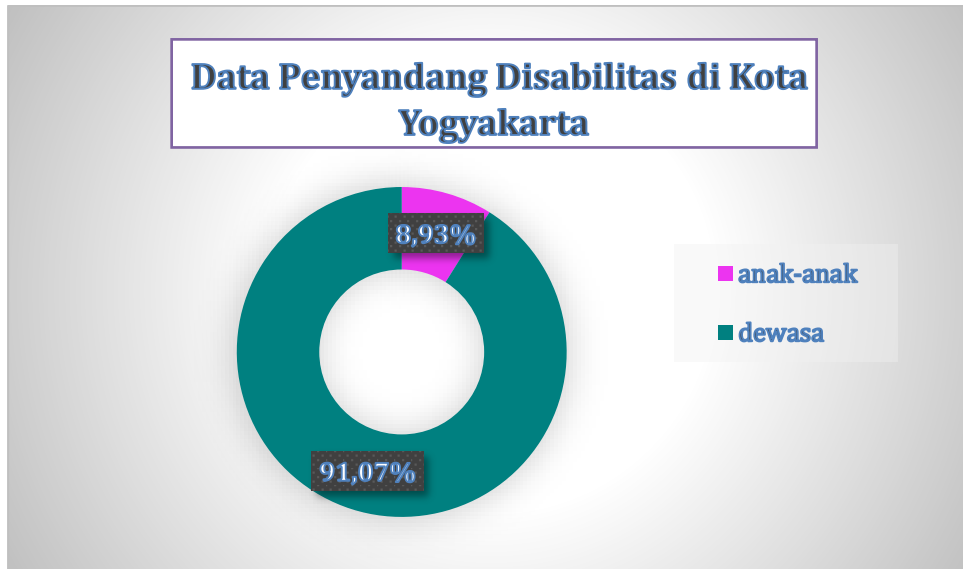


Diagram 3.3. Persentase Anak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta Tahun 2022
 Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 terdapat 3.103 penyandang disabilitas. 8,93%. diantaranya merupakan anak-anak yaitu sekitar 277 orang. Penyandang disabilitas ini merupakan salah satu dari yang termasuk kelompok rentan. Kelompok rentan adalah kelompok-kelompok individu yang lebih rentan dalam situasi bencana. Menurut pasal 55 ayat 2 Undang-undang Penanggulangan Bencana nomor 24 tahun 2007, yang termasuk kelompok rentan adalah: a. Bayi, balita, dan anak-anak b. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui c. Penyandang cacat (disabilitas), dan d. Orang lanjut usia. Berdasarkan data diatas jumlah anak laki-laki dengan kedisabilitasian lebih banyak daripada anak perempuan. Kemantren dengan jumlah anak kedisabilitasian paling banyak berasal dari kemantren Umbulharjo, Wirobrajan dan Tegalrejo.

2. Anak Jalanan

Adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Saat ini, kondisi anak jalanan memang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah di berbagai daerah. Hal ini karena kondisi anak jalanan menjadi masalah sosial yang kerap kali luput oleh perlindungan hukum.

NO	KEMANTREN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1	TEGALREJO	1	1	2
2	JETIS	0	0	0
3	GONDOKUSUMAN	0	0	0
4	DANUREJAN	0	0	0
5	GEDONGTENGEN	0	0	0
6	NGAMPILAN	0	0	0
7	WIROBRAJAN	0	0	0
8	MANTRIJERON	0	0	0
9	KRATON	0	0	0
10	GONDOMANAN	0	0	0
11	PAKUALAMAN	0	0	0
12	MERGANGSAN	2	0	2
13	UMBULHARJO	0	0	0
14	KOTAGEDE	0	0	0
	JUMLAH	3	1	4

Tabel 3.4. Jumlah Anak Jalanan Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemantren dan Jenis Kelamin Th 2022

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa di Kota Yogyakarta masih terdapat anak jalanan yang tersebar di dua Kemantren yaitu Tegalrejo dan Mergangsan. Untuk masing-masing kemantren ada 2 orang anak. 12 Kemantren lainnya nihil dalam artian tidak ada anak jalanan. Diharapkan kedepan semua Kemantren di Kota Yogyakarta bisa zero anak jalanan.

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan anak jalanan, diantaranya adalah pendekatan preventif serta pendekatan represif. Pendekatan preventif merupakan upaya mengajak anak jalanan untuk diarahkan pada lingkungan formal, seperti pelatihan, training, peningkatan softskill. Sedangkan pendekatan represif merupakan bentuk kebijakan dan program yang telah terorganisir oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran anak jalanan di masyarakat. (2013, *Profil Gender dan Anak Kota Yogyakarta*).

Permasalahan anak jalanan terjadi karena beberapa faktor, diantaranya : permasalahan ekonomi yang berkaitan erat dengan kemiskinan, kondisi lingkungan yang justru mengarahkan anak pada kondisi yang tidak kondusif secara mentalitas, kondisi orang tua yang tidak responsive dalam memberikan perhatian pada anak, bahkan tidak dipungkiri, adanya kekerasan yang dilakukan orang tua pada anak.

Jumlah anak Jalanan Berdasarkan Jenis Kelamin

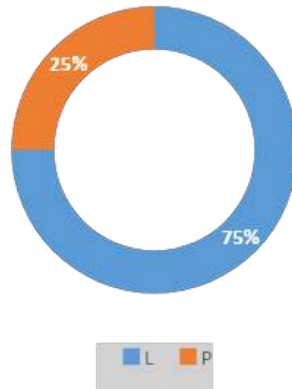


Diagram 3.4. Persentase Anak Jalanan Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Dilihat berdasarkan jenis kelaminnya jumlah anak jalanan dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan. Seperempat dari jumlah anak jalanan yang ada berjenis kelamin laki-laki yaitu 3 anak (75%) dan untuk anak perempuan ada 1 (25%).

C. Pemenuhan Hak Anak (Hak Sipil dan Kebebasan) Kota Yogyakarta

Anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk janin yang masih di dalam kandungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Jenis data pemenuhan hak anak mengacu pada Konvensi Hak Anak, terdiri atas 5 (lima) klaster kebutuhan hak anak, meliputi:

1. Hak sipil dan kebebasan, antara lain: data anak yang memiliki akte kelahiran, informasi layak anak, lembaga partisipasi anak;
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif antara lain: data tentang lembaga konsultasi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan antara lain: data kematian bayi, status gizi balita, imunisasi, dan data rumah tangga dengan akses air bersih;
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, antara lain: data partisipasi sekolah dan data sekolah ramah anak; dan
5. Perlindungan khusus, antara lain: data anak berkebutuhan khusus (disabilitas, autisme,

istimewa), data kekerasan terhadap anak, data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), data anak jalanan, dan data anak yang terisolasi.

Lalu Berikut ini adalah data-data terkait dengan hak sipil dan kebebasan anak di Kota Yogyakarta.

1. Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 27, dijelaskan bahwa akta kelahiran merupakan bentuk dari identitas anak yang perlu dipenuhi oleh orang tua. Hal ini karena, keberadaan akta kelahiran merupakan salah satu kunci bagi anak dalam mengakses pendidikan, dan juga sarana kesehatan. Berikut adalah jumlah dan persentase anak dengan kepemilikan akta kelahiran di Kota Yogyakarta dan sebarannya di setiap kemantren pada tahun 2022.

KEMANTREN	Tidak Punya			Punya			TOTAL		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
TEGALREJO	107	106	213	4594	4589	9183	4701	4695	9396
JETIS	75	76	151	3302	3265	6567	3377	3341	6718
GONDOKUSUMAN	154	108	262	5103	5131	10234	5257	5239	10496
DANUREJAN	59	46	105	2602	2458	5060	2661	2504	5165
GEDONGTENGEN	55	56	111	2200	2129	4329	2255	2185	4440
NGAMPILAN	53	62	115	2210	2131	4341	2263	2193	4456
WIROBRAJAN	66	67	133	3512	3456	6968	3578	3523	7101
MANTRIJERON	70	52	122	4317	4216	8533	4387	4268	8655
KRATON	51	40	91	2437	2355	4792	2488	2395	4883
GANDOMANAN	19	27	46	1694	1685	3379	1713	1712	3425
PAKUALAMAN	39	32	71	1237	1181	2418	1276	1213	2489
MERGANGSAN	76	85	161	3800	3664	7464	3876	3749	7625
UMBULHARJO	169	138	307	9226	9032	18258	9395	9170	18565
KOTAGEDE	90	69	159	4628	4520	9148	4718	4589	9307
Jumlah	1083	964	2047	50862	49812	100674	51945	50776	102721

Tabel 3.5. Jumlah Anak Yang Berumur 0 - 18 Tahun Kota Yogyakarta

Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022

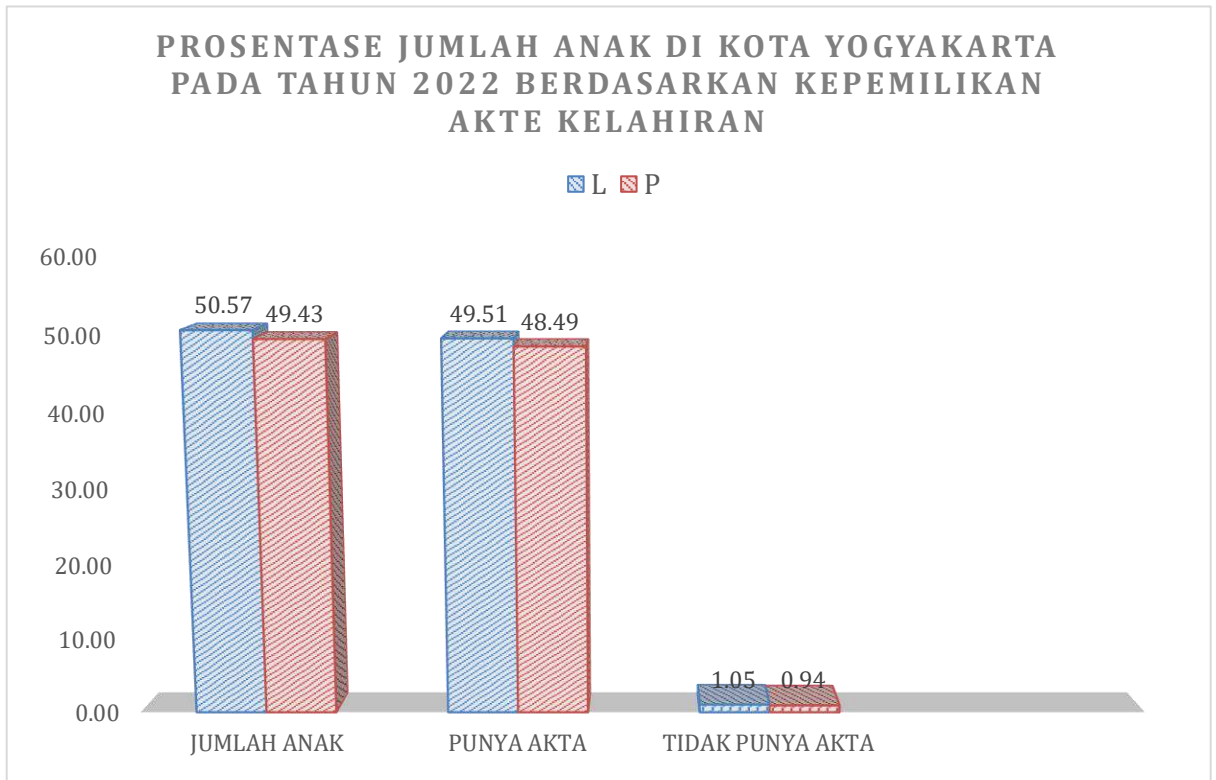


Diagram 3.5. Jumlah Anak Yang Berumur 0 - 18 Tahun Kota Yogyakarta Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel dan diagram di atas dapat diketahui bahwa persentase jumlah anak laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anak perempuan. Persentase anak laki-laki dengan kepemilikan akta kelahiran sebesar 49.51%. Artinya, bahwa dari 100 anak laki-laki, 50 orang diantaranya sudah memiliki akta kelahiran. Persentase kepemilikan akta kelahiran untuk anak laki-laki lebih besar bila dibandingkan dengan anak perempuan. Demikian juga persentase anak laki-laki yang tidak memiliki akta kelahiran juga lebih banyak bila dibandingkan dengan anak perempuan.

Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2022 untuk masing-masing Kemantren dapat dilihat pada tabel berikut ini.

NO	KEMANTREN	JUMLAH ANAK	MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	PROSENTASE
1	TEGALREJO	9396	9183	97,73

2	JETIS	6718	6567	97,75
3	GONDOKUSUMAN	10496	10234	97,50
4	DANUREJAN	5165	5060	97,97
5	GEDONGTENGEN	4440	4329	97,50
6	NGAMPILAN	4456	4341	97,42
7	WIROBRAJAN	7101	6968	98,13
8	MANTRIJERON	8655	8533	98,59
9	KRATON	4883	4792	98,14
10	GONDONANAN	3425	3379	98,66
11	PAKUJALAMAN	2489	2418	97,15
12	MERGANGSAN	7625	7464	97,89
13	UMBULHARJO	18565	18258	98,35
14	KOTAGEDE	9307	9148	98,29
	Jumlah	102721	100674	98,01

Tabel 3.6. Jumlah dan Persentase Anak Yang Berumur 0 - 18 Tahun Kota Yogyakarta Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kemantren Tahun 2022



Diagram 3.6. Persentase Anak Yang Berumur 0 - 18 Tahun Kota Yogyakarta Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kemantren Tahun 2022

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa cakupan paling tinggi

kepemilikan akta kelahiran anak di Kota Yogyakarta pada Tahun 2022 berada di Kemantren Gondomanan yaitu sebesar 98.66 persen ini artinya dari 100 anak yang berumur 0 - 18 tahun di Kemantren Gondomanan 98 diantaranya sudah memiliki akta kelahiran. Sedangkan cakupan paling rendah kepemilikan akta kelahiran anak di Kota Yogyakarta berada di Kemantren Pakualaman yaitu sebesar 97.15 persen. Ini artinya kemantren Pakualaman merupakan salah satu penyumbang terbesar anak yang tidak memiliki akta kelahiran yaitu 2.85% anak di Kemantren Pakualaman belum memiliki akta kelahiran.

2. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pembuatan KIA didasari atas pertimbangan bahwa, anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional. Padahal, identitas kependudukan sangat penting sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Perlu diketahui, KIA dibagi menjadi dua. Pertama, KIA untuk anak berusia kurang dari 5 tahun dan berlaku hingga anak berumur 5 tahun. Kedua, KIA untuk anak berusia di atas 5 tahun dan berlaku hingga usianya 17 tahun.

Pemberian identitas yang resmi dan diakui secara nasional itulah yang diupayakan oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan Kartu Identitas Anak. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta pada Tahun 2022 sejumlah 414.487 jiwa. Dari angka tersebut jumlah anak yang berusia dibawah 17 tahun (yaitu 17 th kurang 1 hari) ada 96.433 berarti 23.26 % jumlah penduduk Kota Yogyakarta terdiri dari anak-anak berusia 0-16 tahun. Berikut adalah jumlah anak dengan kepemilikan KIA dan sebarannya per kemantren di Kota Yogyakarta tahun 2022.

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
TEGALREJO	876	784	1.660
JETIS	768	743	1.511
GONDOKUSUMAN	1.126	1.022	2.148
DANUREJAN	611	507	1.118
GEDONGTENGEN	532	489	1.021
NGAMPILAN	527	452	979
WIROBRAJAN	932	835	1.767
MANTRIJERON	1.182	1.035	2.217
KRATON	586	513	1.099

GANDOMANAN	391	357	748
PAKUALAMAN	313	299	612
MERGANGSAN	956	862	1.818
UMBULHARJO	2.345	2.178	4.523
KOTAGEDE	1.056	987	2.043
TOTAL	12.201	11.063	23.264

Tabel 3.7. Jumlah Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

KEMANTREN	Jumlah anak Usia < 17 Tahun			Memiliki KIA			Tidak Memiliki KIA		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
TEGALREJO	4428	4421	8849	876	784	1.660	3552	3637	7189
JETIS	3185	3139	6324	768	743	1.511	2417	2396	4813
GONDOKUSUMAN	4896	4925	9821	1.126	1.022	2.148	3770	3903	7673
DANUREJAN	2487	2342	4829	611	507	1.118	1876	1835	3711
GEDONGTENGEN	2125	2040	4165	532	489	1.021	1593	1551	3144
NGAMPILAN	2128	2050	4178	527	452	979	1601	1598	3199
WIROBRAJAN	3353	3274	6627	932	835	1.767	2421	2439	4860
MANTRIJERON	4121	3999	8120	1.182	1.035	2.217	2939	2964	5903
KRATON	2310	2262	4572	586	513	1.099	1724	1749	3473
GANDOMANAN	1616	1617	3233	391	357	748	1225	1260	2485
PAKUALAMAN	1184	1123	2307	313	299	612	871	824	1695
MERGANGSAN	3648	3523	7171	956	862	1.818	2692	2661	5353
UMBULHARJO	8812	8663	17475	2.345	2.178	4.523	6467	6485	12952
KOTAGEDE	4430	4332	8762	1.056	987	2.043	3374	3345	6719
Jumlah	48723	47710	96433	12.201	11.063	23.264	36522	36647	73169

Tabel 3.8. Jumlah Anak Kota Yogyakarta yang Berumur Dibawah 17 Tahun Berdasarkan Kepemilikan KIA, Kemantren dan Jenis Kelamin dan Kemantren Tahun 2022

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas diketahui bahwa Jumlah anak laki-laki yang berusia dibawah 17 tahun lebih banyak bila dibandingkan dengan anak perempuannya. Demikian juga untuk kepemilikan KIA, jumlah anak laki-laki yang memiliki KIA juga

lebih banyak bila dibandingkan dengan anak perempuan. Jumlah anak laki-laki yang memiliki KIA ada 12.201 jiwa dan untuk anak perempuan yang memiliki KIA ada 23.264 jiwa.

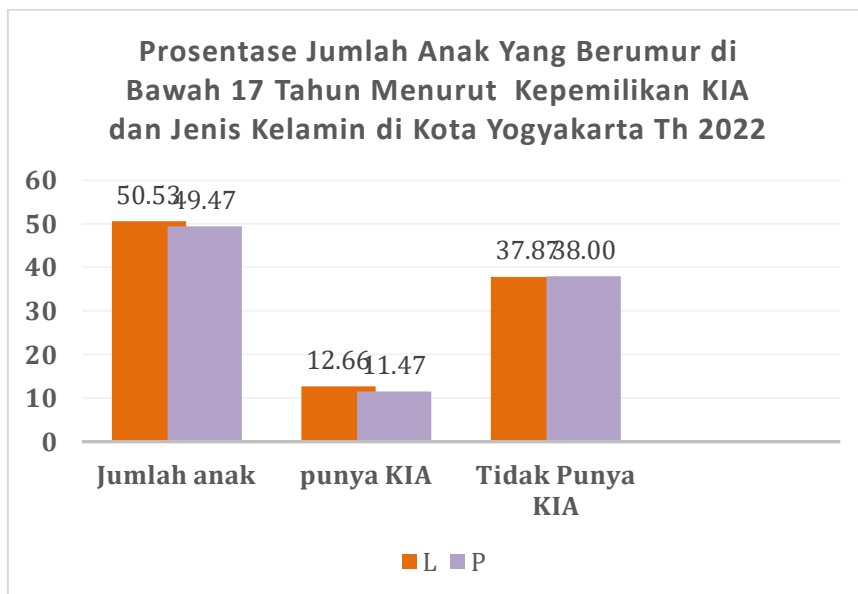


Diagram 3.7. Persentase Anak Kota Yogyakarta yang Berumur di Bawah 17 Tahun Menurut Kepemilikan KIA dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

Capaian Persentase Kepemilikan KIA untuk Kota Yogyakarta adalah 61.43%. Untuk anak laki-laki yang memiliki KIA sejumlah 12.66 % dan untuk anak perempuan sejumlah 11.47 %. Sedangkan yang tidak memiliki KIA untuk anak laki-laki lebih besar pula bila dibandingkan dengan anak perempuan. Untuk anak laki-laki 37.87% dan anak perempuan 38 %.

NO	KEMANTREN	JUMLAH ANAK	MEMILIKI KIA
1	TEGALREJO	8849	1.660
2	JETIS	6324	1.511
3	GONDOKUSUMAN	9821	2.148
4	DANUREJAN	4829	1.118
5	GEDONGTENGEN	4165	1.021
6	NGAMPILAN	4178	979
7	WIROBRAJAN	6627	1.767
8	MANTRIJERON	8120	2.217

9	KRATON	4572	1.099
10	GONDONANAN	3233	748
11	PAKUALAMAN	2307	612
12	MERGANGSAN	7171	1.818
13	UMBULHARJO	17475	4.523
14	KOTAGEDE	8762	2.043
	Jumlah	96433	23.264

Tabel 3.9. Jumlah Anak Kota Yogyakarta yang Berumur Dibawah 17 Tahun Berdasarkan Kepemilikan KIA dan Kemantren Tahun 2022

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022



Diagram 3.8. Persentase Anak Kota Yogyakarta yang Berumur Dibawah 17 Tahun Berdasarkan Kepemilikan KIA dan Kemantren Tahun 2022

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa persentase kepemilikan KIA paling banyak berada di Kemantren Mantriheron yaitu sebesar 27.30 %. Ini artinya dari 100 anak yang berumur di bawah 17 tahun 27 orang diantaranya sudah memiliki KIA. Sedangkan kepemilikan KIA paling sedikit berada di Kemantren Tegalrejo yaitu 18.76 %, artinya dari 100 anak yang berumur dibawah 17 tahun 19 anak diantaranya baru memiliki KIA.

D. Permasalahan Anak (Isu-Isu tentang Anak) Kota Yogyakarta

Terdapat beberapa persoalan krusial terkait dengan perlindungan anak antara lain mengenai kesehatan, pendidikan, perlindungan dan lain sebagainya.

1. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sebelum mencapai usia 19 tahun. Setelah anak mendekati dewasa keluarga kadang dihadapi dengan masalah pernikahan anak yang masih di bawah umur. Sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 huruf c menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

KEMANTREN	JUMLAH PASANGAN
TEGALREJO	11
JETIS	13
GONDOKUSUMAN	10
DANUREJAN	3
GEDONGTENGEN	9
NGAMPILAN	6
WIROBRAJAN	10
MANTRIJERON	14
KRATON	3
GANDOMANAN	5
PAKUALAMAN	0
MERGANGSAN	8
UMBULHARJO	25
KOTAGEDE	6
JUMLAH	123

Tabel 3.10. Jumlah Calon Pasangan Pengantin Usia Dini Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemantren Tahun 2022

Sumber : Kelurahan di Kota Yogyakarta, 2022

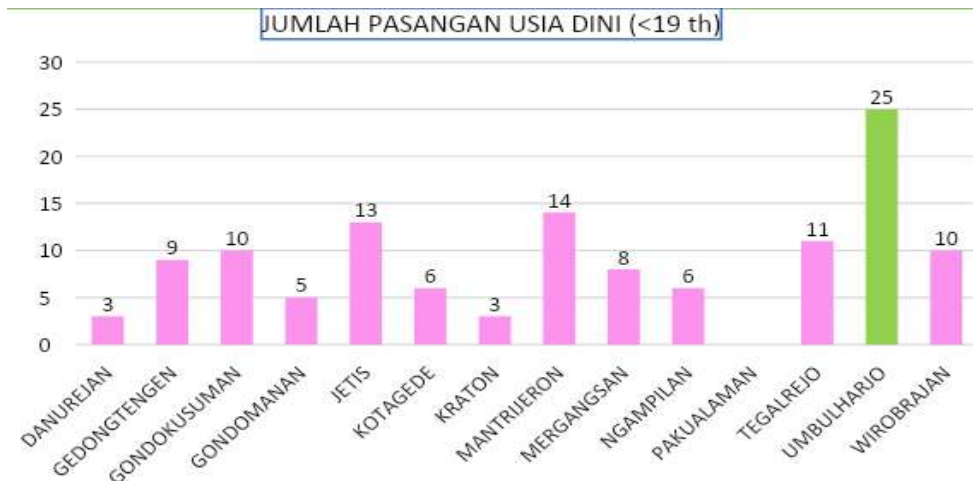


Diagram 3.9. Jumlah Calon Pasangan Pengantin Usia Dini Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemantren Tahun 2022

Sumber : Kelurahan di Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel dan diagram diatas dapat dilihat bahwa caten pernikahan dini paling banyak berada di Kemantren Umbulharjo yaitu ada 25 kasus, sedangkan paling sedikit berada di Kemantren Pakualaman yaitu hanya ada 0 atau zero kasus. Pernikahan dini dapat berdampak pada putusnya Pendidikan. Selain bisa berdampak buruk bagi kesehatan, pernikahan dini juga berpotensi memicu kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Diharapkan kemantren-kemantren di Kota Yogyakarta bisa seperti di Kemantren Pakualaman yang zero kasus caten pernikahan dini. Kasus caten pernikahan dini di Kota Yogyakarta yang terjadi pada setiap bulannya dapat dilihat seperti berikut ini.

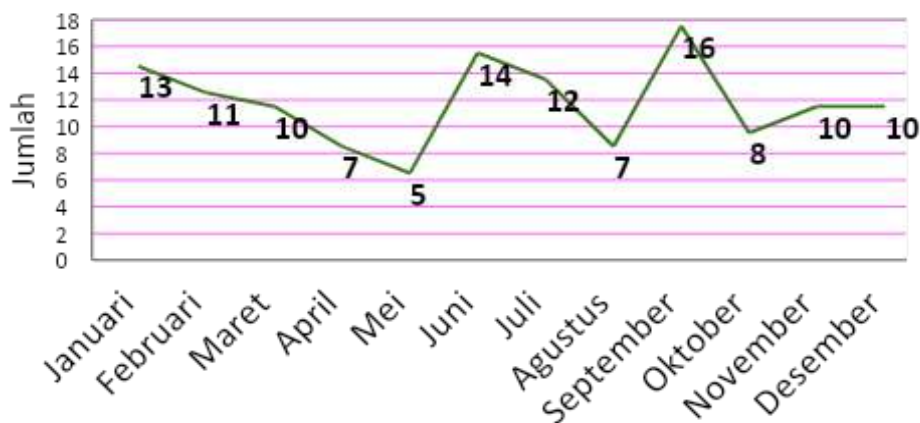


Diagram 3.10. Jumlah Calon Pasangan Pengantin Usia Dini Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemantren Tahun 2022

Sumber : Kelurahan di Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data dari Kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta, perkembangan kasus caten pernikahan dini dalam kurun waktu setahun adalah

seperti di atas, selama 5 bulan di awal tahun trennya turun kemudian naik pada bulan juni. Kasus paling banyak terjadi pada bulan September yaitu ada 16 kasus.

Pernikahan dini dapat terjadi dengan berbagai alasan dan salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya hubungan seks di luar nikah. Ada pula orang tua yang menikahkan anak mereka yang masih remaja karena alasan ekonomi. Namun untuk kasus di Kota Yogyakarta sendiri, pernikahan dini hampir seluruhnya disebabkan oleh kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD). Hanya sebesar 8% pernikahan usia dini yang disebabkan oleh alasan lain (selain KTD). Meskipun demikian hendaknya pernikahan dini tidak dijadikan satu-satunya solusi, karena pernikahan dini justru bisa menimbulkan perkara lain. Penguatan peran keluarga dalam pendidikan seks sejak dini sangat diperlukan, agar anak tahu akan risiko yang akan dihadapinya apabila menjalani kehidupan seks bebas.

Terkait dengan pernikahan usia dini, tidak dapat dilepaskan dari peranan Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi usia perkawinan bagi pasangan calon pengantin yang akan menjalani pernikahan usia dini. Berikut adalah data jumlah dispensasi yang diputus Pengadilan Agama pada tahun 2022 (Jiwa) dan sebarannya di setiap kemantren.

Kemantren	Usia Dini (<19 th)	
	Laki-Laki	Perempuan
Tegalrejo	0	4
Jetis	4	8
Gondokusuman	3	4
Danurejan	0	1
Gedongtengen	2	1
Ngampilan	1	3
Wirobrajan	0	3
Mantrijeron	3	2
Kraton	0	1
Gondomanan	0	0
Pakualaman	0	0
Mergangsan	3	2
Umbulharjo	3	10
Kotagede	3	4
Jumlah	22	43

Tabel 3.11. Jumlah Dispensasi Pernikahan yang diputus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2022 (Jiwa) Berdasarkan Kemantren dan Jenis Kelamin

Sumber : Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Yogyakarta diketahui bahwa pada tahun 2022 jumlah dispensasi yang mengajukan pernikahan dini ada 65 orang yang terdiri dari laki-laki ada 22 orang dan perempuannya 43 orang. Dimana jumlah anak perempuan yang mengajukan pernikahan dini dua kali lipat lebih banyak jika dibandingkan dengan anak laki-laki.

2. Balita dalam Kondisi Stunting

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Stunting berkembang dalam jangka panjang karena kombinasi dari beberapa atau semua faktor-faktor. Karena mengalami kekurangan gizi menahun, bayi stunting tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seumumnya. Tapi ingat, stunting itu pasti bertubuh pendek, sementara yang bertubuh pendek belum tentu stunting. Oleh karena itu perlu usaha jangka panjang untuk mencegah stunting pada anak-anak. Berikut ini gambaran angka balita stunting di Kota Yogyakarta.

NO	PUSKESMAS	JUMLAH
1	WIROBRAJAN	19
2	UMBULHARJO I	42
3	UMBULHARJO II	32
4	TEGALREJO	41
5	PAKUALAMAN	6
6	NGAMPILAN	23
7	MANTRIJERON	30
8	MERGANGSAN	10
9	KRATON	11
10	KOTAGEDE I	35
11	KOTAGEDE II	12
12	JETIS	30
13	GEDONGTENGEN	42
14	GANDOMANAN	8
15	GONDOKUSUMAN I	39

16	GONDOKUSUMAN II	11
17	DANUREJAN I	14
18	DANUREJAN II	3
	JUMLAH	408

Tabel 3.12. Jumlah Baduta Stunting di Setiap Puskesmas Kota Yogyakarta Tahun 2022

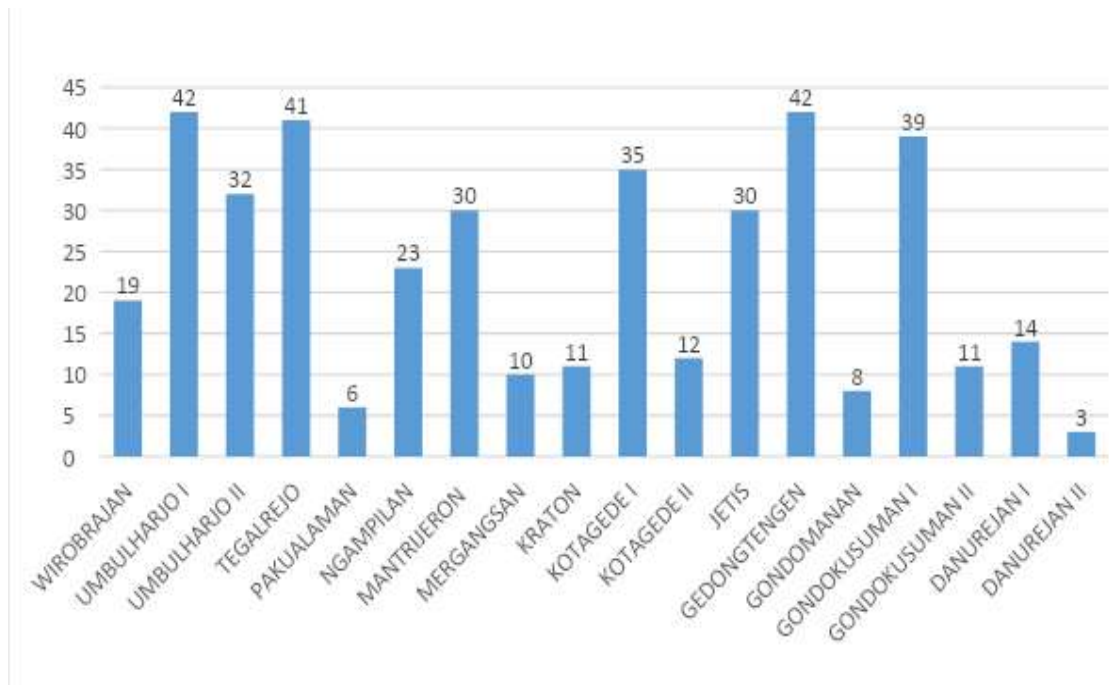


Diagram 3.11. Jumlah Baduta Stunting di Setiap Puskesmas Kota Yogyakarta Tahun 2022
Sumber : Dinkes Kota Yogyakarta, 2022

Jumlah Baduta Stunting di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 berjumlah 408 yang tersebar di 18 Puskesmas yang ada di Kota Yogyakarta. Rata-rata setiap puskesmas menangani kasus stunting sejumlah 22 kasus. Ada 9 puskesmas yang menangani kasus stunting di atas rata-rata yaitu Umbulharjo 1 dan 2, Tegalrejo, Ngampilan, Mantrijeron, Kotagede 1, jetis, Gedongtengen dan Gondokusuman 1.

Untuk menekan jumlah angka stunting dilakukan beberapa upaya diantaranya yaitu dimulai dari sebelum anak lahir, yakni saat para ibu atau pasangan usia subur merencanakan akan menikah, mereka harus dicek kesehatannya, mengkonsumsi asam folat, periksa hb, mengkonsumsi tambah darah. Banyak perempuan yang hamil dalam kondisi yang sebenarnya belum siap sehingga kemungkinan anaknya bisa stunting.

3. Dapur Balita

Dapur Balita merupakan sebuah gerakan pemberdayaan yang muncul di masa pandemi covid 19 sebagai salah satu solusi bagi pemantauan gizi dan kesehatan khususnya untuk pemberian makanan tambahan bagi balita yang selama ini diberikan melalui posyandu. Jumlah Dapur Balita di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

	Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022
Jumlah RW	81	120	155
Jumlah Dapur Balita (Dabal)	81	123	155

Tabel 3.13. Jumlah Dapur Balita di Kota Yogyakarta

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Jumlah Dapur balita di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami kenaikan hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan asupan gizi terhadap anak balita semakin besar. Dapur balita di Kota Yogyakarta berbasis RW. Sampai saat ini jumlah dapur balita ada 155. Dapur balita tumbuh dari swadaya masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungannya. Dapur balita peduli Covid 19 juga bertujuan memantau tumbuh kembang anak melalui orang tua, selain itu secara sosial untuk meningkatkan gotong royong peduli bagi anak, sebagai individu yang rentan selama masa pandemik dengan tujuan jangka panjang adalah dengan berbagi makanan yang bergizi secara rutin diharapkan juga untuk pencegahan stunting. Di Kota Yogyakarta telah di *launching* DASHAT yaitu Dapur Sehat Atasi Stunting.

4. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah merupakan keadaan dimana kondisi anak usia sekolah tidak mampu meneruskan pendidikan yang tersedia berdasarkan usianya. Meskipun telah dicanangkan tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah tetap saja masih ditemukan kasus putus sekolah di semua level pendidikan dasar dan menengah. Berikut ini kami sampaikan jumlah angka putus sekolah berdasarkan jenis kelamin dan Kemantren di Kota Yogyakarta.

KEMANTREN	SD		SMP		JUMLAH
	L	P	L	P	(L+P)

TEGALREJO	0	0	0	0	0
JETIS	0	0	0	0	0
GONDOKUSUMAN	2	0	0	0	2
DANUREJAN	0	0	0	0	0
GEDONGTENGEN	0	0	0	0	0
NGAMPILAN	1	0	0	0	1
WIROBRAJAN	0	0	0	1	1
MANTRIJERON	0	0	0	0	0
KRATON	0	0	0	0	0
GONDONANAN	0	0	0	0	0
PAKUALAMAN	0	0	0	0	0
MERGANGSAN	0	0	0	0	0
UMBULHARJO	2	0	1	2	5
KOTAGEDE	0	0	0	0	0
JUMLAH	5	0	1	3	9

Tabel 3.14. Jumlah Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemantren dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2022

Data Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2022 menunjukkan jumlah murid SD yang ada di Kota Yogyakarta ada 38.571 dan jumlah murid SMP adalah 20.577. Dari angka tersebut terdapat jumlah kumulatif anak putus sekolah yaitu 9 orang. Berdasarkan jenjang Pendidikannya APS terjadi pada tingkatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, untuk SD ada 5 orang dan untuk SMP ada 4 orang. Dari data tersebut dapat diketahui angka putus sekolah SD sebesar 0,01% dan angka putus sekolah SMP 0,02% sehingga akan diperoleh angka putus sekolah di Kota Yogyakarta sebesar 0,02%. Berdasarkan data tahun 2022 ini APS terdapat di 4 Kemantren yaitu Gondokusuman (22.22%), Ngampilan (11.11%), Wirobrajan (11.11%) dan Umbulharjo (55.56%).

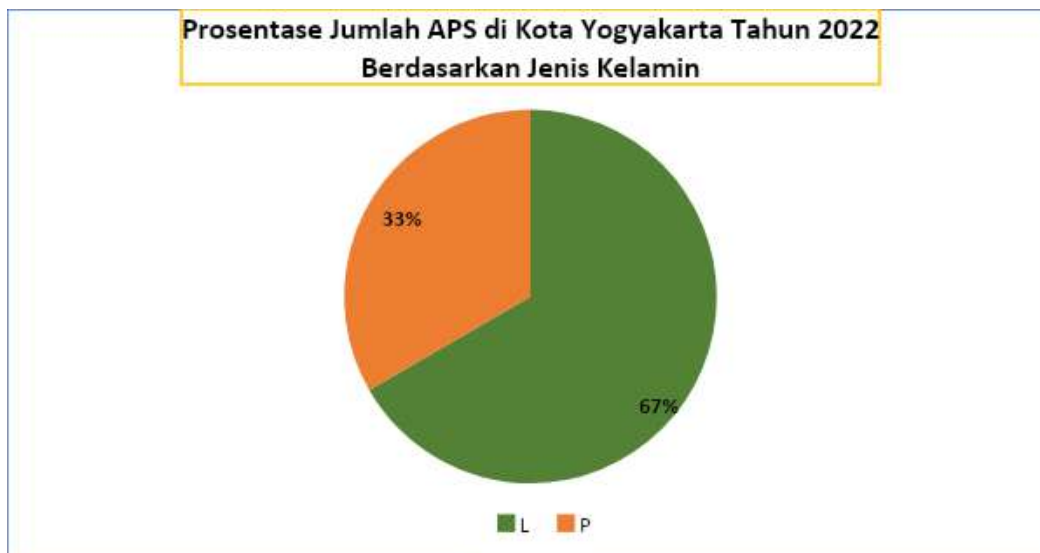


Diagram 3.12. Persentase Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Jenis Kelamin Tahun 2022
 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan jenis kelaminnya 67% dari Jumlah Anak Putus Sekolah (APS) berjenis kelamin laki-laki. Pada umumnya, kasus putus sekolah dapat terjadi karena dorongan membantu kebutuhan ekonomi keluarga, kesulitan untuk membiayai sekolah, kesulitan untuk mengakses sarana Pendidikan menengah, dan merasa tidak mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

5. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Untuk memenuhi hak warga tentang pendidikan pemerintah secara terus menerus berupaya membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan terutama pada tingkat dasar serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah ditingkat Pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang Pendidikan tertentu. Keikutsertaan Pendidikan pada proses Pendidikan ini tidak terbatas pada kelompok usia normatif untuk setiap jenjang Pendidikan. Misalnya untuk anak SD, tidak terbatas bagi penduduk berusia 7-12 tahun, namun juga melibatkan mereka yang tidak termasuk pada kelompok umur tersebut.

	L	P	(L+P)	Satuan
SD	113.40	111.35	112.38	%
SLTP	127.71	127.68	127.69	%
SLTA	193.20	203.09	198.06	%

Tabel 3.15. Jumlah Angka Partisipasi Kasar di Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Sumber : siga.jogjaprov.go.id/data_dasar/, 2022

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 APK dengan jenjang SD mencapai 112.38%, APK dengan jenjang SMP mencapai 127,69% dan APK untuk anak SLTA adalah 198.06%. APK anak laki-laki dengan jenjang SD dan SLTP lebih tinggi bila dibandingkan dengan anak perempuan. Sementara APK anak perempuan pada jenjang SLTA lebih tinggi bila dibandingkan dengan anak laki-laki. Rata-rata angka APK di Kota Yogyakarta yang menunjukkan lebih dari 100% tersebut mengindikasikan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta telah mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya

6. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka partisipasi murni akan selalu rendah dibandingkan angka partisipasi kasar mengingat pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama. Angka partisipasi murni membatasi usia murid sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya sehingga angkanya lebih kecil.

	L	P	(L+P)	Satuan
SD	105.50	102.96	104.25	%
SLTP	101.39	98.38	99.91	%
SLTA	141.04	145.24	143.10	%

Tabel 3.16. Jumlah Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Sumber : siga.jogjaprov.go.id/data_dasar/, 2022

Partisipasi sekolah juga bisa dikaji berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) dihitung dari jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang sekolah yang sesuai dengan usianya dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang sama. Indikator ini berguna untuk melihat proporsi penduduk usia sekolah yang tepat waktu atau sesuai dengan standar usia pada jenjang pendidikan yang berkaitan.

APM jenjang SD pada tahun 2022 tercatat mencapai 104,25% artinya jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang SD sederajat mencapai 104.25%. Keberhasilan implementasi program wajib belajar 9 tahun terlihat dari tingginya angka partisipasi pada jenjang ini. APM pada tingkat SLTP di tahun 2022 tercatat sebesar 99.91% Artinya proporsi penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah pada jenjang SMP sebanyak 99.91%, sedangkan APM pada tingkat SLTA sebesar 143.10%.

Angka partisipasi murni (APM) laki-laki di tingkat SD dan SLTP lebih tinggi dibandingkan perempuan, namun di tingkat SLTA APM perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

7. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah menunjukkan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

	L	P	(L+P)	Satuan
7-12 tahun	117.87	118.13	118.00	%
13-15 tahun	144.08	151.38	147.67	%
16-18 tahun	143.32	145.96	144.61	%

Tabel 3.17. Jumlah Angka Partisipasi Sekolah di Kota Yogyakarta Berdasarkan kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Sumber : siga.jogjaprov.go.id/data_dasar, 2022

APS perempuan di Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki baik pada kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun serta pada kelompok umur 16-18 tahun.

E. Kelembagaan Kota layak Anak (KLA)

1. Kampung Ramah Anak (KRA)

Kampung ramah anak adalah pembangunan yang berbasis dari RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha yang berada di lingkungan setempat dalam rangka menghormati, menjamin, memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi. Pentingnya Kampung Ramah Anak sebagai bagian dari pembangunan Kabupaten/Kota layak Anak. Berikut kami uraikan jumlah KRA yang terbentuk pada tahun 2011 hingga tahun 2022.

	TERBENTUK	JUMLAH
	TAHUN 2011	2
	TAHUN 2012	12
	TAHUN 2013	32
	TAHUN 2014	68
	TAHUN 2015	42
	TAHUN 2016	6
	TAHUN 2017	9
	TAHUN 2018	9
	TAHUN 2019	13
	TAHUN 2020	0
	TAHUN 2021	0
	TAHUN 2022	0
	JUMLAH	193

Tabel 3.18. Jumlah Kampung Ramah Anak di Kota Yogyakarta yang Terbentuk Tahun 2011-2022

Sumber : Bidang PPHA, DP3AP2KB Kota Yogyakarta

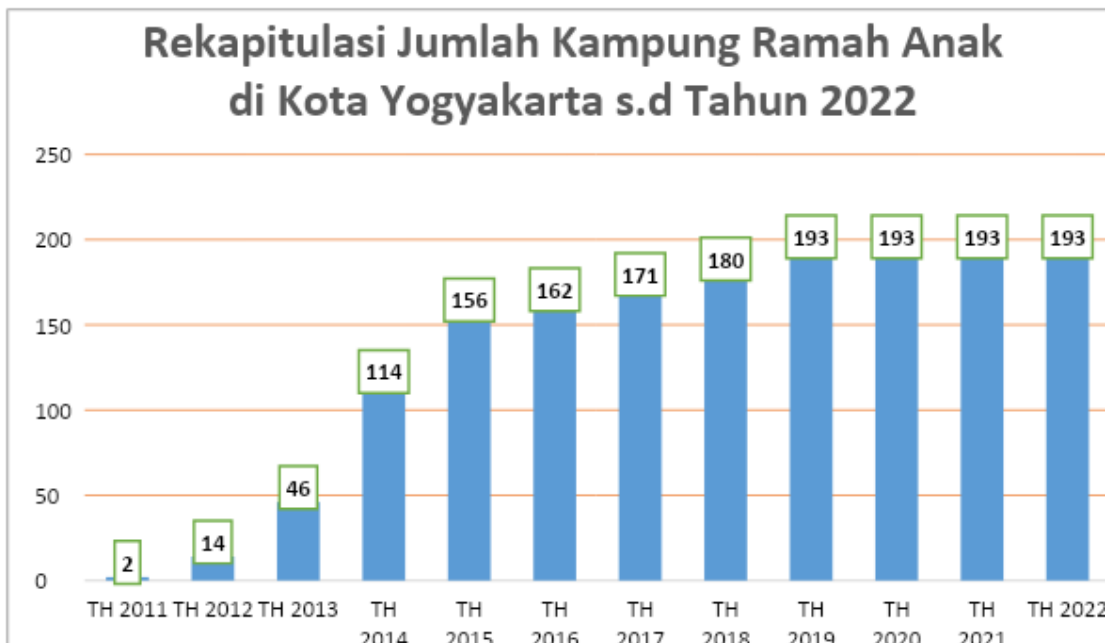


Diagram 3.13. Rekapitulasi Jumlah Kampung Ramah Anak di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2022
 Sumber : Bidang PPHA, DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Selama 4 tahun terakhir ini tidak ada penambahan kampung ramah anak yang terbentuk. Di Kota Yogyakarta jumlah kampung ramah anak masih sama dengan tahun 2019 yaitu ada 193.



Diagram 3.14. Persentase Kampung Ramah Anak di Kota Yogyakarta Tahun 2022
 Sumber : Bidang PPHA, DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Di Kota Yogyakarta prosentase Kampung Ramah Anak baru mencapai 31.28% ini artinya dari 617 RW yang ada di Kota Yogyakarta baru 193 RW yang

sudah KRA, yang sudah menerapkan komitmen untuk menghormati, menjamin, memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi serta mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar menyeluruh dan berkelanjutan. Sisanya sebanyak 68.72% RW yang ada di Kota Yogyakarta belum ramah anak. Diharapkan RW-RW yang belum ramah anak ini agar segera menyusul menjadi KRA karena dari RW-RW yang sudah KRA akan menjadikan Kelurahan Layak Anak (Dekelana).

KEMANTREN	JUMLAH
TEGALREJO	12
JETIS	13
GONDOKUSUMAN	19
DANUREJAN	15
GEDONGTENGEN	8
NGAMPILAN	8
WIROBRAJAN	14
MANTRIJERON	12
KRATON	12
GONDOMANAN	10
PAKUALAMAN	13
MERGANGSAN	17
UMBULHARJO	27
KOTAGEDE	13

Tabel 3.19. Jumlah Kampung Ramah Anak di Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemantren Tahun 2022
Sumber : Bidang PPHA, DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Berdasarkan Kemantren Kampung Ramah Anak paling banyak berada di Kemantren Umbulharjo dengan jumlah KRA ada 27, sedangkan Kemantren dengan jumlah KRA paling sedikit berada di Kemantren Gedongtengen dan Ngampilan masing-masing Kemantren tersebut baru memiliki 8 KRA. Diharapkan Kemantren yang cakupan KRA masih sedikit agar segera ditambah karena ini berperan / penyumbang terhadap Kecamatan Layak Anak (Kelana).

2. Puskesmas Ramah Anak (PRA)

Kesehatan merupakan salah satu hak anak yang wajib dipenuhi. Oleh sebab itu fasilitas kesehatan harus ramah anak agar anak-anak senang memeriksakan kesehatan mereka ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Untuk mewujudkan hal tersebut maka puskesmas harus mempunyai fasilitas yang mendukung. Beberapa indikator yang harus dipenuhi terkait puskesmas ramah anak salah satunya adalah mempunyai sarana bermain anak di lingkungan Puskesmas tersebut.

TAHUN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
JUMLAH PRA	10	18	18	18	18	18

Tabel 3.20. Jumlah Puskesmas Ramah Anak di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022
Sumber : Bidang PPHA, DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Puskesmas Ramah Anak di Kota Yogyakarta mulai terbentuk pada tahun 2017, pada awalnya jumlah PRA yang terbentuk ada 10 Puskesmas (55,56%) . Sejak tahun 2018 semua Puskesmas di Kota Yogyakarta yang berjumlah 18, 100% sudah ramah anak. Pelayanan ramah anak di Puskesmas merupakan salah satu pendukung untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

3. Sekolah Ramah Anak (SRA)

Tujuan utama sekolah ramah anak adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi anak saat berada di sekolah. Tidak ada diskriminasi dan kekerasan yang dialami anak di sekolah. Kondisi tersebut dapat diwujudkan apabila tersedia sistem Pendidikan yang mendukung, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang mengerti dan didukung sarana prasarana yang memadai. Berikut ini kami sampaikan jumlah Sekolah Ramah Anak yang terbentuk di Kota Yogyakarta.

	TH. 2017	TH. 2019	TH. 2021	TH 2022	JUMLAH
TK	0	217	0	0	217
SD/MI	13	140	15	0	168
SMP/MTS	5	58	3	0	66
JUMLAH	18	415	18	0	451

Tabel 3.21. Jumlah dan Tahun Terbentuknya Sekolah Ramah Anak di Kota Yogyakarta
Sumber : Bidang PPHA, DP3AP2KB Kota Yogyakarta

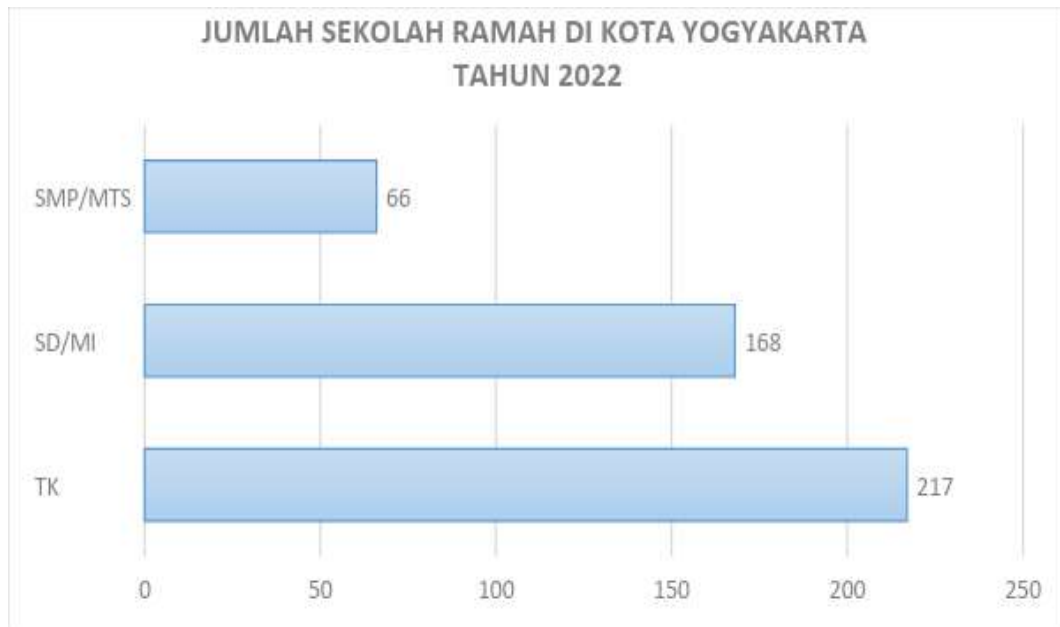


Diagram 3.15. Jumlah Sekolah Ramah Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sumber : Bidang PPHA, DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Yogyakarta sudah terbentuk sejak tahun 2017, pada awalnya jumlah SRA yang terbentuk ada 18 Sekolah dengan rincian untuk SD/MI ada 13 dan untuk SLTP/MTS ada 5 sekolah. Sampai tahun 2021 jumlah SRA di Kota Yogyakarta mencapai 451 sekolah. Pada tahun 2022 tidak ada penambahan sehingga jumlahnya masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 451 sekolah. Keberadaan sekolah ramah anak menjadi salah satu dari tiga amanat Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak yang harus dijalankan, selain kampung ramah anak dan pelayanan Kesehatan ramah anak.

4. Tempat Peribadatan Ramah Anak

Tempat peribadatan sebagaimana 6 agama yang diakui di Indonesia meliputi Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Wihara serta Klenteng. Berikut ini kami sampaikan tempat peribadatan ramah anak yang ada di Kota Yogyakarta.



Diagram 3.16. Persentase Masjid Ramah Anak di Kota Yogyakarta Tahun 2022
 Sumber : Bidang PPHA, DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Prosentase masjid ramah anak di kota Yogyakarta masih sangat kecil sekali yaitu 3.69% (baru ada 19 masjid ramah anak). Sedangkan prosentase gereja yang sudah ramah anak adalah 5.56% baru ada 3 gereja dari 54 gereja yang ada. Pura dan wihara masing-masing baru tercatat ada 1. Dan belum ada data terkait klenteng yang sudah ramah anak.

Diharapkan kedepannya tempat peribadatan di Kota Yogyakarta bisa bertambah. Selain sebagai tempat berlangsungnya salah satu fungsi keluarga yaitu fungsi agama, tempat peribadatan juga menjalankan fungsi keluarga sosialisasi dan pendidikan, serta cinta kasih.

5. Polsek Ramah Anak

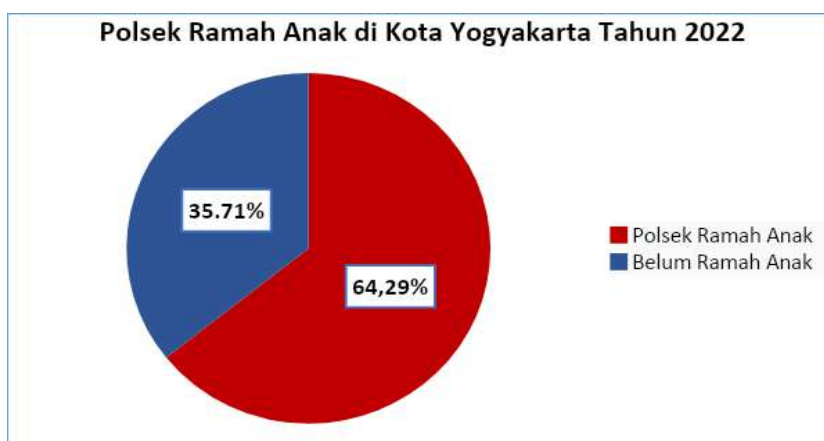


Diagram 3.17. Persentase Polsek Ramah Anak di Kota Yogyakarta Tahun 2022
 Sumber : Bidang PPHA, DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Jumlah Polsek ramah anak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 di Kota Yogyakarta baru terbentuk 2 Polsek ramah anak sedangkan pada tahun 2022 ini mengalami penambahan sebanyak 7 sehingga persentasenya menjadi 64.29 % (9 Polsek). 9 Polsek yang sudah ramah anak meliputi polsek Gondokusuman, Kotagede, Danurejan, Umbulharjo, Tegalrejo, Jetis, Mergangsan, Wirobrajan dan Gondomanan. Diharapkan kedepan semua Polsek di Kota Yogyakarta sudah ramah anak.

6. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Definisi dari PATBM atau Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Berikut ini jumlah PATBM di Kota Yogyakarta.

TAHUN TERBENTUK	JUMLAH
2017	1
2018	20
2019	6
2020	9
2021	9
2022	0

Tabel 3.22. Jumlah PATBM Berdasarkan Tahun Terbentuknya di Kota Yogyakarta
Sumber : Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

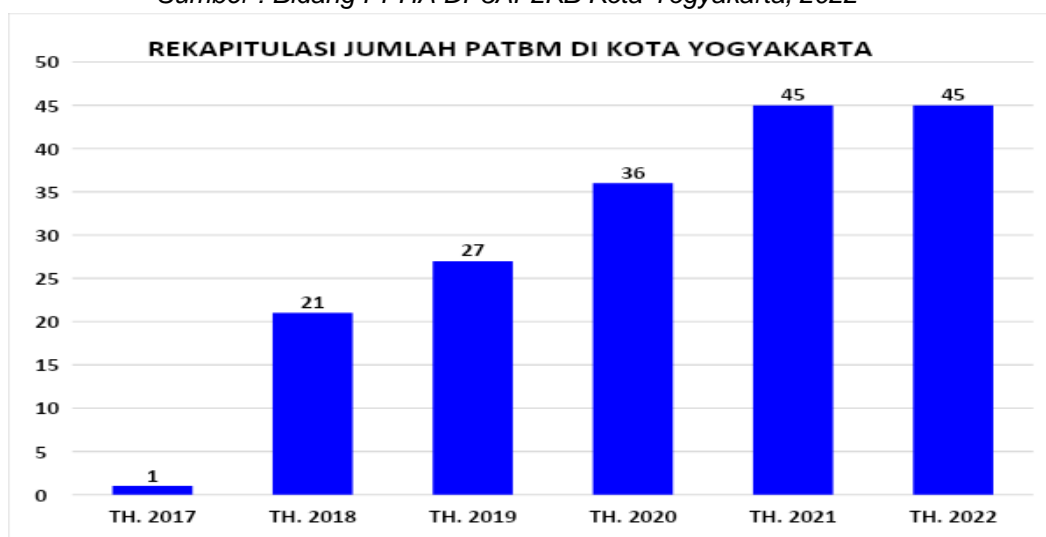


Diagram 3.18. Rekapitulasi Jumlah PATBM di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022
Sumber : Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan tabel dan diagram PATBM paling banyak dibentuk pada tahun 2018 (44,44%) sedangkan sejak tahun 2021 seluruh kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta sudah memiliki PATBM yang artinya kesadaran masyarakat dalam rangka melakukan perlindungan anak dari tindak kekerasan semakin meningkat.

7. Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekelana) dan Kecamatan Layak Anak (Kelana)

Pembentukan Dekelana dan Kelana, selain untuk mendukung perkuatan Kota Layak Anak (KLA) juga untuk mendorong para stakeholder di Kelurahan dan Kecamatan agar lebih peduli terhadap anak.

TERBENTUK TAHUN	2017	2018	2019	2020
JUMLAH	14	10	11	10

Tabel 3.23. Jumlah Dekelana di Kota Yogyakarta Berdasarkan Tahun Terbentuknya

Sumber : Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

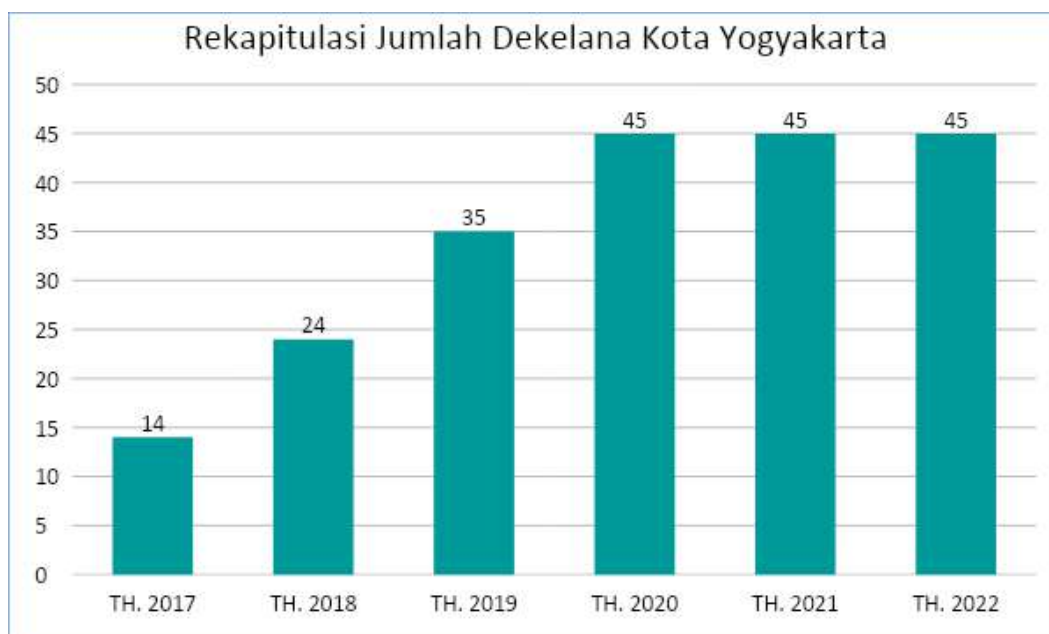


Diagram 3.19. Rekapitulasi Jumlah Dekelana Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

Sumber : Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Pada mulanya yaitu pada tahun 2017 prosentase Kelurahan layak anak di Kota Yogyakarta hanya 31,11% dari jumlah kelurahan yang ada. Dari tahun ke tahun jumlah Dekelana di Kota Yogyakarta semakin bertambah banyak hingga pada tahun 2020 seluruh Kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta sudah 100 % menjadi

Kelurahan layak anak. Dengan adanya Kelurahan Layak Anak diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, rukun tetangga dan rukun warga atau lingkungan yang peduli anak, kelurahan yang layak bagi anak sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan terpenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya.

NO	NAMA KEMANTREN	KET
1	MERGANGSAN	2016
2	DANUREJAN	2016
3	TEGALREJO	2016
4	JETIS	2017
5	UMBULHARJO	2017
6	KOTAGEDE	2017
7	GANDOMANAN	2018
8	GEDONGTENGEN	2018
9	GONDOKUSUMAN	2018
10	WIROBRAJAN	2018
11	MANTRIJERON	2019
12	PAKUALAMAN	2019
13	NGAMPILAN	2020
14	KRATON	2020

Tabel 3.24. Kecamatan Layak Anak se Kota Yogyakarta
 Sumber : Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

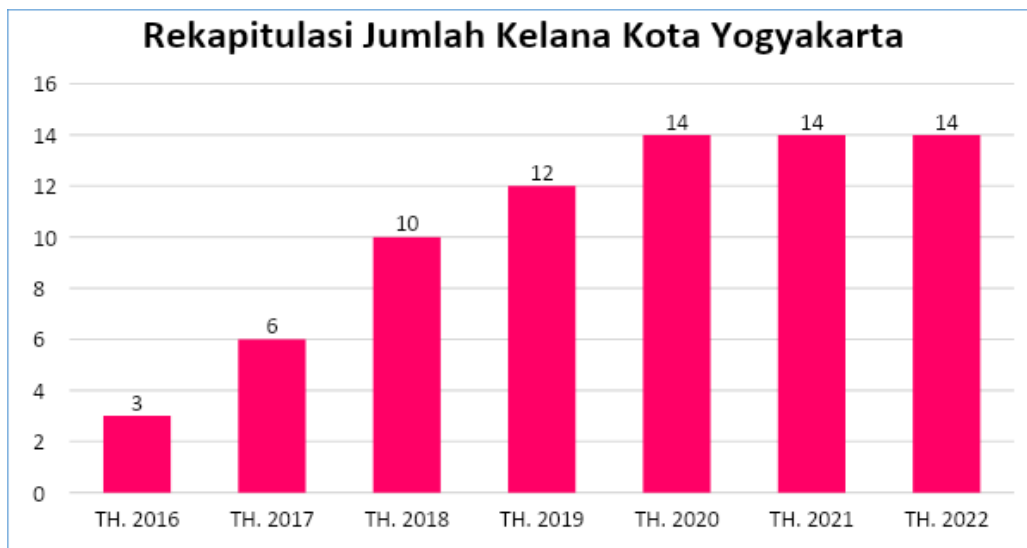


Diagram 3.20. Rekapitulasi Jumlah Kelana di Kota Yogyakarta Tahun 2016-2022
 Sumber : Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Pada awalnya jumlah Kecamatan Layak Anak di Kota Yogyakarta hanyalah 21,43 % (3 Kemantren). Penambahan jumlah Kelana paling banyak terjadi pada tahun 2018. Dalam kurun waktu 5 tahun semua Kemantren di Kota Yogyakarta sudah layak anak semua. Hal ini menandakan bahwa semua Kemantren di Kota Yogyakarta sudah semua menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan terhadap anak.

F. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

PUSPAGA merupakan singkatan dari Pusat Pembelajaran Keluarga, yang memiliki tujuan sebagai unit pelayanan terpadu satu pintu (*one stop service*) masalah keluarga dan anak.

LAKI-LAKI	540
PEREMPUAN	1245
TOTAL	1785

Tabel 3.25. Jumlah Klien Puspaga Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022
 Sumber : Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022



Diagram 3.21. Persentase Klien Puspaga Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022
 Sumber : Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan tabel dan diagram dapat diketahui bahwa klien Puspaga 69.75 % berjenis kelamin perempuan ini artinya dari 100 klien puspaga 70 diantaranya adalah kaum perempuan dan sisanya 30.25 % berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa yang berkonsultasi mengenai masalah keluarga ataupun anak mayoritas adalah kaum perempuan.

Pola pengasuhan anak/ Parenting	1340
Kurang fokus belajar	50
Manajemen emosi	2
Kesulitan bersosialisasi	2
Manajemen stress	12
Kekerasan	373
Konflik perkawinan	2
KDRT	0
Kesehatan mental remaja	0
Traumatis	1

Demotivasi	1
Kesehatan mental dewasa	2
Konseling pra nikah	0
Total	1785

Tabel 3.26. Jumlah Klien Puspaga Berdasarkan Kasus yang diLaporkan Tahun 2022
 Sumber : Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Selama 1 tahun 75.07% kasus yang ditangani Puspaga yaitu tentang pola pengasuhan anak/parenting. Parenting atau pola asuh orang tua terhadap anak meliputi memenuhi kebutuhan fisik yaitu makanan dan minuman, dan juga memenuhi kebutuhan psikologi yakni kasih sayang, rasa aman, serta bersosialisasi dengan masyarakat sekitar agar anak bisa hidup selaras dengan lingkungannya. Setelah kasus Parenting kasus kedua yang banyak ditangani oleh Puspaga yaitu kekerasan serta yang ketiga adalah kurang fokus belajar.

Online	338
Tatap Muka	1447
Total	1785

Tabel 3.27. Jumlah Klien Puspaga Berdasarkan Jenis Pelayanan Tahun 2022
 Sumber : Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

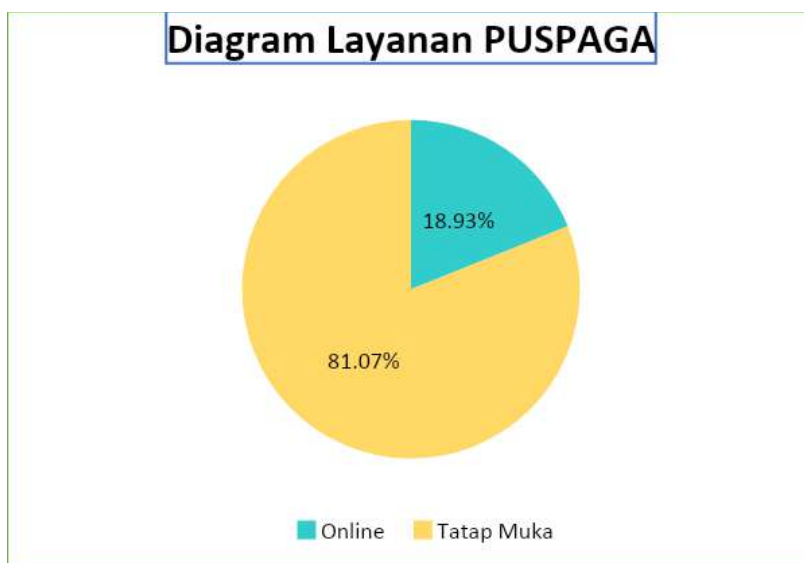


Diagram 3.22. Persentase Jumlah Klien Puspaga Berdasarkan Jenis Layanan Tahun 2022
 Sumber : Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Dalam menangani klien Puspaga memberikan pelayanan melalui layanan online maupun tatap muka secara langsung. Dimana kedua layanan tersebut memiliki perbandingan 81.07% (tatap muka) dan 18.93% (online) perbandingannya cukup menonjol, dari data tersebut dapat diketahui ternyata masyarakat lebih menyukai pelayanan melalui tatap muka.

JENIS LAYANAN	JUMLAH
Konseling	17
Konsultasi	5
Pendampingan	2
Asesment/Penjangkauan	4
Asesment ortu caten	251
Sosialisasi	1506
TOTAL	1785

Tabel 3.28. Jumlah Klien Puspaga Berdasarkan Jenis Layanan Tahun 2022
 Sumber : Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

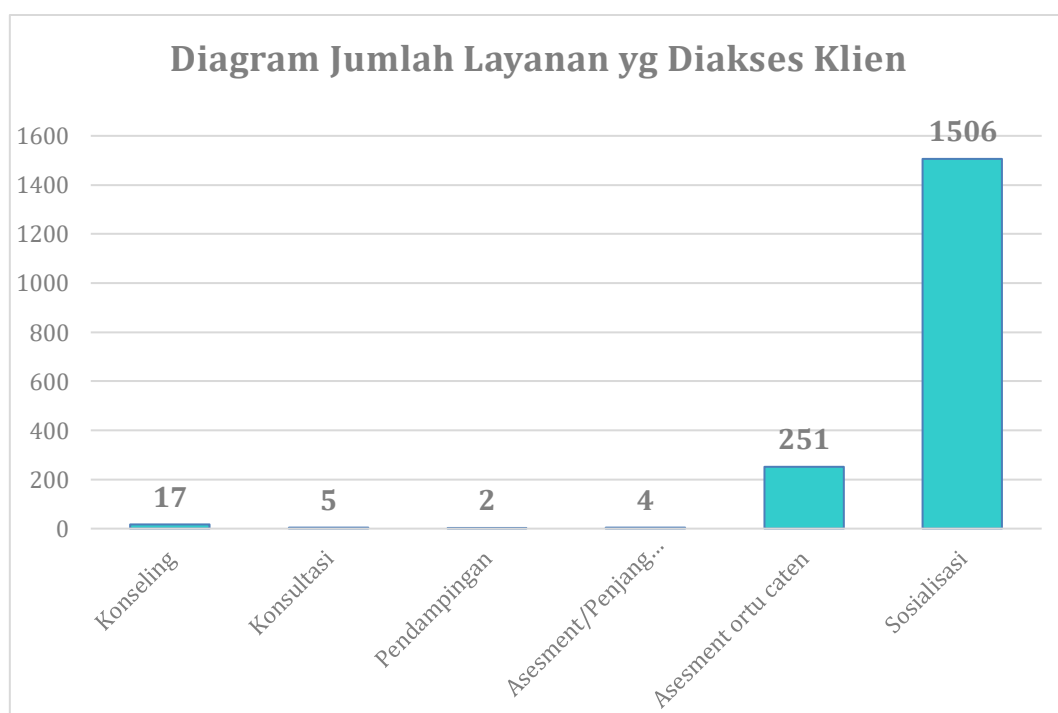


Diagram 3.23. Jumlah Klien Puspaga Berdasarkan Jenis Layanan yang Diakses Tahun 2022
 Sumber : Bidang PPHA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Pada tahun 2022 dari beberapa layanan yang diakses oleh klien, Sosialisasi memiliki jumlah yang paling banyak yaitu 84,37%. Sedangkan Konsultasi assesment ortu caten 14,06% (251 klien) menempati urutan ke dua.

BAB IV

KEKERASAN DI KOTA YOGYAKARTA

Menurut WHO (1999) kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekuatan fisik dan kekuasaan harus dilihat dari segi pandang yang luas mencakup tindakan atau peniksaan secara fisik, psikis/emosi, seksual dan kurang perhatian (*neglected*).

Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan, telah menyusun berbagai regulasi diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Sebagai tindak lanjutnya, telah direspon oleh berbagai pihak hampir di seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota, melalui peraturan daerah, peraturan gubernur, dan perbup/perwali dengan membentuk unit layanan penanganan kekerasan dengan beragam nama, seperti *Women Crisis Center (WCC)*, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang didalamnya terdiri dari unsur SKPD terkait, rumah sakit atau layanan medis, Aparat Penegak Hukum (APH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Organisasi Keagamaan.

Keterbukaan dan ketersediaan data yang lengkap dan akurat menjadi kebutuhan esensial dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY) telah membuat sistem pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi yang bernama SIGA (Sistem Informasi Gender Anak). Aplikasi SIGA kemudian digunakan sebagai sumber penarikan data kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta dengan metode penarikan data rutin setiap bulannya.

A. Jumlah Korban Kekerasan di Kota Yogyakarta

Meskipun mengalami penurunan jumlah korban kekerasan dari tahun sebelumnya, kekerasan yang terjadi di Kota Yogyakarta tampaknya masih terlihat cukup tinggi. Sampai saat ini, kekerasan masih menjadi fenomena gunung es, sehingga

rekapitulasi jumlah korban kekerasan di aplikasi pencatatan dan pelaporan SIGA tentunya akan sangat tergantung pada kesadaran dan keberanian korban dan masyarakat untuk melapor. Berikut adalah jumlah korban kekerasan berdasarkan jenis kelamin di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 dan sebarannya di setiap kemantren.

KEMANTREN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
TEGALREJO	5	18	23
JETIS	1	17	18
GONDOKUSUMAN	1	30	31
DANUREJAN	2	9	11
NGAMPILAN	0	6	6
GEDONGTENGEN	0	10	10
KRATON	0	13	13
PAKUALAMAN	1	6	7
MANTRIJERON	2	8	10
GANDOMANAN	1	3	4
WIROBRAJAN	1	13	14
MERGANGSAN	4	8	12
UMBULHARJO	9	39	48
KOTAGEDE	1	15	16
JUMLAH	28	195	223

Tabel 4.1. Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Kemantren dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2022
Sumber: SIGA Data Perlindungan DIY

Total keseluruhan korban di tahun 2022 mengalami penurunan sejumlah 23 orang dari tahun 2021. Akan tetapi jumlah korban kekerasan laki-laki justru bertambah dari tahun lalu sebanyak 16 orang. Peningkatan jumlah korban laki-laki ini menandakan tingkat kerawanan laki-laki menjadi korban kekerasan meningkat, bahkan pada kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terkhususnya pada usia anak. Selain menjadi kabar yang tidak baik, disisi lain hal ini juga menandakan bahwa tingkat kesadaran dan kemauan laki-laki untuk melaporkan tindak kekerasan juga meningkat. Terlepas dari stereotype yang berkembang di masyarakat bahwa laki-laki tidak seharusnya lemah sehingga tidak mungkin menjadi korban kekerasan.

Tabel 4.1 diatas juga menunjukkan bahwa korban kekerasan paling banyak berasal dari Kemantren Umbulharjo dan paling sedikit di Kemantren Gondomanan. Di

keseluruhan kementerian jumlah korban perempuan tetap menjadi yang lebih banyak daripada korban laki-laki sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dengan persentase di tahun 2022 sebesar 87%. Hal ini menandakan bahwa perempuan lebih rawan menjadi korban kekerasan.

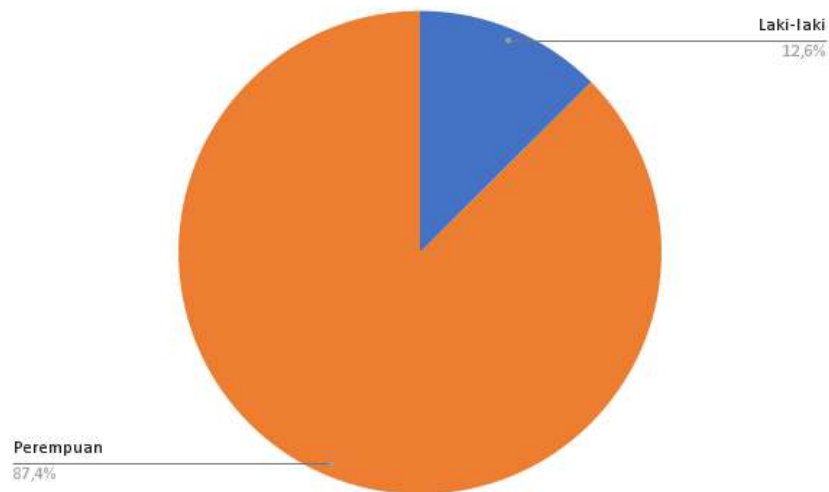


Diagram 4.1. Persentase Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta tahun 2022
Sumber: SIGA Data Perlindungan DIY

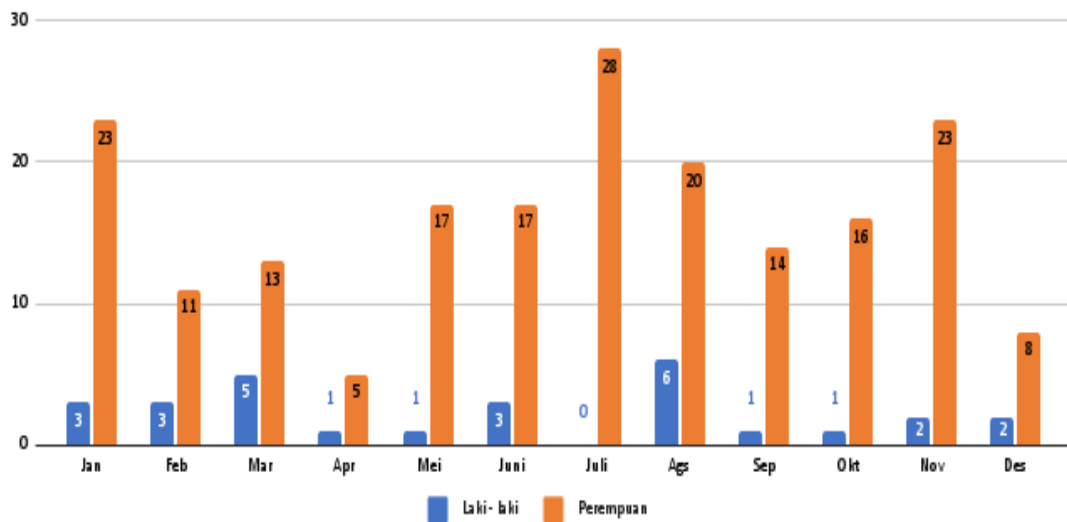


Diagram 4.2. Jumlah Korban Kekerasan Per Bulan Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2022
Sumber: SIGA Data Perlindungan DIY

Untuk jumlah korban per bulan dapat dilihat pada diagram 4.2. diatas. Korban kekerasan terbanyak ada di Bulan Juli, yaitu sebesar 12.5% dari total keseluruhan

korban kekerasan di tahun 2022 dan keseluruhannya adalah perempuan. Sedangkan untuk korban kekerasan paling sedikit ada di Bulan April, yaitu sebesar 3% dari total keseluruhan korban kekerasan di tahun 2022.

1. Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok umur dibedakan menjadi usia anak (0-17 Tahun), usia remaja (18-24 Tahun), usia dewasa (25-59) dan lansia (60 tahun keatas). Berikut adalah jumlah korban kekerasan berdasarkan kelompok umur yang terjadi di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 dan sebarannya di setiap kemantren.

KEMANTREN	KELOMPOK UMUR (TAHUN)				JUMLAH
	0-17	18-24	25-59	60+	
TEGALREJO	7	4	12	0	23
JETIS	9	1	7	1	18
GONDOKUSUMAN	5	6	19	1	31
DANUREJAN	1	0	9	1	11
NGAMPILAN	1	0	5	0	6
GEDONGTENGEN	3	4	3	0	10
KRATON	2	0	11	0	13
PAKUALAMAN	1	0	6	0	7
MANTRIJERON	4	1	5	0	10
GANDOMANAN	0	2	2	0	4
WIROBRAJAN	5	2	7	0	14
MERGANGSAN	6	2	4	0	12
UMBULHARJO	7	13	26	2	48
KOTAGEDE	4	1	10	1	16
JUMLAH	55	36	126	6	223

Tabel 4.2. Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Kemantren dan Kelompok Umur Kota Yogyakarta Tahun 2022
Sumber: SIGA Data Perlindungan DIY

Korban kekerasan selain tidak memandang jenis kelamin juga tidak memandang usia. Di Tahun 2022 didominasi oleh usia 25-59 tahun sejumlah 126 orang atau 56% dari keseluruhan jumlah korban kekerasan. Usia dewasa justru menjadi yang paling rawan terutama pada perempuan yang sudah menikah, yaitu rawan menjadi korban KDRT. Perlu menjadi catatan pula bahwa jumlah korban

usia anak juga cukup banyak yaitu sebesar 25%. Posisi perempuan dan anak dalam rumah tangga seringkali menjadi sasaran ketidakharmonisan keluarga. Penguatan ketahanan keluarga sekali lagi menjadi hal yang perlu diupayakan guna meningkatkan rasa cinta kasih dan saling melindungi antar anggota keluarga.

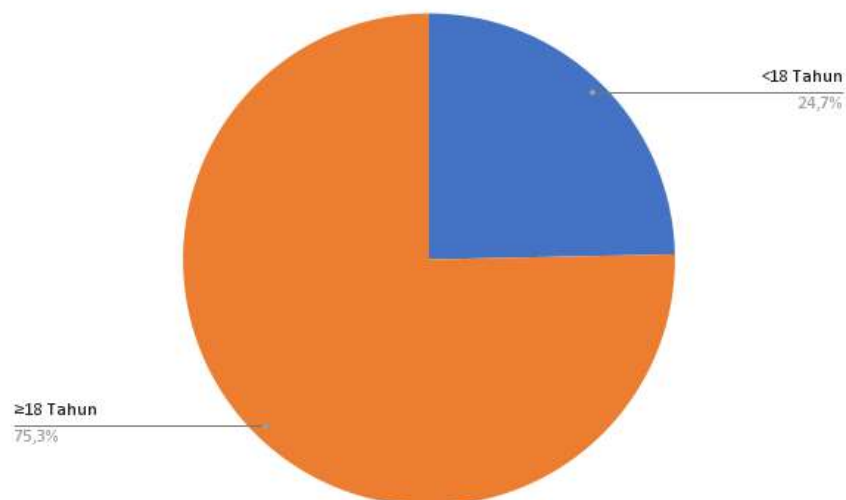


Diagram 4.3. Persentase Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Umur Kota Yogyakarta tahun 2022
Sumber: SIGA Data Perlindungan DIY

2. Korban Kekerasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut adalah jumlah korban kekerasan berdasarkan tingkat pendidikan yang terjadi di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 dan sebarannya di setiap kemantren.

KEMANTREN	TIDAK SEKOLAH	TIDAK LULUS SD	BELUM TAMAT SD	TAMAT SD	TAMAT SLTP	TAMAT SLTA	TAMAT DIPLOMA	TAMAT S1	TAMAT S2	TAMAT S3	JUMLAH
TEGALREJO	1	0	2	3	5	9	0	3	0	0	23
JETIS	0	0	6	1	3	6	0	2	0	0	18
GONDOKUSUMAN	0	0	1	2	3	19	3	3	0	0	31
DANUREJAN	0	0	1	2	2	4	1	1	0	0	11
NGAMPILAN	0	0	0	3	0	2	1	0	0	0	6
GEDONGTENGEN	0	0	1	0	3	4	1	0	0	0	9
KRATON	0	0	1	0	2	10	1	0	0	0	14
PAKUALAMAN	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	7
MANTRIJERON	0	0	1	2	3	2	0	2	0	0	10
GANDOMANAN	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	4
WIROBRAJAN	0	0	3	1	1	6	2	1	0	0	14
MERGANGSAN	1	0	3	1	3	4	0	0	0	0	12
UMBULHARJO	0	0	2	3	3	30	2	7	1	0	48
KOTAGEDE	0	0	2	1	4	4	2	2	1	0	16
JUMLAH	2	0	23	21	34	106	13	21	3	0	223

Tabel 4.3. Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Kemantren dan Jenjang Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sumber: SIGA Data Perlindungan DIY

Di tahun 2022 tingkat pendidikan korban kekerasan paling banyak adalah Tamat SLTA, yaitu sejumlah 106 orang atau 47.5%.

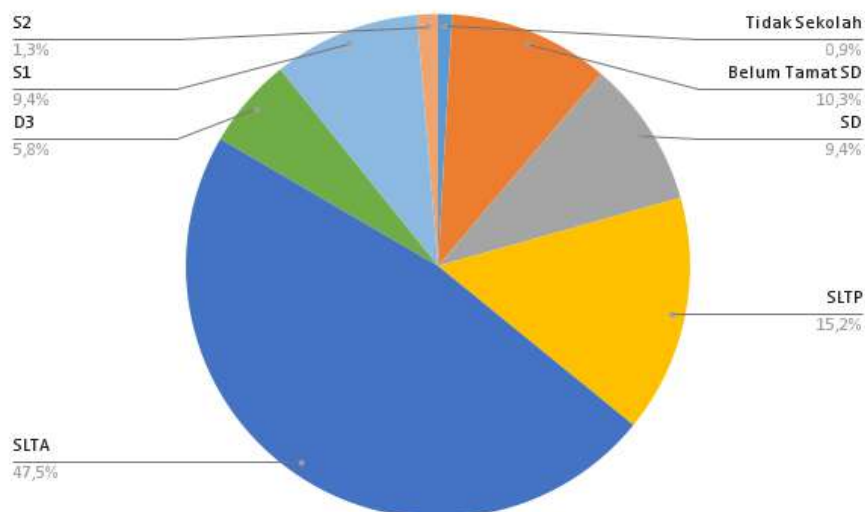


Diagram 4.4. Persentase Korban Kekerasan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2022

Sumber: SIGA Data Perlindungan DIY

3. Korban Kekerasan Berdasarkan Hubungannya dengan Korban

Berikut adalah jumlah kekerasan berdasarkan hubungannya dengan korban yang terjadi di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 dan sebarannya di setiap kemantren.

KEMANTREN	HUBUNGAN DENGAN KORBAN					JUMLAH
	SUAMI/ISTRI	ORANG TUA	KELUARGA	PACAR	LAINNYA	
TEGALREJO	9	1	0	3	10	23
JETIS	7	2	1	0	8	18
GONDOKUSUMAN	15	1	0	3	12	31
DANUREJAN	4	1	1	2	3	11
NGAMPILAN	3	0	0	0	2	5
GEDONGTENGEN	3	0	0	0	7	10
KRATON	11	0	0	0	2	13
PAKUALAMAN	6	0	0	0	1	7
MANTRIJERON	4	2	0	1	3	10
GONDONANAN	4	0	0	0	0	4
WIROBRAJAN	7	2	2	1	2	14
MERGANGSAN	4	1	0	1	6	12
UMBULHARJO	26	4	4	0	15	49
KOTAGEDE	11	1	0	0	4	16
JUMLAH	114	15	8	11	75	223

Tabel 4.4. Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Kemantren dan Hubungan dengan Pelaku Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sumber: SIGA Data Perlindungan DIY

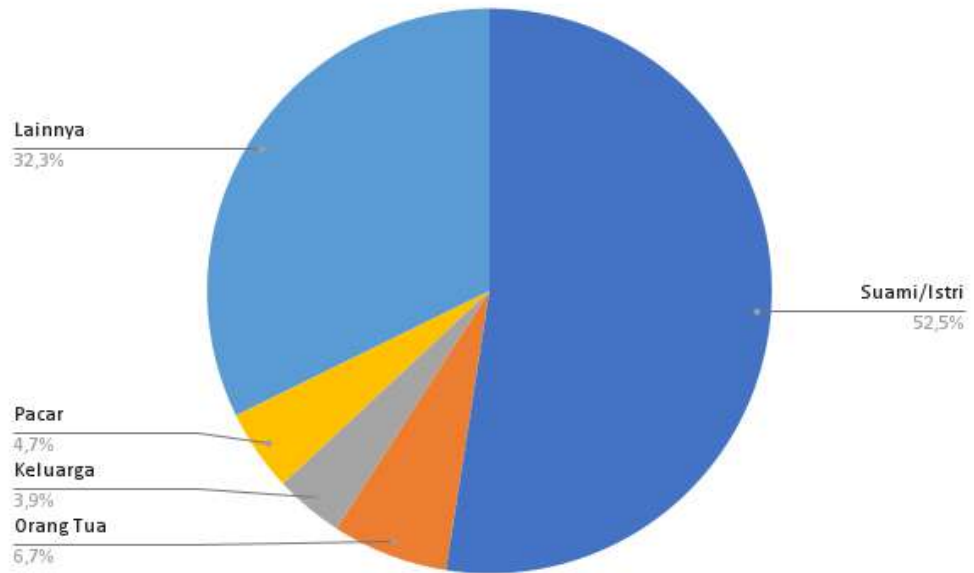


Diagram 4.5. Persentase Korban Kekerasan Berdasarkan Hubungan dengan Korban Kota Yogyakarta tahun 2022

Sumber: SIGA Data Perlindungan DIY

Suami/Istri yang notabene adalah pasangan dan menjadi orang terdekat dari korban justru menjadi pelaku yang paling banyak melakukan kekerasan di tahun 2022. Dari keseluruhan korban kekerasan oleh suami/istri, korban didominasi oleh perempuan. Artinya perempuan masih rawan menjadi korban di dalam ranah rumah tangga. Banyak faktor yang menjadi pemicunya, mulai dari kurangnya assessment pranikah sehingga mempengaruhi mental dan kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, hingga faktor ekonomi. Oleh karena itu, pencegahan berupa assessment dan pembinaan calon pengantin bisa menjadi solusi yang dapat dilakukan.

4. Korban Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan

Bentuk kekerasan dibagi menjadi beberapa. Di SIGA terbagi menjadi 8 (delapan) bentuk, diantaranya: kekerasan fisik, psikis, perkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, penelantaran, eksploitasi dan *trafficking*. Lalu berikut adalah jumlah korban kekerasan berdasarkan bentuk kekerasan yang dialami di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 dan sebarannya di setiap kemantren.

KEMANTREN	FISIK	PSIKIS	PERKOSAAN	PELECEHAN SEKSUAL	PENCABULAN	PENELANTARAN	EKSPLOITASI	TRAFFICKING	JUMLAH
TEGALREJO	8	7	0	6	1	0	0	0	22
JETIS	5	6	0	2	5	0	0	0	18
GONDOKUSUMAN	6	17	1	5	2	0	0	0	31
DANUREJAN	8	4	0	0	0	0	0	0	12
NGAMPILAN	4	0	0	1	1	0	0	0	6
GEDONGTENGEN	1	7	0	1	1	0	0	0	10
KRATON	7	5	0	0	1	0	0	0	13
PAKUALAMAN	1	6	0	0	0	0	0	0	7
MANTRIJERON	3	5	0	1	1	0	0	0	10
GANDOMANAN	2	2	0	0	0	0	0	0	4
WIROBRAJAN	5	9	0	0	0	0	0	0	14
MERGANGSAN	4	4	1	3	0	0	0	0	12
UMBULHARJO	15	27	1	2	3	0	0	0	48
KOTAGEDE	2	13	0	1	0	0	0	0	16
JUMLAH	71	112	3	22	15	0	0	0	223

Tabel 4.5. Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Kemantren dan Bentuk Kekerasan Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sumber: SIGA Data Perlindungan DIY

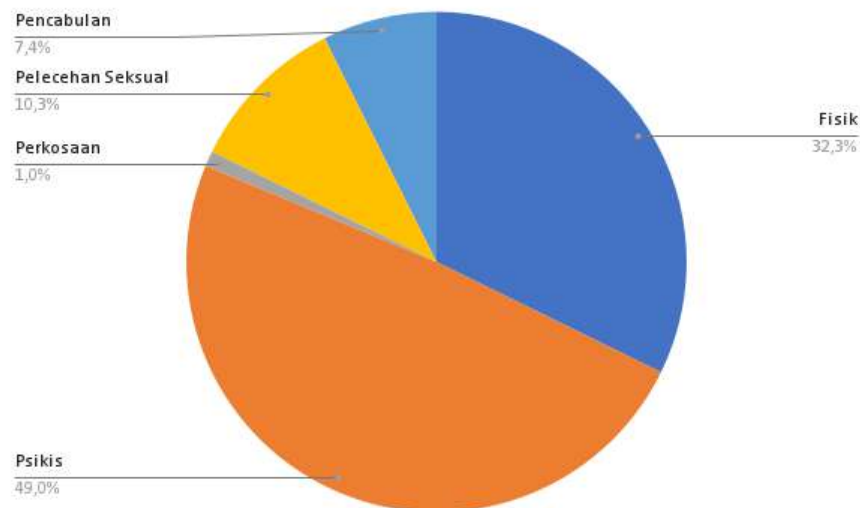


Diagram 4.6. Persentase Korban Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan Kota Yogyakarta tahun 2022

Sumber: SIGA Data Perlindungan DIY

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) merupakan sebuah fenomena gunung es. Kasus yang terdata dan dilaporkan hanya sebagian kecil dari kasus yang benar-benar terjadi di masyarakat. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di ranah rumah tangga (KDRT) dan ranah publik, memiliki spektrum yang semakin luas dengan modus yang semakin beragam.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Bulan Mei 2022 silam, tentunya ini akan mempengaruhi cara pendataan karena keberadaan jenis-jenis kekerasan seksual yang sebelumnya tidak dikenali dalam sistem hukum di Indonesia kini tercantum jelas di dalam UU TPKS. Kendati demikian angka korban pelecehan seksual di Kota Yogyakarta di Tahun 2022 menunjukkan penurunan sebesar 58% dari tahun sebelumnya. Kekerasan psikis tetap menjadi kasus dengan korban terbanyak di Tahun 2022, bahkan terjadi penambahan sebanyak 11 korban.

5. Korban Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian

Kekerasan bisa terjadi dimanapun, dari rumah sendiri hingga tempat yang asing bagi korban. Maka berikut adalah jumlah korban kekerasan berdasarkan tempat kejadian yang terjadi di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 dan sebarannya di setiap kemantren.

KEMANTREN	RUMAH KORBAN	RUMAH PELAKU	TEMPAT KERJA	SEKOLAH	RUMAH KOST	HOTEL/TEMPAT WISATA	TEMPAT UMUM	JUMLAH
TEGALREJO	10	2	0	1	1	1	8	23
JETIS	7	7	0	0	0	0	4	18
GONDOKUSUMAN	14	8	0	0	0	0	9	31
DANUREJAN	4	5	0	0	1	0	1	11
NGAMPILAN	1	2	0	0	0	0	3	6
GEDONGTENGEN	4	4	0	0	0	0	2	10
KRATON	6	6	0	0	0	0	1	13
PAKUALAMAN	3	3	0	0	0	0	1	7
MANTRIJERON	4	3	0	0	1	0	2	10
GANDOMANAN	2	2	0	0	0	0	0	4
WIROBRAJAN	2	10	0	0	0	0	2	14
MERGANGSAN	2	5	0	0	0	0	5	12
UMBULHARJO	24	14	0	1	1	0	8	48
KOTAGEDE	8	5	0	1	0	0	2	16
JUMLAH	91	76	0	3	4	1	48	223

Tabel 4.6. Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Kemantren dan Tempat Kejadian Kota Yogyakarta Tahun 2022
Sumber: SIGA Data Perlindungan DIY

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa rumah korban menjadi tempat kejadian kekerasan paling banyak sepanjang tahun 2022, yaitu sebesar 41%. Hal ini menunjukkan bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung paling aman, justru menjadi yang paling tidak aman bagi korban kekerasan. Agar rumah menjadi tempat yang aman, maka peran dari masing-masing anggota keluarga untuk saling menjaga dan melindungi merupakan hal yang wajib dilakukan. Diantaranya adalah orang tua menjalankan 8 fungsi keluarga, memberikan contoh dan menjadi panutan bagi anak-anaknya. Orang tua yang harmonis akan berdampak pada kondisi anak yang menjadi penyayang dan terlindungi. Sehingga akan meminimalisir orang tua maupun anak menjadi korban maupun pelaku kekerasan.

Perlu menjadi perhatian pula bahwa kekerasan di tempat umum juga cukup banyak, dengan persentase sebesar 21.5%. Tentu saja hal ini tidak baik bagi citra Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata. Wisatawan akan berpikir berulang kali jika tujuan wisatanya merupakan tempat yang tidak aman dan rawan kekerasan. Selain ditinjau dari aspek pariwisata, lingkungan yang tidak aman juga akan mengganggu masyarakat dalam menjalankan pekerjaan dan perannya sehari-hari.

6. Pelayanan yang Diberikan Kepada Para Korban Kekerasan

Hak korban KDRT diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Lalu untuk korban kekerasan seksual diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dan korban kekerasan terhadap anak diatur dalam UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak perlindungan bagi korban kekerasan diantaranya adalah diberikan pelayanan/penanganan, baik berupa konseling, shelter, penanganan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial maupun penanganan pengaduan. Berikut adalah rekapitulasi jumlah korban kekerasan berdasarkan layanan yang telah diberikan.

KEMANTREN	KONSELING	SHELTER	KESEHATAN	HUKUM	REHABILITASI SOSIAL	REINTEGRASI SOSIAL	PENANGANAN PENGADUAN	JUMLAH
TEGALREJO	16	0	5	2	0	0	0	23
JETIS	14	0	1	3	0	0	0	18
GONDOKUSUMAN	27	0	1	3	0	0	0	31
DANUREJAN	7	0	3	1	0	0	0	11
NGAMPILAN	4	0	2	0	0	0	0	6
GEDONGTENGEN	9	0	0	1	0	0	0	10
KRATON	10	0	0	3	0	0	0	13
PAKUALAMAN	6	0	0	1	0	0	0	7
MANTRIJERON	8	0	1	1	0	0	0	10
GONDONANAN	2	0	1	1	0	0	0	4
WIROBRAJAN	12	0	1	0	0	0	1	14
MERGANGSAN	11	0	0	1	0	0	0	12
UMBULHARJO	39	0	1	5	0	0	3	48
KOTAGEDE	13	0	0	3	0	0	0	16
JUMLAH	178	0	16	25	0	0	4	223

Tabel 4.7. Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Kemantren dan Pelayanan yang Diberikan Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sumber: SIGA Data Perlindungan DIY

Pelayanan yang paling banyak diberikan di tahun 2022 adalah berupa konseling, yang mencapai 80%. Kesehatan 7.2%; bantuan dan penanganan hukum 11%; dan penanganan pengaduan sebesar 1.8%. Perlu menjadi perhatian adalah bahwa rendahnya layanan yang berupa penanganan hukum dikarenakan korban memilih untuk tidak memperkarakan kasusnya lebih lanjut. Hal ini tidak terlepas dari kondisi psikologis korban yang kebanyakan masih trauma dan tidak

ingin memperpanjang atau mengingat kembali hal-hal yang traumatis di hidup mereka.

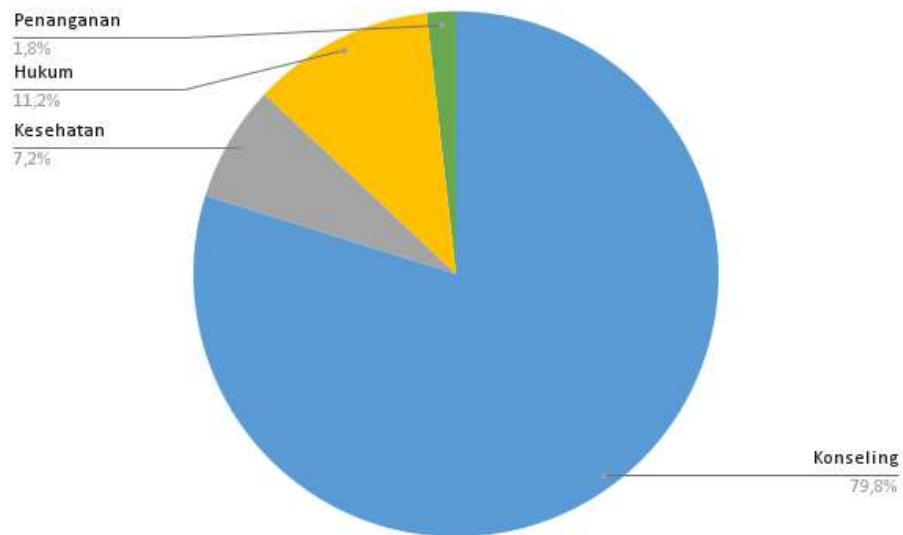


Diagram 4.7. Persentase Korban Kekerasan Berdasarkan Pelayanan yang Diberikan Kota Yogyakarta tahun 2022
Sumber: SIGA Data Perlindungan DIY

7. Korban Kekerasan Berdasarkan Kategori KDRT, Jenis Kelamin dan Usia

KDRT menurut UU PKDRT No 23 Tahun 2004 adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal 2 UU PKDRT menegaskan bahwa ruang lingkup dari undang-undang ini tidak hanya terhadap perempuan, tapi pihak-pihak sebagaimana di bawah ini:

- Suami, istri, dan anak;
- Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut.

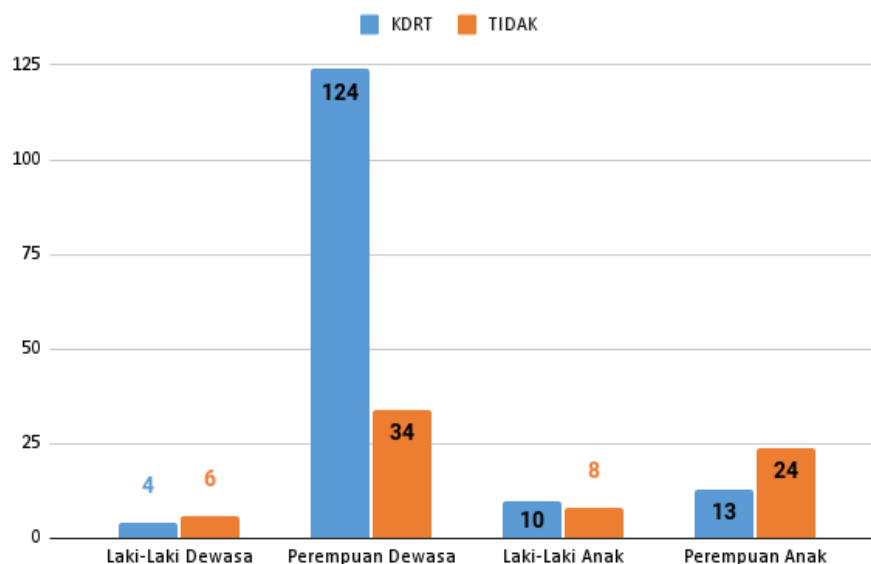


Diagram 4.8. Persentase Korban Kekerasan Berdasarkan Kategori KDRT dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta tahun 2022
 Sumber: SIGA Data Perlindungan DIY

B. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak di Kota Yogyakarta

Menurut UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 13 menyebutkan: Kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking jual beli anak.

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak diantaranya yaitu: Kekerasan fisik, Kekerasan psikis/emosi, Kekerasan seksual, Kekerasan sosial (penterlantaran). Kekerasan fisik yang dialami anak, akan mempengaruhi jiwanya. Demikian juga kekerasan psikis anak, akan mempengaruhi perkembangan tubuhnya. Apalagi kekerasan seksual, akan mengakibatkan kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis. Dalam kebanyakan kasus, anak-anak yang mendapat kekerasan lebih menderita secara mental. Konsekuensi dari kekerasan terhadap anak bervariasi tergantung pada jenis kekerasan dan keparahannya, kekerasan yang dialami oleh anak akan mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan fisik anak.

Perlindungan hukum sangat penting bagi perempuan dalam relasi mereka di dalam dan luar rumah. Berikut kami sajikan data kekerasan terhadap anak di Kota Yogyakarta pada Tahun 2022.

LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
18	37	55

Tabel 4.8. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta Tahun 2022

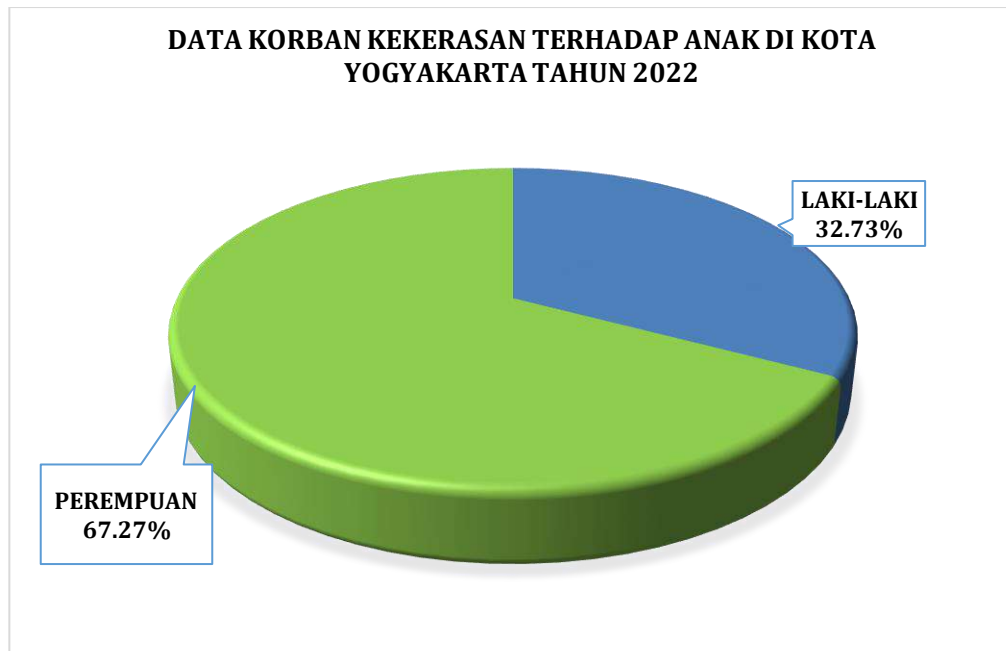


Diagram 4.9. Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sumber : Data SIGA DP3AP2 DIY, 2022

Jumlah korban kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 mencapai 55 kasus angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 61 kasus. Masih sama seperti tahun sebelumnya berdasarkan jenis kelamin, jumlah korban perempuan lebih banyak bila dibandingkan dengan korban laki-laki. Korban yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 18 atau 32.73% angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya dimana tahun sebelumnya hanyalah 7 korban dari keseluruhan sedangkan korban berjenis kelamin perempuan mencapai 37 korban atau 67.27%. Perbandingannya adalah 67.27 % dibandingkan 32.73%. Perbandingan ini dapat menunjukkan adanya peran isu gender dalam kekerasan terhadap anak. Perempuan ditempatkan dalam kondisi yang lebih lemah dan lebih mungkin menjadi korban kekerasan.

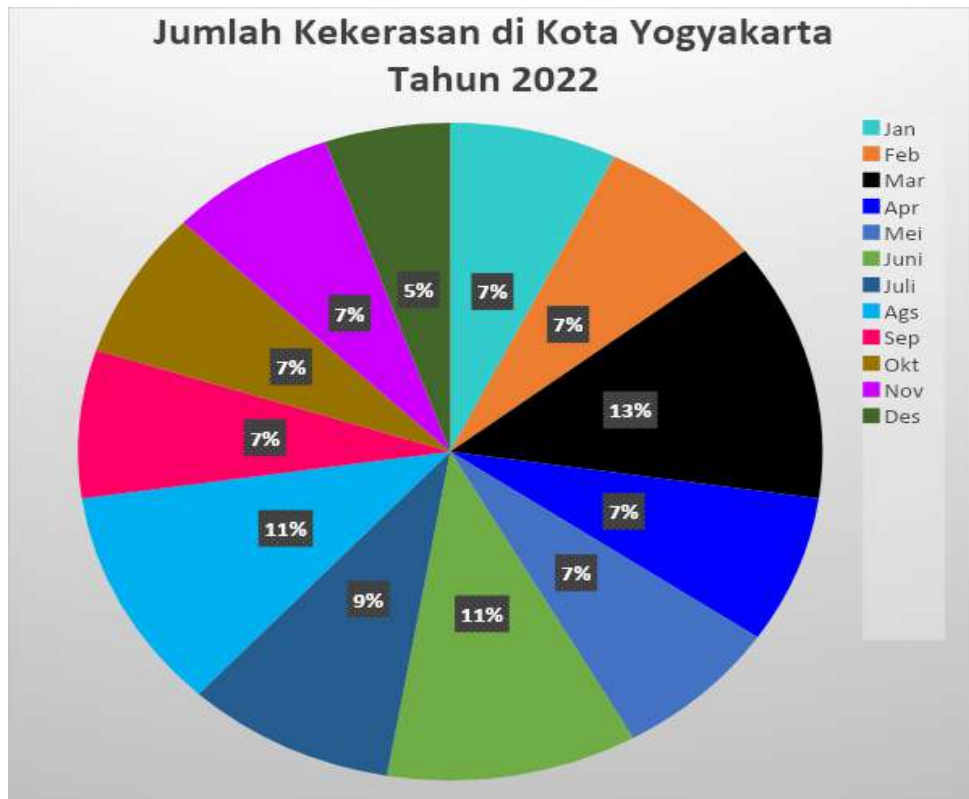


Diagram 4.10. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Per Bulan Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sumber : Data SIGA DP3AP2 Prov DIY, 2022

Perkembangan kasus kekerasan anak dari bulan ke bulan dapat dilihat seperti di atas. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang paling banyak, terjadi pada bulan Maret (hampir mencapai 13%) dan paling sedikit terjadi pada bulan Desember. Apabila dilihat lebih rinci jumlah korban kekerasan pada anak akan terurai bulan Januari terdapat 4 kasus, bulan Februari 4 kasus, bulan Maret 7 kasus, bulan April ada 4 kasus, bulan Mei ada 4 kasus, bulan Juni 6 kasus, bulan Juli 5 kasus, bulan Agustus 6 kasus, bulan September 4 kasus, bulan Oktober 4 kasus, bulan November 4 kasus dan bulan Desember 3 kasus.

NO	KEMANTREN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	TEGALREJO	2	5	7
2	JETIS	1	8	9
3	GONDOKUSUMAN	1	4	5
4	DANUREJAN	1	0	1
5	NGAMPILAN	0	1	1
6	GEDONGTENGEN	0	3	3
7	KRATON	0	2	2
8	PAKUALAMAN	1	0	1
9	MANTRIJERON	2	2	4
10	GANDOMANAN	0	0	0
11	WIROBRAJAN	1	4	5
12	MERGANGSAN	4	2	6

13	UMBULHARJO	4	3	7
14	KOTAGEDE	1	3	4
	JUMLAH	18	37	55

Tabel 4.9. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kemantren dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2022
Sumber : Data SIGA DP3AP2 DIY, 2022

Dari 14 Kemantren di Kota Yogyakarta tiga kemantren dengan jumlah korban kekerasan anak paling banyak yaitu Kemantren Jetis dengan jumlah korban ada 9, diikuti oleh Kemantren Tegalrejo dengan jumlah korban ada 7, selanjutnya adalah Kemantren Umbulharjo dengan jumlah korban ada 7. Sedangkan selama 1 tahun ini ada 1 Kemantren yang sama sekali tidak terjadi kasus kekerasan anak yaitu Kemantren Gondomanan. Diharapkan Kemantren yang lain dapat seperti Kemantren Gondomanan yang zero kasus angka kekerasan. Kasus kekerasan terhadap anak laki-laki terjadi di 10 Kemantren, 4 Kemantren yang tidak yaitu Kemantren Ngampilan, Ngampilan, kraton serta Gondomanan.

1. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kelompok Umur

KEMANTREN	KELOMPOK UMUR			JUMLAH
	0 - 5 TH	6 - 10 TH	11 - 17 TH	
TEGALREJO	0	0	7	7
JETIS	0	4	5	9
GONDOKUSUMAN	0	1	4	5
DANUREJAN	0	1	0	1
NGAMPILAN	0	0	1	1
GEDONGTENGEN	1	1	1	3
KRATON	0	0	2	2
PAKUALAMAN	0	0	1	1
MANTRIJERON	0	1	3	4
GANDOMANAN	0	0	0	0
WIROBRAJAN	2	1	2	5
MERGANGSAN	0	3	3	6
UMBULHARJO	0	0	7	7
KOTAGEDE	0	2	2	4
JUMLAH	3	14	38	55

Tabel 4.10. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kemantren dan Kelompok Umur Kota Yogyakarta Tahun 2022
Sumber : Data SIGA DP3AP2 DIY, 2022

Jumlah korban kekerasan terhadap anak terbagi dalam 3 kelompok umur yakni, 0 -5 th, 6 – 10 th dan 11 – 17 th. 69.09% kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada kelompok umur 11 hingga 17 tahun yang tersebar di 12 Kemantren. Kekerasan terhadap anak usia 0 sampai 5 tahun hanya terjadi di Kemantren Gedongtengen yang terjadi pada bulan Januari dan Kemantren Wirobrajan yang terjadi pada bulan Februari. Korban kekerasan yang berusia balita berpotensi untuk mengalami akibat yang panjang secara psikis dari kekerasan yang dialaminya. Hal ini mengharuskan adanya upaya pendampingan yang lama dan berlangsung terus menerus.

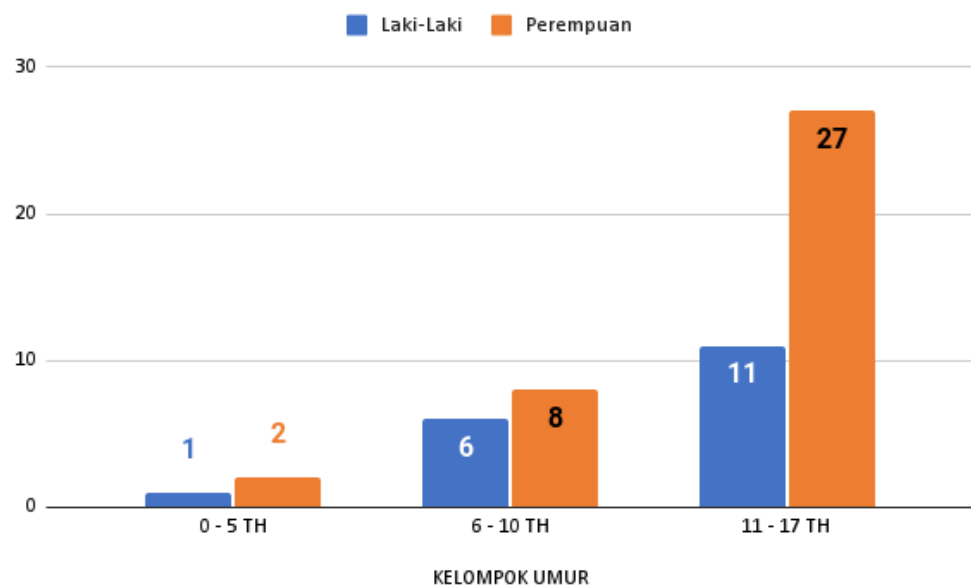


Diagram 4.11. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2022
Sumber : Data SIGA DP3AP2 DIY, 2022

Berdasarkan kelompok usia, kasus kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi pada kelompok umur 11-17 th yang jumlahnya mencapai 38 orang (69.09%). Adapun mereka yang berusia 6 sd 10 tahun berjumlah 14 korban atau sekitar 25.45%. Di Kota Yogyakarta masih terdapat kekerasan terhadap anak balita sebesar 5.46%. Apabila dicermati dari masing-masing kelompok umur korban terhadap anak perempuan selalu lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki.

2. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan

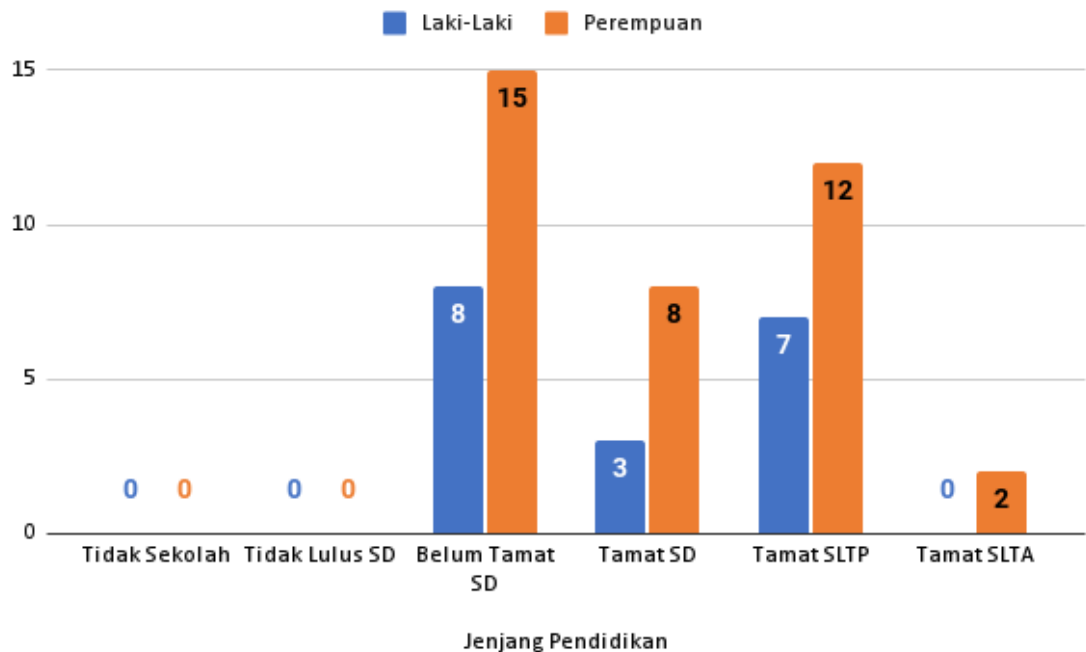


Diagram 4.12. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sumber : Data SIGA DP3AP2 DIY, 2022

Menurut data pilah diatas, untuk kekerasan terhadap anak berdasarkan tingkat pendidikannya kekerasan terbanyak terdapat pada tingkat pendidikan belum tamat SD yang mencapai 41.82% (23 orang yang terdiri dari perempuan 15 orang dan laki-laki 8 orang) disusul mereka yang tamat SLTP sebesar 34.54% (19 orang).

Korban kekerasan dalam usia belum tamat SD ini juga memberikan dampak pada perlunya kebijakan-kebijakan pemenuhan hak Pendidikan bagi anak yang mengalami kekerasan. Beberapa kasus anak mengalami kekerasan seksual berakibat pada kehamilan tak dikehendaki yang menjadikannya tidak dapat melanjutkan Pendidikan formalnya. Tanpa kebijakan yang berpihak pada anak maka hak Pendidikan anak akan tak terpenuhi. Dampak kekerasan pada anak dapat mengganggu perkembangan otak dan merusak sistem saraf. Akibatnya, hal ini berpengaruh terhadap kemampuan kognitif anak sehingga prestasinya dalam bidang akademik dan kejuruan rendah.

NO	KEMANTREN	JENJANG PENDIDIKAN						JUMLAH
		Tidak Sekolah	Tidak Lulus SD	Belum Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	
1	TEGALREJO	0	0	2	2	3	0	7
2	JETIS	0	0	6	1	2	0	9
3	GONDOKUSUMAN	0	0	1	1	2	1	5
4	DANUREJAN	0	0	1	0	0	0	1
5	NGAMPILAN	0	0	0	1	0	0	1
6	GEDONGTENGEN	0	0	2	0	1	0	3
7	KRATON	0	0	0	0	2	0	2
8	PAKUALAMAN	0	0	0	0	1	0	1
9	MANTRIJERON	0	0	1	2	1	0	4
10	GANDOMANAN	0	0	0	0	0	0	0
11	WIROBRAJAN	0	0	3	1	1	0	5
12	MERGANGSAN	0	0	3	1	2	0	6
13	UMBULHARJO	0	0	2	1	3	1	7
14	KOTAGEDE	0	0	2	1	1	0	4
	JUMLAH	0	0	23	11	19	2	55

Tabel 4.11. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kemantren dan Jenjang Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sumber : Data SIGA DP3AP2 DIY, 2022

Korban kekerasan dengan tingkat Pendidikan belum tamat SD paling banyak berasal dari Kemantren Jetis yaitu 10.91% (6 kasus), sedangkan korban dengan jenjang Pendidikan Tamat SLTP paling banyak berasal dari Kemantren Tegalrejo dan Umbulharjo masing-masing sebesar 5.45% (3 kasus).

3. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Hubungan dengan Korban

Anak yang pernah menjadi korban kekerasan akan lebih sulit percaya pada orang, termasuk pada orangtuanya sendiri. Hal ini juga dapat menyebabkan anak kesulitan dalam menjalin hubungan, atau bahkan menciptakan hubungan yang tidak sehat di masa depan.

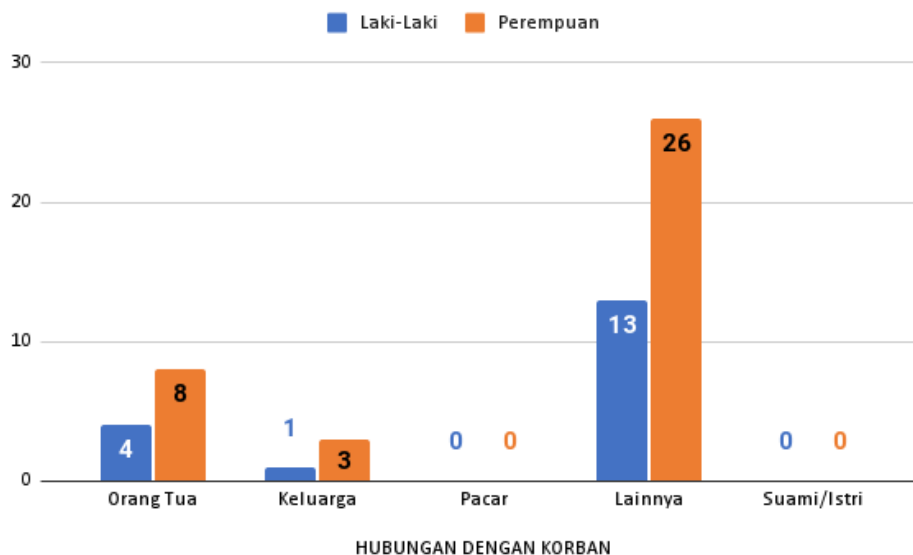


Diagram 4.13. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Hubungan dengan Korban dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2022
 Sumber : Data SIGA DP3AP2 DIY, 2022

Pada umumnya pelaku kekerasan pada anak merupakan anggota keluarga atau orang lain yang dekat dengan keluarga. Menurut data diatas berdasarkan hubungannya dengan korban, pelaku kekerasan anak di Kota Yogyakarta yang paling dominan adalah orang lain. Ini menandakan bahwa lingkungan di sekitar kita sudah tidak aman dan nyaman.

KEMANTREN	HUBUNGAN DENGAN KORBAN					JUMLAH
	Orang Tua	Keluarga	Pacar	Lainnya	Suami/Istri	
TEGALREJO	0	0	0	7	0	7
JETIS	2	1	0	6	0	9
GONDOKUSUMAN	1	0	0	4	0	5
DANUREJAN	1	0	0	0	0	1
NGAMPILAN	0	0	0	1	0	1
GEDONGTENGEN	0	0	0	3	0	3
KRATON	0	0	0	2	0	2

PAKUALAMAN	0	0	0	1	0	1
MANTRIJERON	2	0	0	2	0	4
GONDONANAN	0	0	0	0	0	0
WIROBRAJAN	2	2	0	1	0	5
MERGANGSAN	1	0	0	5	0	6
UMBULHARJO	2	1	0	4	0	7
KOTAGEDE	1	0	0	3	0	4
JUMLAH	12	4	0	39	0	55

Tabel 4.12. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kemantren dan Hubungan dengan Korban Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sumber : Data SIGA DP3AP2 DIY, 2022

Dari 14 Kemantren yang ada di kota Yogyakarta, ada 8 Kemantren yang pelaku kekerasannya adalah orang tua, yaitu Kemantren Jetis, Gondokusuman, Danurejan, Mantrijeron, Wirobrajan, Mergangsan, Umbulharjo dan Kotagede. Dengan adanya hubungan antara korban dengan pelaku adalah orang tua ataupun keluarga ini menandakan bahwa lingkungan yang seharusnya memberikan perlindungan, lingkungan yang seharusnya aman dan nyaman ternyata berlaku sebaliknya. Diharapkan 8 Kemantren yang masih menjadi pelaku kekerasan dimana hubungannya dengan korban adalah orang tua ataupun keluarga bisa zero (0).

4. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Bentuk Kekerasan

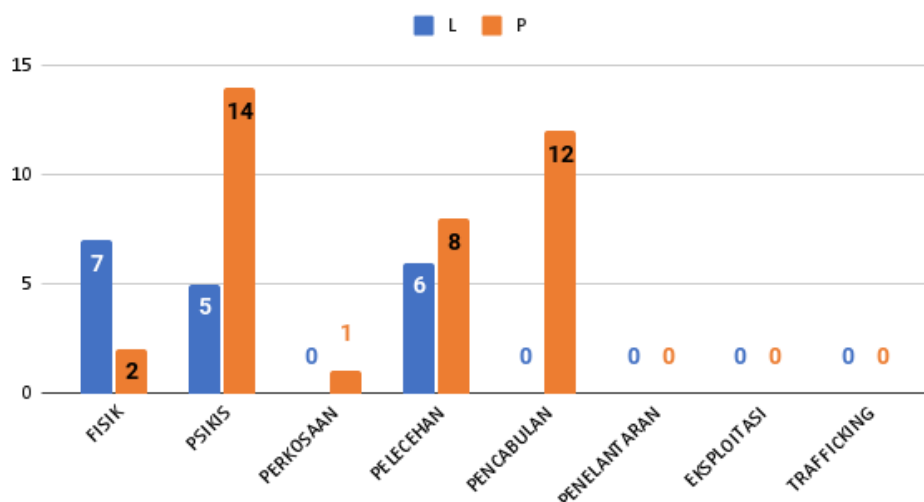


Diagram 4.14. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Bentuk Kekerasan dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sumber : Data SIGA DP3AP2 DIY, 2022

Dari delapan kategori kasus kekerasan, jenis kekerasan berupa fisik, psikis, perkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan selalu dialami oleh anak-anak

perempuan. Sedangkan anak laki-laki mengalami kekerasan dalam bentuk fisik, psikis dan pelecehan seksual. Bentuk kekerasan yang paling dominan terjadi pada anak – anak di tahun 2022 adalah kekerasan dalam bentuk psikis, dimana prosentasenya sebesar 34.54% (19 anak, perempuan 14 dan laki-laki 5). Kekerasan psikologis menurut UU KDRT mencakup tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, perendahan dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, isolasi sosial, penguntitan dan atau kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis dan mengakibatkan penderitaan fisik. Bentuk kekerasan ini sangat sulit untuk dideteksi sebab tidak meninggalkan bekas yang kasat mata seperti pada kekerasan fisik. Akan tetapi, dampak dari kekerasan ini justru sulit untuk disembuhkan karena menyerang kondisi psikologis korban.

Tertinggi berikutnya adalah pelecehan seksual sebesar 25.45% (14 kasus). Tingginya jenis kekerasan seksual, menunjukkan adanya potensi kerawanan yang besar bagi anak di Kota Yogyakarta. Salah satu yang menjadi isu utama adalah kasus-kasus kekerasan seksual yang berakhir dengan terjadinya kehamilan tidak dikehendaki. Kasus kehamilan tidak dikehendaki ini kemudian membawa banyak masalah ikutan Antara lain munculnya praktik perkawinan usia anak bagi mereka yang telah hamil terlebih dahulu, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan berupa pencabulan juga cukup banyak terjadi, paling tidak terdapat 12 kasus kekerasan pencabulan yang dilaporkan sepanjang tahun tersebut yang terdiri dari anak perempuan semua. Bentuk kekerasan selanjutnya yang kerap dialami korban adalah kekerasan Fisik. Sebanyak 9 korban (16.36%) yang terdiri dari perempuan 2 orang dan laki-laki 7 orang. Kekerasan fisik ini bisa dikarenakan oleh perkelahian anak-anak.

NO	KEMANTREN	BENTUK KEKERASAN								JUMLAH
		FISIK	PSIKIS	PERKOSAAN	PELECEHAN SEKSUAL	PENCABULAN	PENELANTARAN	EKSPLOITASI	TRAFFICKING	
1	TR	2	1	0	3	1	0	0	0	7
2	JT	0	2	0	2	5	0	0	0	9
3	GK	0	1	1	2	1	0	0	0	5
4	DN	1	0	0	0	0	0	0	0	1
5	NG	0	0	0	0	1	0	0	0	1
6	GT	0	1	0	1	1	0	0	0	3
7	KT	0	1	0	0	1	0	0	0	2
8	PA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
9	MJ	1	2	0	1	0	0	0	0	4
10	GM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	WB	1	4	0	0	0	0	0	0	5
12	MG	1	2	0	3	0	0	0	0	6
13	UH	2	2	0	2	2	0	0	0	8
14	KG	1	2	0	0	0	0	0	0	3
	JUMLAH	9	19	1	14	12	0	0	0	55

Tabel 4.12. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kemantren dan Hubungan dengan Korban Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sumber : Data SIGA DP3AP2 DIY, 2022

Dari beberapa jenis kekerasan yang terjadi di tiap-tiap Kemantren, kekerasan berupa psikis dan pelecehan seksual paling banyak terjadi. Dimana kekerasan berupa psikis paling banyak terjadi di Kemantren Wirobrajan (7.27%) dan kekerasan berupa pelecehan seksual paling banyak terjadi di Kemantren Tegalrejo dan Mergangsan masing-masing sebesar 5.45% (3 kasus) . Pada tahun 2022 untuk kasus kekerasan berupa penelantaran, Trafficking dan eksploitasi zero kasus. Diharapkan untuk tahun-tahun yang akan dapat tetap bisa zero kasus.

5. Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Tempat Kejadian

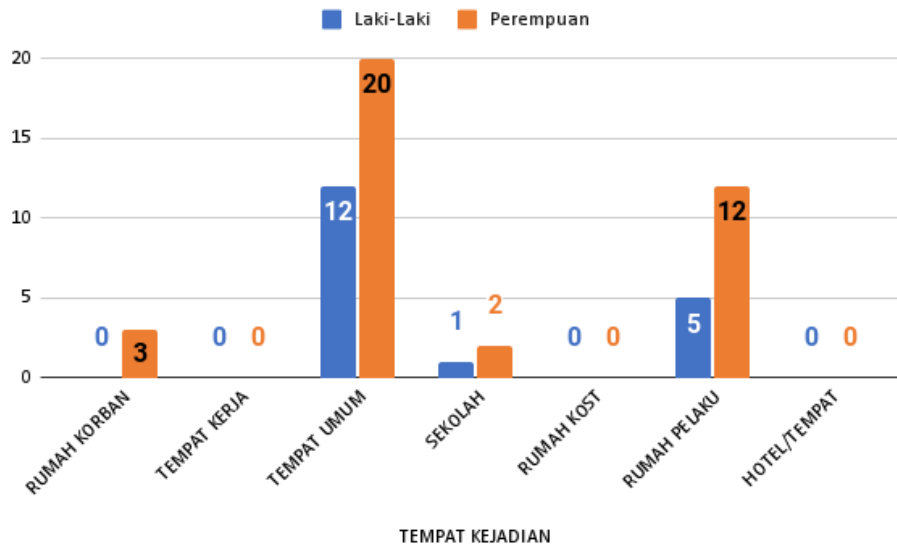


Diagram 4.15. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Tempat Kejadian dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sumber : Data SIGA DP3AP2 DIY, 2022

Adapun jumlah kasus berdasarkan *locus* kejadian meliputi, di lingkup rumah korban ada 3 kasus, di rumah pelaku ada 17 kasus dan tempat umum ada 32 kasus. Lembaga pendidikan juga tidak luput dari tempat kejadian, yaitu ada 3 kasus yang terjadi di sekolah. Sejalan dengan jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian, dimana kasus tertinggi berada di wilayah Tempat Umum, dan kedua paling banyak berada di rumah pelaku. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja. Apabila dilihat dari tempat kejadiannya tampak bahwa tempat kejadian kasus kekerasan terhadap anak didominasi oleh kekerasan yang terjadi di tempat umum yang mencapai 58,18%. Urutan kedua kekerasan banyak dilakukan di rumah pelaku dimana persentasenya mencapai 30,09%. Seharusnya tempat-tempat ini aman bagi anak-anak tetapi malah banyak menjadi lokus kejadian.

KEMANTREN	TEMPAT KEJADIAN							JUMLAH
	RUMAH KORBAN	RUMAH PELAKU	TEMPAT KERJA	SEKOLAH	RUMAH KOST	HOTEL/ TEMPAT WISATA	TEMPAT UMUM	
TEGALREJO	0	0	0	1	0	0	6	7
JETIS	0	5	0	0	0	0	4	9
GONDOKUSUMAN	0	1	0	0	0	0	4	5
DANUREJAN	0	1	0	0	0	0	0	1
NGAMPILAN	0	0	0	0	0	0	1	1
GEDONGTENGEN	0	1	0	0	0	0	2	3
KRATON	1	0	0	0	0	0	1	2
PAKUALAMAN	0	0	0	0	0	0	1	1
MANTRIJERON	0	2	0	0	0	0	2	4
GONDOMANAN	0	0	0	0	0	0	0	0
WIROBRAJAN	0	4	0	0	0	0	1	5
MERGANGSAN	0	1	0	0	0	0	5	6
UMBULHARJO	2	1	0	1	0	0	3	7
KOTAGEDE	0	1	0	1	0	0	2	4
JUMLAH	3	17	0	3	0	0	32	55

Tabel 4.13. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kemantren dan Tempat Kejadian Korban Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sumber : Data SIGA DP3AP2 DIY, 2022

Kemantren yang paling tinggi kasus kekerasan pada anak adalah Kemantren Jetis dengan lokasi kejadian paling banyak adalah rumah pelaku. Banyaknya kekerasan pada anak yang terjadi di rumah akan berdampak buruk pada masa depan anak-anak sebab anak-anak tidak memiliki tempat bertumbuh yang baik.

6. Pelayanan yang Diberikan Kepada Para Korban Kekerasan terhadap Anak

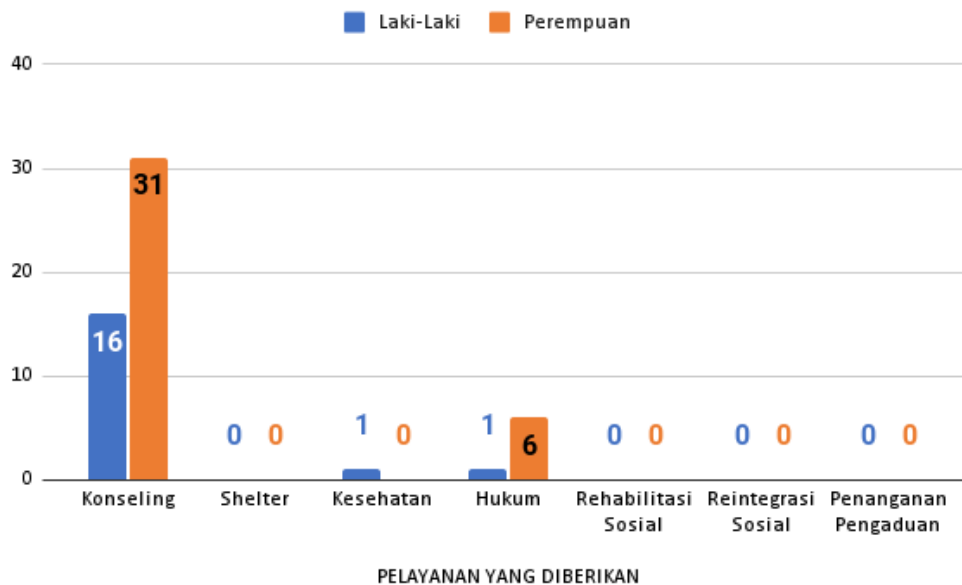


Diagram 4.16. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Pelayanan yang Diberikan dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2022
 Sumber : Data SIGA DP3AP2 DIY, 2022

Kekerasan terhadap anak mempunyai dampak yang sangat luas dan panjang. Anak korban kekerasan akan membawa trauma selama hidupnya. Di sisi lain korban kekerasan semasa kecil mempunyai potensi untuk menjadi pelaku pada masa yang akan datang sewaktu korban tersebut telah dewasa. Trauma yang luas dan panjang ini harus mendapatkan pelayanan secara komprehensif. Penanganan yang komprehensif adalah penanganan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak yang kompeten.

Dari sejumlah layanan yang diberikan, layanan konseling merupakan layanan yang paling banyak dipilih baik itu oleh anak laki-laki maupun perempuan dengan persentasenya sebesar 88.52%, selanjutnya layanan kesehatan menempati urutan kedua dengan persentase sebesar 8.19% Untuk layanan konseling anak perempuan lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki dengan perbandingannya adalah 48 : 6.

KEMANTREN	PELAYANAN YANG DIBERIKAN							JUMLAH
	Konseling	Shelter	Kesehatan	Hukum	Rehabilitasi Sosial	Reintegrasi Sosial	Penanganan Pengaduan	
TEGALREJO	7	0	1	0	0	0	0	8
JETIS	9	0	0	1	0	0	0	10
GONDOKUSUMAN	2	0	0	1	0	0	0	3
DANUREJAN	1	0	0	0	0	0	0	1
NGAMPILAN	1	0	0	0	0	0	0	1
GEDONGTENGEN	2	0	0	1	0	0	0	3
KRATON	1	0	0	1	0	0	0	2
PAKUALAMAN	1	0	0	0	0	0	0	1
MANTRIJERON	3	0	0	1	0	0	0	4
GANDOMANAN	0	0	0	0	0	0	0	0
WIROBRAJAN	5	0	0	0	0	0	0	5
MERGANGSAN	6	0	0	0	0	0	0	6
UMBULHARJO	5	0	0	2	0	0	0	7
KOTAGEDE	4	0	0	0	0	0	0	4
JUMLAH	47	0	1	7	0	0	0	55

Tabel 4.14. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Kemantren dan Pelayanan yang Diberikan Korban Kota Yogyakarta Tahun 2022
 Sumber : Data SIGA DP3AP2 DIY, 2022

Pemerintah telah memberikan sejumlah layanan kepada korban kekerasan yang mencakup layanan konseling, shelter, kesehatan, hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan penanganan pengaduan. Selama satu tahun terakhir jenis pelayanan yang paling banyak diberikan adalah konseling. Pada tahun 2022 ini 47 korban yang tersebar di 14 kemantren mendapatkan layanan berupa konseling dimana dari Kemantren Jetis menyumbang sebesar 19.15%, Kemantren Tegalrejo sebesar 14.89% serta Kemantren Mergangsan sebesar 12.76%.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tingkat kesetaraan gender di Kota Yogyakarta sudah tinggi, hal ini dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang konsisten mengalami kenaikan dan mencapai angka 98,48% di tahun 2022, dimana angka tersebut sudah mendekati angka 100. Dari jumlah penduduk yang bekerja pun, jumlah perempuan yang bekerja juga cukup tinggi. ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural pun juga cukup banyak. Hal diatas menunjukkan bahwa kesempatan berkembang dan berkarir sama terbuka lebar baik untuk laki-laki dan perempuan.

Namun yang perlu menjadi perhatian dan catatan adalah untuk perempuan yang berpolitik. Keikutsertaan perempuan dalam politik masih rendah, dapat dilihat dari jumlah legislator perempuan yang ada di DPRD Kota Yogyakarta. Pada tahun 2021 tercatat hanya 6 orang dari 40 kursi yang ada. Undang-undang mengamanatkan jumlah perempuan dalam parlemen adalah 30%, namun yang ada pada saat ini sangat jauh mendekati target. Perempuan masih membutuhkan dorongan dan juga ajakan untuk mulai berpolitik untuk menyuarakan kepentingannya juga. Partai politik masih memasang kader perempuan sebagai pelengkap saja.

Kekerasan yang terjadi di Kota Yogyakarta cukup tinggi, hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang peduli dan rajin untuk melapor, serta para lembaga yang menangani rajin dan juga memiliki pencatatan yang baik mengenai klien yang mereka tangani. Masyarakat Kota Yogyakarta sudah sadar dan juga paham jika mengalami kekerasan atau mengetahui adanya tindak kekerasan harus melakukan apa.

Di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 terdapat 55 kasus kekerasan terhadap anak. 16.36% terjadi di Kemantren Jetis. Sebagian besar yang menjadi korban adalah anak perempuan yaitu 67.27%, dari sejumlah korban yang ada 41.82% dengan jenjang Pendidikan belum tamat SD, pelaku dari kekerasan paling tinggi dilakukan oleh orang lain dengan jenis kekerasan berupa kekerasan psikis yang dilakukan di tempat umum. Pada dasarnya kekerasan pada anak itu ada beberapa macam diantaranya kekerasan secara fisik, psikis, kekerasan secara seksual, pencabulan, perkosaan, penelantaran dan eksploitasi anak. Jadi kekerasan terhadap anak itu bukan hanya fisik saja dan para orang tua harus memahami ini. Para korban kekerasan ini paling banyak mendapatkan pelayanan berupa konseling. Untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak telah diberikan/dibuatkan fasilitas yang ramah anak diantaranya kampung ramah anak, puskesmas ramah anak, masjid ramah anak, polsek ramah anak, sekolah ramah anak dll.

Selain kasus kekerasan masih ada lagi permasalahan anak yaitu pernikahan dini dan jumlah balita stunting. Di kota Yogyakarta jumlah dispensasi yang diputus Pengadilan Agama yang mengajukan untuk melakukan pernikahan dini ada 65 jiwa yang terdiri dari laki-laki 22 dan perempuan 43 jiwa, sementara berdasarkan data dari kelurahan jumlah caten pernikahan dini ada 123 pasang.

B. SARAN

1. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral untuk mendapatkan data yang lebih update.
2. Meningkatkan dan terus mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan reproduksi dan juga bahayanya kekerasan, serta pemahaman dan pembekalan kepada para calon pengantin agar dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, jauh dari kekerasan.
3. Mengedukasi partai politik untuk lebih membuka kesempatan kader perempuan yang memiliki potensi untuk duduk di posisi strategis dan kemudian menjadi legislator.
4. Edukasi metode parenting yang baik bagi para calon orang tua dan orang tua, supaya pola asuh yang buruk tidak terulang kembali.



dp3ap2kb_yk



@Dp3ap2kbKota



Dinas Pemberdayaan Yogyakarta

